Rencana Aksi Nasional (RAN)

Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan di Indonesia Tahun 2010 - 2014

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementrian Hukum dan HAM R.I.

Sambutan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Daftar Isi

Pengantar			i
Sambutan Direktur Jenderal Pemasyarakatan			ii
Daftar isi			iv
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia			1 - 4
Ringkasan Eksekutif			5 - 6
BAB	**I:**	**Pendahuluan**	7 - 18
		A. Latar Belakang	9
		B. Tantangan	12
		C. Komitmen	14
		D. Justifikasi	15
		E. Dasar Hukum	17
BAB	**II:**	**Pelaksanaan Stranas 2005-2009**	19 - 24
		A. Gambaran kinerja secara umum	19
		B. Gambaran kinerja terperinci	20
		C. Kelemahan dan Hambatan	23
BAB	**III:**	**Isu Strategis**	25 - 26
BAB	**IV:**	**Visi, Misi, dan Nilai-nilai**	27 - 28
		A. Visi	27
		B. Misi	27
		C. Nilai-nilai	27
BAB	**V:**	**Tujuan, Strategi, dan Sasaran Utama**	29 - 36
		A. Tujuan Umum	29
		B. Tujuan Khusus	29
		C. Strategi	30
		D. Sasaran Geografis	31
		E. Struktur Pengelolaan Program	33

BAB VI: Program dan lingkup kegiatannya 37 - 69
A. Program 37
B. Lingkup Kegiatan Program 37
I. Bimbingan dan Penegakan Hukum, Pelayanan Sosial, serta Terapi dan Rehabilitasi Berkesinambungan 37
1. Program Penegakan dan Bimbingan Hukum 37
2. Pelayanan Sosial 39
3. Terapi dan Rehabilitasi Narkoba 42

II. Pencegahan, Pengobatan, dan Perawatan HIV-AIDS 46
1. KIE 46
2. VCT/PICT 48
3. Akses material pencegahan penularan HIV/IO 50
4. Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan HIV/IO 52

III. Penelitian, Pengamatan, dan Pengembangan 54
1. Penelitian 54
2. Pengamatan 56
3. Pengembangan 57

BAB VII: Pemantauan dan Evaluasi 58

BAB VIII: Anggaran dan Sumber Pendanaan 67

BAB IX: Rencana Kerja Tahunan RAN 2010-2014 69

Daftar Singkatan 70
Daftar Lampiran 73
Daftar Pustaka 74
Lampiran 75 - 94

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH.01.PH.02.05 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS–ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF BERBAHAYA LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN TAHUN 2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa penyebaran *Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dibutuhkan langkah yang terpadu dan berkelanjutan dalam penanggulangannya;

b. bahwa langkah strategis penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya di unit pelaksana teknis pemasyarakatan tahun 2005 – 2009 berakhir pada Desember 2009;

c. bahwa untuk melanjutkan langkah strategis perlu segera menetapkan kebijakan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus– Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan 2010 – 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;
7. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 20/KEP/MENKO/KESRA/XII/2003 dan Kepala Kepolisian Negara Nomor B/01/XII/2003/BNN tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan *Human Immunodeficiency Virus– Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif dengan Cara Suntik;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus–*

Acquired Immune Deficiency Syndrome melalui Penanggulangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09- PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNO-DEFICIENCY VIRUS–ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTRO-PIKA DAN BAHAN ADIKTIF BERBAHAYA LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYA-RAKATAN TAHUN 2010–2014.

Pasal 1

(1) Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan adalah dokumen yang berisi arah dan kebijakan, strategis, tata nilai, lingkup program dan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan tahun 2010-2014.

(2) Dokumen Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Aksi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman yang wajib dijadikan acuan bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi lain dalam melaksanakan

Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

Pasal 3

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja Negara, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 18.

Ringkasan Eksekutif

Pada empat tahun terakhir, jumlah WBP dan tahanan mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan jumlah WBP dan tahanan Narkotika[1]. Hingga bulan September 2009, WBP dan tahanan berjumlah 131.115 orang, dimana 28,15% diantaranya adalah WBP dan tahanan Narkotika. Peningkatan jumlah WBP dan tahanan tersebut belum dapat diimbangi dengan usaha meningkatkan jumlah Lapas/Rutan dan/atau kapasitasnya. Secara nasional, kelebihan daya huni Lapas/Rutan mencapai 46,81%.

Situasi epidemi HIV, TBC, dan infeksi oportunistik di Lapas/Rutan di Indonesia masih belum berhasil dikendalikan dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Lapas/Rutan pada tahun 2005-2009. Di beberapa Lapas/Rutan masih ditemukan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Situasi tersebut memerlukan usaha pencegahan penularan dan penatalaksanaan pelayanan yang optimum dengan strategi, kegiatan program dan sasaran yang tepat, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Sejak penetapan strategi penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika di Lapas/Rutan tahun 2005-2009 tahun 2005-2009, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM RI telah melakukan usaha nyata penanggulangan HIV, TBC, dan infeksi oportunistik lainnya serta pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Lapas/Rutan melalui sistim perencanaan program tahunan, pelatihan teknis dan manajemen program, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. Sembilan puluh lima Lapas/Rutan ditetapkan sebagai prioritas nasional dan telah dilakukan pelatihan teknis serta manajemen program bagi para petugasnya. Hasilnya, sedikitnya 50 dari 95 Lapas/Rutan prioritas nasional tersebut telah memberikan layanan program.

Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas/Rutan tahun 2005-2009 telah berakhir. Berdasarkan pengalaman pengelolaan program di masa lalu dan didukung komitmen politis Menteri Hukum dan HAM RI, ditetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan tahun 2010-2014 sebagai lanjutan dari Stranas 2005-2009.

[1] *Pengertian Narkotika dalam RAN ini meliputi Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut dengan RAN Ditjenpas 2010-2014 menguraikan arah dan kebijakan, strategi, tata nilai, lingkup program, dan ukuran keberhasilan. RAN Ditjenpas 2010-2014 merupakan dokumen rujukan utama bagi seluruh Jajaran Pemasyarakatan untuk pengelolaan dan pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika.

RAN Ditjenpas 2010-2014 menetapkan 101 hingga 139 Lapas/Rutan dan 20 – 25 Bapas yang berada di 20 – 25 provinsi di Indonesia sebagai prioritas nasional pelaksana program. WBP dan tahanan yang akan mendapat akses layanan program sebesar 81.886 hingga 90.000 orang atau 62% dari total WBP dan tahanan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 94%-nya adalah WBP dan tahanan Narkotika dari total WBP dan tahanan Narkotika di Indonesia.

Lingkup program RAN Ditjenpas 2010-2014, terdiri atas 3 pokok program yakni: (i) Bimbingan dan penegakan hukum, pelayanan sosial, serta terapi dan rehabilitasi berkesinambungan; (ii) Pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV-AIDS serta IO; dan (iii) Penelitian, Pengamatan, dan Pengembangan. Tiga pokok program tersebut, masing-masing menggambarkan secara terperinci tentang kegiatan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan terintegrasi ke dalam sistim pemasyarakatan.

Pada periode RAN 2010-2014 akan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh WBP dan tahanan yang berada di 101 - 139 Lapas/Rutan dan 20 – 25 Bapas telah mendapat layanan Admisi dan Orientasi, Gakkum dan Bimkum, KIE tentang HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika, dan Layanan Sosial.
2. Sepuluh hingga 20% WBP dan tahanan narkotika di Lapas, Rutan, dan Bapas prioritas telah mengakses layanan terapi dan rehabilitasi sosial dan medis.
3. Sebelas dari 101 – 139 Lapas/Rutan prioritas akan membuka layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS, VCT, KDS, MK, PTRM, dan ARV/IO.
4. Meningkatnya kualitas K3 dan Kesehatan Lingkungan di 50% dari 101 – 139 Lapas/Rutan prioritas.

Perencanaan dan evaluasi tahunan akan dilakukan pada rapat evaluasi tahunan Jajaran Pemasyarakatan, dan evaluasi akhir akan dilaksanakan pada akhir periode RAN dengan melibatkan tenaga ahli eksternal.

Dalam masa pelaksanaan, Ditjenpas akan melakukan pembimbingan teknis serta manajemen, melalui kerjasama atau dukungan berbagai pihak dalam dan luar negeri.

Pendanaan RAN Ditjenpas 2010-2014 dapat bersumber dari APBN, APBD, GF-ATM, dan LSM dalam serta luar negeri.

BAB 1

PENDAHULUAN

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) telah menjadi pandemi global. Sejak kasus pertama dilaporkan di Amerika Serikat pada tahun 1981, penyebaran AIDS meningkat pesat. Global report yang dikeluarkan UNAIDS pada akhir tahun 2007 menyebutkan 33 juta jiwa (30 juta-36 juta) hPenasunp dengan HIV, 2.7 juta jiwa (2.2 juta – 3.2 juta) terinfeksi HIV, dan 2 juta jiwa (1.8 juta - 2.3 juta) meninggal dunia akibat HIV dan infeksi opportunistik lainnya. Pada tahun 2007 saja ditemukan 2.7 juta infeksi baru HIV.

Saat ini di seluruh dunia, setiap harinya sekitar 2000 anak-anak usia 15 tahun ke bawah terinfeksi HIV akibat penularan dari ibu ke bayinya, sekitar 1,400 anak-anak usia dibawah 15 tahun meninggal akibat AIDS, sementara sekitar 6,000 orang dalam usia produktif antara 15-24 tahun terinfeksi HIV. Walaupun belum tersedia data mengenai penyebaran AIDS di penjara di dunia, dapat dimungkinkan bahwa sebagian dari populasi usia produktif tersebut adalah WBP dan tahanan dan Tahanan.

Di Indonesia, sejak kasus AIDS pertama kali ditemukan di Bali tahun 1987, sekitar 200 kabupaten/kota di 33 provinsi telah melaporkan temuan kasus HIV-AIDS. Kasus baru AIDS yang dilaporkan pada tahun 2008 sebanyak 4,969 kasus adalah empat kali lebih besar dibandingkan laporan tahun 2004, yakni

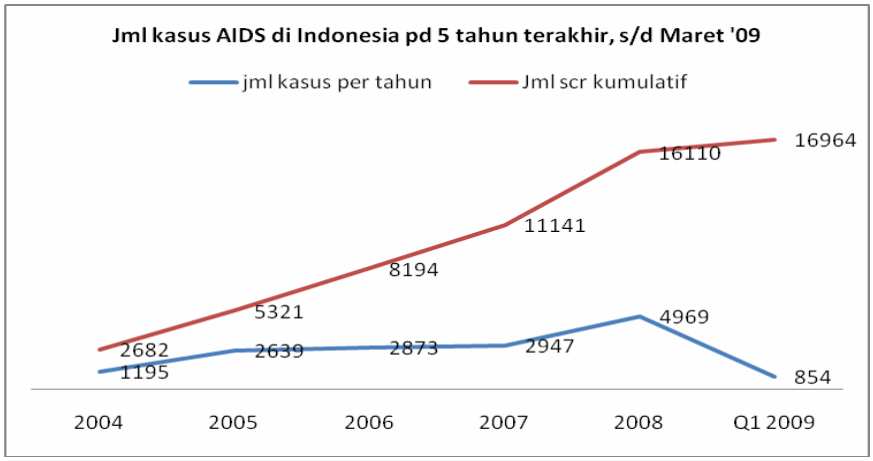

Sumber: laporan Kemkes RI

1,195 kasus. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kasus AIDS secara signifikan pada periode 3 tahun tersebut.

Hasil survei terpadu biolojik dan perilaku (STBP) yang dilaksanakan oleh Kemkes R.I. tahun 2007 bahwa prevalensi HIV pada populasi tertentu yang diteliti sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Populasi umum yakni keluarga langsung (umumnya istri dan anak) dari populasi kunci tertular HIV akan semakin rentan tertular HIV, infeksi menular seksual (IMS), dan infeksi penyakit lainnya. Hal ini ditinjau dari perilaku seksual berisiko pada sub populasi pelanggan pekerja seks komersil dan pengguna Narkotika suntik.

Etimasi populasi dewasa rawan tertular HIV tahun 2006, diperkirakan ada 4-8 juta orang berisiko terinfeksi HIV. Sub-populasi terbesar adalah Pelanggan Pekerja Seks komersil, yakni lebih dari 3,1 juta orang dan pasangannya sebanyak 1,8 juta. Pengguna Napza suntik (Penasun) merupakan sub populasi merupakan sub populasi ini dengan infeksi HIV terbesar yakni sebesar 46% dari prakiraan jumlah ODHA di Indonesia.

Gambar 2. Estimasi Orang Dengan HIV dan AIDS di Indonesia Tahun 2006

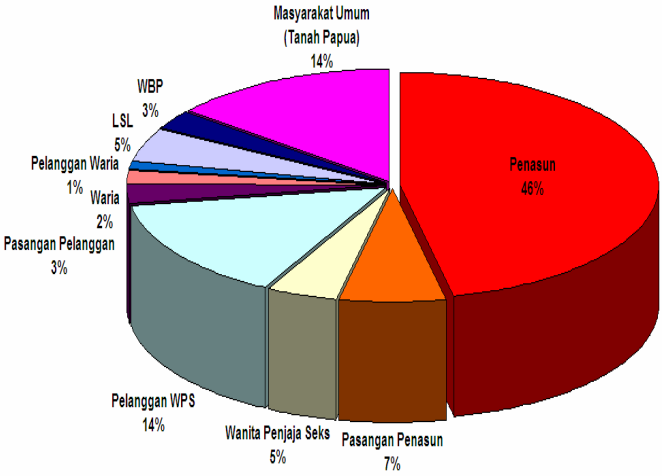

Sumber : Laporan Estimasi Populasi Rawan Tertular HIV Tahun 2006 Departemen Kesehatan RI

Warga binaan pemasyarakatan (WBP dan tahanan) termasuk dalam kategori populasi kunci infeksi HIV yang diestimasikan. Sebagaimana estimasi populasi rawan tahun 2006, prakiraan jumlah kasus AIDS pada WBP dan tahanan sebanyak 5,129 orang.

Jumlah WBP dan tahanan pada 4 tahun sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 sebanyak 89.708 orang, meningkat menjadi 131,115 orang pada bulan Mei 2009. Di dalam peningkatan jumlah WBP dan tahanan pada periode yang sama juga terjadi peningkatan jumlah WBP dan tahanan Narkotika. Pada tahun 2005 sebanyak 21,087 orang atau 23,51%, meningkat menjadi 36,913 orang atau 28,15% pada bulan Mei 2009. Peningkatan jumlah WBP dan tahanan Narkotika tersebut diperkirakan juga termasuk pengguna Narkotika suntik. Situasi penularan HIV pada WBP dan

tahanan yang Narkotika suntik di dalam Lapas/Rutan sangat mungkin se-irama dengan pengguna Narkotika suntik di luar Lapas/Rutan.
Situasi epidemi HIV di Lapas/Rutan tersebut di atas menggambarkan bahwa penularan HIV pada WBP dan tahanan belum dapat dikendalikan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM RI melanjutkan Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan tahun 2005-2009 dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan di Indonesia tahun 2010-2014.

A. LATAR BELAKANG

Data Kementerian Kesehatan R.I. yang dihimpun dari laporan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/kota di Indinesia menyebutkan bahwa hingga Maret 2009 kasus AIDS secara kumulatif berjumlah 16,964 kasus.

Sebaran Kabupaten/Kota yang melaporkan kasus AIDS, hingga Maret 2009

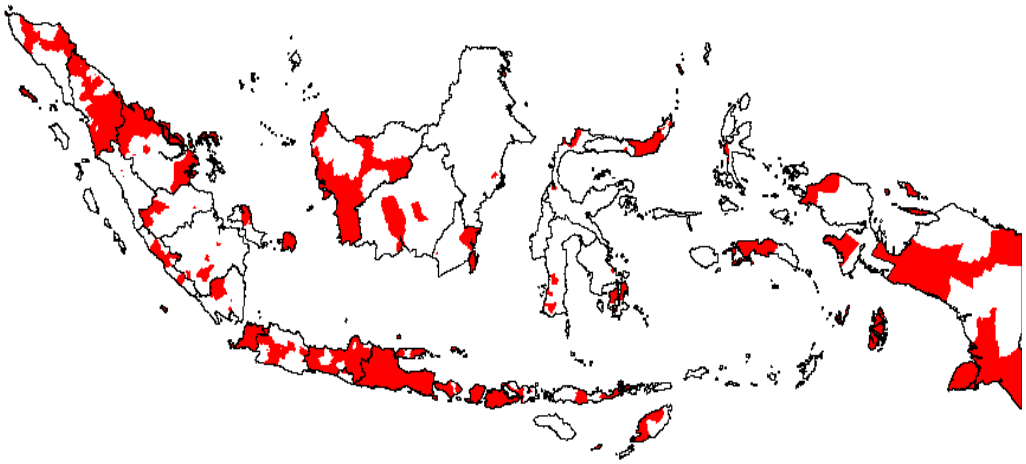

Terdapat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus AIDS dalam jumlah besar adalah Provinsi Jawa Barat 3,162 kasus, DKI Jakarta sebanyak 2,807 kasus, Jawa Timur 2,652 kasus, Papua 2,499 kasus, Bali 1,263 kasus, Kalimantan Barat 730 kasus, Sumatera Utara 485 kasus, Jawa Tengah 573 kasus, Riau 368 kasus, dan Kepulauan Riau 325 kasus.

Dua modus penularan terbesar yakni melalui penggunaan Napza suntik 42.6%, dan seks berisiko (heteroseksual 55% dan homoseksual 3.1%).

Hasil Pemodelan epidemi di Indonesia memproyeksikan jumlah ODHA usia 15-49 tahun sebesar 0,22% atau sekitar 277,700 orang pada tahun 2008, meningkat menjadi 0,37% atau 501,400 orang pada tahun 2014. Proyeksi peningkatan jumlah tersebut menggunakan asumsi bahwa bila pada kurun waktu tersebut upaya pengendalian penularan HIV dan penanganan AIDS sama dengan yang dilakukan pada periode sebelumnya.

Dengan demikian, kebutuhan pengobatan ARV untuk populasi usia 15-49 tahun akan meningkat dari 30,100 pada tahun 2008 menjadi 81,300 pada tahun 2014. Jumlah kematian terkait AIDS pada populasi 15-19 tahun juga terproyeksikan meningkat dari 10,400 pada tahun 2008 menjadi 32,900 di tahun 2014.

Proyeksi kebutuhan pengobatan ARV dan kematian terkait AIDS tersebut hanya akan terjadi bila cakupan pengobatan ARV tahun 2009 hingga 2014 sama dengan tahun 2008.

Indonesia belum mempunyai data terkini yang menggambarkan secara spesifik tentang risiko penularan HIV dan prevalensi HIV di UPT Pemasyarakatan di Indonesia. Menilik pada data WBP dan tahanan Narkotika yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat kepadatan hunian yang melebihi kapasitas, dan belum terpenuhinya akses layanan program yang berkelanjutan dapat dimungkinkan risiko penularan dan prevalensi HIV pada WBP dan tahanan memiliki kesamaan dengan populasi kunci lainnya terutama Penasun dan Lelaki Suka seks sesama Lelaki (disingkat LSL atau disebut homoseksual) yang berada di luar UPT Pemasyarakatan. Ada sinyalemen bahwa terjadi perilaku berisiko penularan HIV pada kalangan WBP dan tahanan di UPT Pemasyarakatan pada penyalahguna narkotika dengan cara menyuntik, pekamaian alat tattoo[2] dan tindik yang tidak steril, dan hubungan seks sesama WBP dan tahanan.

Pada tahun 2007, Kemkes R.I. melaksanakan survei terpadu biolojik dan perilaku (STBP) pada populasi kunci di 7 provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Hasil STBP pada sub populasi tertentu yakni Penasun, laki-laki bermobilitas tinggi, dan LSL yang diuraikan dibawah dapat digunakan sebagai gambaran perilaku berisiko dan situasi epidemi HIV di UPT Pemasyarakatan di Indonesia.

I. Sub populasi Penasun memiliki tingkat pengetahuan dan perilaku relatif baik tentang pencegahan penularan HIV dan infeksi oportunistik namun belum berpengaruh banyak pada perubahan perilaku pemakaian alat suntik secara bergiliran dan seks berisiko. Prevalensi HIV pada sub

[2] *Tattooing is a common HIV risk behaviour in prison and has been identified as a risk factor for HIV transmission (Loimer & Werner, 1992)*

populasi Penasun di 4 kota yakni Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya sebesar antara 43% sampai 56%. Sebagian besar Penasun dapat digolongkan aktif seks, 20-60% memiliki pasangan seks tidak tetap, dan antara 9-54% berhubungan seks dengan pekerja seks komersil (PSK).

II. Sub populasi laki-laki berisiko yang diteliti adalah supir truk, ABK, pekerja pelabuhan, dan tukang ojek. Pengetahuan tentang pemakaian kondom mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual (IMS) pada subpopulasi ini masih rendah berkisar 36% - 55%. Hubungan seks pakai kondom secara konsisten dengan PSK berkisar antara 7-45%. Tingginya prevalensi IMS pada sub populasi ini yakni gonorrhea 0.7% – 7.0%, syphilis 4.5% – 9.3%, clamidia 1.3% – 7.0% akan berpeluang pada peningkatan penularan HIV baik pada sub populasi ini maupun meluas ke istri dan anak mereka.

III. Sub populasi LSL memiliki tingkat pengetahuan yang relatif tinggi tentang setia pada satu partner seks dan kondom dapat mencegah penularan HIV dan IMS. Pemakaian kondom secara konsisten pada 1 bulan terakhir mencapai 11.1% - 32.3%. Prevalensi HIV pada sub populasi ini sudah mencapai 2% - 8.1% dan berpeluang akan meningkat dikarenakan perilaku berhubungan seks dengan pemakaian kondom konsisten masih relatif rendah.

Ditinjau dari kondisi dan keberadaannya, WBP dan tahanan memiliki karakteristik yang relatif mirip dengan sub populasi Penasun dan sub populasi LSL di luar UPT Pemasyarakatan.

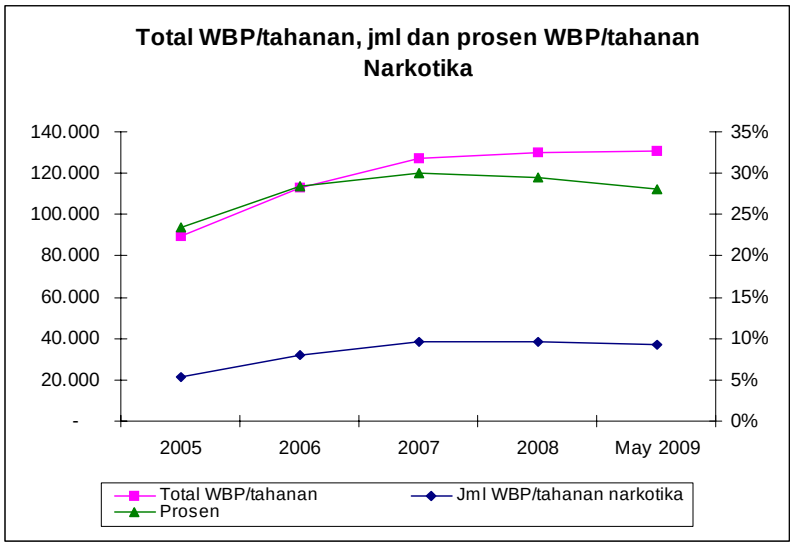

Sumber: Data Ditjenpas, Kemkumham RI

B. TANTANGAN

Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan di Indonesia telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan sumber daya yang terbatas. Manajemen perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan program termasuk supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi mendapat dukungan dari KPAN, Kemkes, dan lembaga-lembaga mitra internasional.

Jumlah WBP dan tahanan yang cenderung meningkat pada empat tahun berturut-turut semakin menambah kelebihan daya huni (over capacity) UPT Pemasyarakatan. Walaupun pada setiap tahunnya kapasitas UPT Pemasyarakatan terus ditingkatkan, namun daya hunian yang ada tetap melebihi kapasitas yang disediakan. Pada tahun 2005, kelebihan daya hunian mencapai 31,65% dan meningkat menjadi 46,81% pada tahun 2008. Situasi kepadatan hunian tersebut menambah kesulitan pelaksanaan program pembinaan pemasyarakatan, keamanan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penyehatan lingkungan dan kesehatan termasuk program penanggulangan HIV-AIDS, TBC, dan infeksi oportunistik lainnya.

Pemerintah Indonesia menargetkan akan membangun dan memfungsikan minimal 33 Lapas Khusus Narkotika di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2008, enam belas (16) Lapas Khusus Narkotika telah dibangun dan/atau difungsikan. Sembilan diantaranya adalah Lapas Khusus Narkotika hasil pembangunan baru[3], 5 (lima) Lapas umum difungsikan sebagai Lapas Khusus Narkotika[4], 2 (dua) Lapas Khusus Narkotika yang sudah ditetapkan melalui SK Menkumham namun belum berfungsi[5]. Target minimal untuk membangun Lapas Khusus Narkotika di tiap provinsi yang belum dapat dicapai sehingga menyebabkan Ditjenpas belum berhasil menempatkan semua narapidana Narkotika pada Lapas Khusus Narkotika.

Program pemasyarakatan belum menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah di banyak provinsi dan kab/kota. Program penyediaan layanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan bagi WBP dan tahanan belum tersedia pada APBD provinsi, dan kabupaten/kota.

Selama masa Stranas 2005-2009, survey surveilans perilaku HIV-AIDS belum pernah dilaksanakan di UPT Pemasyarakatan prioritas. Oleh karenanya

---

[3] *Sembilan Lapas Khusus Narkotika hasil pembangunan baru adalah (i) Muara Beliti - Lubuk Linggau, (ii) Cipinang, (iii) Gintung-Cirebon, (iv) Way hui - Bandar Lampung, (v) Nusakambangan, (vi) Yogyakarta, (vii) Sungguminasa – Sulawesi Selatan, (viii) Tanjung – Kalimantan Selatan, (ix) Jayapura - Papua*

[4] *Lima Lapas Umum yang difungsikan sebagai Lapas Khusus Narkotika: (i) Pematang Siantar – Sumatera Utara, (ii) Banceuy – Bandung, (iii) Madiun – Jawa Timur, (iv) Pamekasan – Jawa Timur, (v) Bangli – Bali.*

[5] *Dua Lapas Khusus Narkotika yang telah ditetapkan namun belum berfungsi adalah (i) Jelekong-Bandung, (ii) Tanjungpinang – Kepulauan Riau.*

Ditjenpas hingga kini belum memiliki data spesifik tentang situasi epidemi HIV dan risiko penularan pada kalangan WBP dan tahanan.

Beberapa faktor dominan yang mempengaruhi belum terkendalinya penularan HIV dan penanganan AIDS serta penyalahgunaan dan peredaran gelap

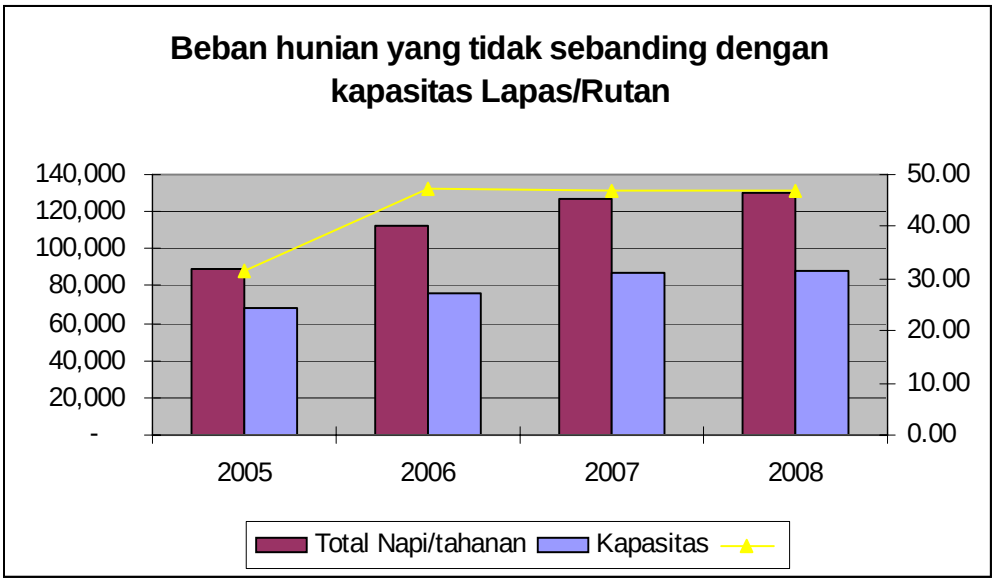

Sumber: Data Ditjenpas, Kemkumham RI

Narkotika di UPT Pemasyarakatan adalah masih terbatasnya sumberdaya yang tersedia pada jajaran Ditjenpas, belum kuat dan meratanya jejaring layanan program antara UPT Pemasyarakatan dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kepemimpinan dan koordinasi pada setiap tingkatan jajaran Ditjenpas akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian penularan HIV, penanganan AIDS, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Tahanan Negara.

Seringnya ada temuan kasus AIDS pada stadium terminal pada kalangan WBP dan tahanan membutuhkan penanganan AIDS secara menyeluruh termasuk peningkatan akses ARV, obat-obat infeksi oportunistik, dan perawatan paliatif berbasis UPT Pemasyarakatan untuk pemenuhan hak asasi WBP dan tahanan/ tahanan dan agar tingkat kematian akibat AIDS dan infeksi oportunistik dapat dikendalikan.

Jumlah dan kapasitas teknis tenaga kesehatan di UPT Pemasyarakatan prioritas masih belum sebanding dengan besaran masalah yang dihadapi untuk mengendalikan penularan HIV, dan penanganan serta pengobatan AIDS dan infeksi oportunistik. Beberapa UPT Pemasyarakatan prioritas terletak pada posisi

geografis yang jauh dari pusat layanan kesehatan yang menyediakan layanan VCT, RS Pengampu Rumatan Methadon, dan RS pusat rujukan ARV. Dampaknya adalah biaya keamanan untuk layanan rujukan menjadi sangat mahal, dan ketepatan serta kepatuhan pengobatan ARV dan layanan program terapi rumatan methadon (PTRM) sulit untuk terjaga.

Petugas UPT Pemasyarakatan masih perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan pencegahan penularan HIV dan IO, dan penanganan kasus AIDS dan IO yang berguna untuk petugas dan keluarganya serta usaha pembinaan bagi WBP dan tahanan.

C. KOMITMEN

Secara substantif misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM R.I. merupakan komitmen politis yang kuat dalam membangun pola hidup sosial bermasyarakat bagi WBP dan tahanan, yaitu:

I. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penegakan Hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;

II. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan;

III. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.

IV. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder

Dalam menjalankan komitmen tersebut, Ditjenpas didukung struktur organisasi lengkap dan tugas pokok serta fungsi yang jelas. Struktur tersebut adalah (i) Sekretariat Direktorat Jenderal, (ii) Direktorat Bina Registrasi dan Statistik, (iii) Direktorat Bina Perawatan, (iv) Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, (v) Direktorat Bina Latihan Kerja dan Produksi, (vi) Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, (vii) Direktorat Bina Khusus Narkotika.

Pada tahun 2005 tingkat kematian sebesar 0,89%, turun menjadi 0,73% pada tahun 2006. dan menjadi 0,58% pada tahun 2008. Pada 3 tahun terakhir yakni tahun 2007, 2008, dan 2009 jumlah kematian WBP dan tahanan mengalami penurunan. Tahun 2007 sebanyak 893 orang atau 0,70% WBP dan tahanan meninggal, turun menjadi 750 orang atau 0,58% pada akhir tahun 2008, dan sampai dengan akhir bulan September 2009 turun menjadi 471 orang, atau 0,36%.

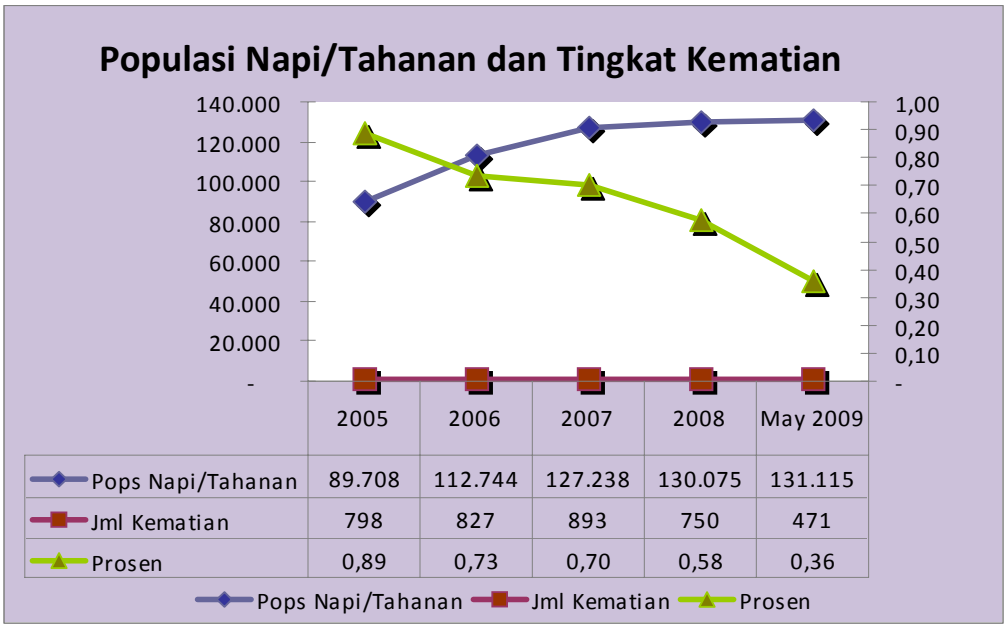

Sumber: Data Ditjenpas, Kemkumham RI

Komitmen politis dan operasional penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika pada jajaran Ditjenpas di semua tingkat selama masa pelaksanaan Stranas 2005-2009 menunjukkan peningkatan. Peningkatan komitmen politis dan operasional tersebut baik secara langsung maupun tak langsung telah memberikan kontribusi pada penurunan tingkat kematian WBP dan tahanan.

D. JUSTIFIKASI:

Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan periode 2010-2014 merupakan penjabaran konkrit dari komitmen politis Kementerian Hukum dan HAM dalam usaha meningkatkan kinerja penegakan dan pembinaan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, mengendalikan penularan HIV dan menurunkan tingkat kesakitan serta kematian WBP dan tahanan akibat HIV dan AIDS serta infeksi oportunistik. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan tahun 2010-2014 mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

I. Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan tahun 2005-2009 berakhir.

II. Sebagai uraian detil dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010 – 2014 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2010 - 2014 yang memberikan penekanan pada

peran pengembangan hukum dan undang-undang tentang HIV-AIDS dan Narkotika, usaha menciptakan lingkungan yang memberdayakan, pemenuhan hak atas pembinaan hukum, pelayanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan bagi WBP dan tahanan.

III. Sebagai rujukan usaha meningkatkan koordinasi program antar Direktorat di lingkungan Ditjenpas dan antar Unit Eselon I di Kemkumham.

IV. Merespon situasi HIV-AIDS dan IO yang diperkirakan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah WBP dan tahanan Narkotika. Hingga akhir September 2009, WBP dan tahanan memiliki

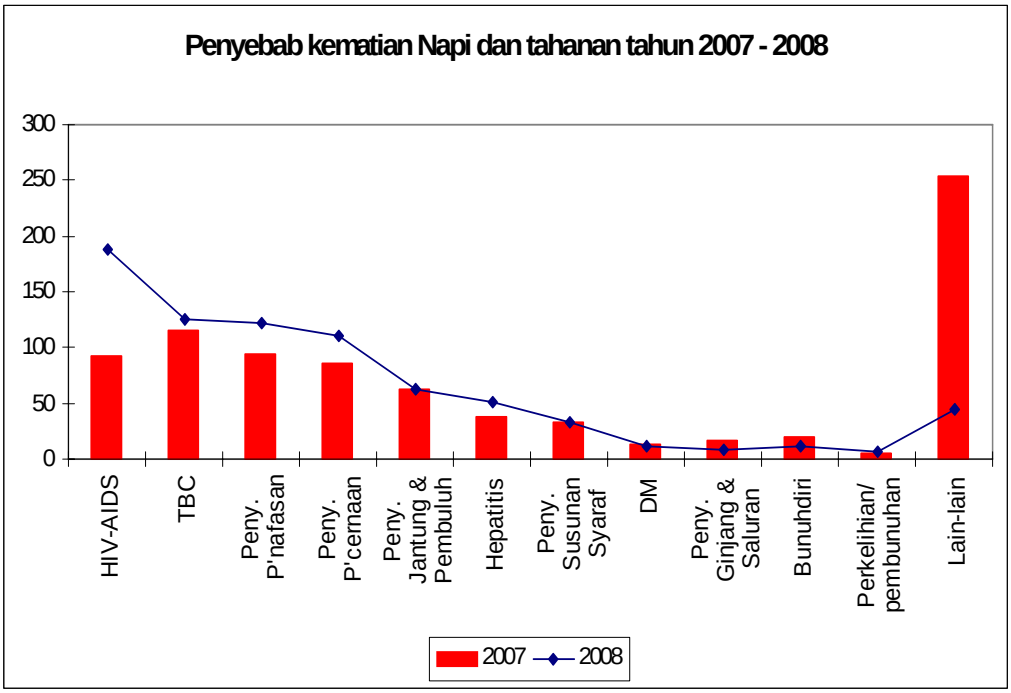

Sumber: Data Ditjenpas, Kemkumham RI

akses yang terbatas terhadap program pencegahan penularan HIV; penanganan perawatan, dukungan, dan pengobatan kasus AIDS serta infeksi oportunistik; dan layanan pembinaan hukum, terapi serta rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika.

V. Merespon penyakit utama penyebab kematian tertinggi pada WBP dan tahanan yakni HIV-AIDS dan infeksi oportunistik yakni TBC dan penyakit pernafasan, serta hepatitis. Grafis berikut menggambarkan peningkatan beberapa penyakit tertentu penyebab kematian pada tahun 2007 dan 2008

E. Dasar Hukum:

I. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

II. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan;

III. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

IV. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasaan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;

V. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

VI. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

VII. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Napi/Tahanan Pemasyarakatan;

VIII. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Napi/Tahanan Pemasyarakatan;

IX. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;

X. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

XI. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN);

XII. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN);

XIII. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif lainnya;

XIV. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;

XV. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/Kep/Menko/Kesra/ IV/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS;

XVI. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nomor 20/KEP/MENKO/ KESRA/XII/2003 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/01/XII/ 2003/BNN Tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif Dengan Cara Suntik.

XVII. Peraturan Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Suntik (Harm Reduction)

XVIII. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA Adiktif Lainnya (NAPZA);

XIX. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 486/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan dan Rencana Strategis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA Adiktif Lainnya (NAPZA);

XX. Peraturan Menteri Sosial Republk Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunan Narkotika, Psikotropka, dan Zat Adiktif lainnya.

XXI. Peraturan dan ketentuan lain (Jajaran Kemkumham dan eksternal) yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika seperti Surat Edaran, Petunjuk Teknis, Pedoman, dan lain-lain.

BAB 2

PELAKSANAAN STRANAS 2005 - 2009

A. Gambaran kinerja secara umum:

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menetapkan dan mengelola pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas/Rutan periode 2005-2009. Para pimpinan di Lingkungan Ditjenpas di semua tingkat telah menunjukkan kepemimpinannya di dalam merencanakan, menggerakkan sumberdaya untuk pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi hasil secara periodik. Sejak tahun 2005, program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika telah mulai dilaksanakan. Kualitas layanan dan kuantitas hasil layanan program akan lebih ditingkatkan pada RAN periode 2010-2014.

Sebagai langkah awal pelaksanaan Stranas 2005-2009, Ditjenpas bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat dan provinsi merumuskan Strategi Operasional sebagai berikut:

I. Mengupayakan terbitnya Surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang peningkatan akses layanan kesehatan bagi WBP dan tahanan.

II. Memfungsikan Pokja Lapas/Rutan di KPA Propinsi dengan mendorong layanan komprehensif Penanggulangan HIV/AIDS di UPT Pemasyarakatan.

III. Mendukung Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk berkerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi (KPAP).

IV. Mengajukan anggaran tersendiri tentang layanan kesehatan di Rutan/ Lapas, termasuk memperbesar bugdet pelaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkotika melalui APBN maupun non APBN.

V. Membentuk sistem monitoring dan evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkotika secara nasional.

VI. Perlu advokasi baik tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka mengatasi dampak buruk akibat penggunaan jarum suntik ilegal.

VII. Menyusun Strandar Operasional Prosedur dan Pedoman-pedoman.

B. Gambaran kinerja terperinci:

I. Pelaksanaan butir-butir strategi operasional:

1. Draft SKB 3 menteri telah tersusun dan dikonsultasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Ditjenpas tidak melanjutkan pembahasan draft SKB 3 menteri tersebut karena dinilai tidak memberikan efek positif pada usaha meningkatkan layanan kesehatan terkait HIV dan penyalahgunaan Narkotika bagi WBP dan tahanan. Namun demikian, Kemdagri melalui Biro Hukum merekomendasikan untuk menggunakan pasal 30, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang dana hibah.
2. Sembilan dari 24 provinsi yang menjadi konsenterasi Lapas/Rutan prioritas pelaksana Stranas 2005-2009 telah membentuk dan memfungsikan Pokja Lapas. Pojka Lapas tersebut berada di dalam struktur KPA Provinsi. 9 Provinsi yang telah membentuk Pokja Lapas tersebut adalah Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
3. Sembilan provinsi yang telah membentuk Pokja Lapas tersebut diatas telah memiliki rencana kerja. Tujuh provinsi diantaranya telah aktif melaksanakan advokasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka membangun jejaring layanan program antara Lapas/ Rutan dengan RSUD, Puskesmas, dan LSM aktivis AIDS.
4. Pada tahun 2007 anggaran kesehatan yang diterima dari APBN untuk Lapas/Rutan, secara nasional telah meningkat 20 kali lipat dari tahun sebelumnya. Memperhatikan kepadatan hunian dan perilaku berisiko WBP dan tahanan terhadap berbagai penyakit menular, peningkatan anggaran kesehatan tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasa. Sekitar empat Pemerintah Provinsi melalui KPA Provinsi yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur telah memberikan dukungan teknis dan anggaran untuk memperkuat jejaring layanan kesehatan bagi WBP dan tahanan.
5. Panduan Umum Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika beserta perangkat kerjanya telah

dikeluarkan oleh Ditjenpas melalui Surat Edaran No. PAS.OT.03.01-10, tertanggal 25 Januari 2008. Panduan umum tersebut sudah mulai digunakan. Namun, di masa datang diperlukan usaha yang intensif untuk memperkuat pelaksanaannya di semua tingkatan jajaran Ditjenpas.

6. Ditjenpas melalui kerjasama dengan KPAN, BNN, FHI, dan IHPCP (sekarang HCPI) dan pihak terkait lainnya telah melakukan advokasi di tingkat nasional dan provinsi prioritas tentang dampak buruk penyalahgunaan Narkotika melalui pertemuan regional, diikuti oleh Pemda (Dinkes), Kanwil Kemkumham, BNP/K, KPAD,dan UPT Pemasyarakatan.

II. Penetapan Petunjuk/Pedoman Teknis:

1. Juklak dan Juknis Voluntary Counseling and Test for HIV (VCT), Care Support and Treatment (CST), dan Manajemen Kasus (MK) telah ditetapkan Ditjenpas pada tahun 2006.
2. Pedoman Pelaksanaan Program Terapi Rumatan Methadon (PTRM) telah ditetapkan Ditjenpas tahun 2007 dan didistribusikan ke seluruh Lapas/Rutan di Indonesia. Lapas/Rutan yang ditunjuk sebagai pelaksana layanan PTRM dapat menggunakan pedoman pelaksanaan program tersebut sebagai rujukan.
3. Ditjenpas bersama BNN telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Narkotika Terpadu, One Stop Center.
4. Ditjenpas bekerjasama dengan Ditjen PP-PL Kemkes RI melalui SKB No E.36.UM.06.07 TAHUN 2004 tentang peningkatan upaya penanggulangan TBC di Lapas/Rutan di seluruh wilayah Indonesia. Dilanjutkan dengan penetapan Renstra TBC UPT Pemasyarakatan dan Panduan Teknis Pelaksanaan Program TBC di Lapas/Rutan, serta modul pelatihan bagi petugas.
5. Beberapa pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan R.I. seperti ARV/ART, Kewaspadaan Universal, dan prevention mother to child transmission (PMTCT).

III. Kegiatan pelatihan dan pembimbingan teknis, dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Kemkes, KPAN, BNN, FHI, dan HCPI.

1. Training of trainer (ToT - pelatihan bagi pelatih) konseling VCT bagi 10 orang petugas Lapas/Rutan yang kemudian berhasil melatih 153 petugas lainnya.

2. Pelatihan analisis laboratorium untuk tes HIV bagi 47 staf kesehatan dari 37 UPT Pemasyarakatan
3. ToT komunikasi perubahan perilaku (KPP) dan pengurangan risiko pemakaian Narkotika, diikuti oleh 25 orang petugas Jajaran Pemasyarakatan dari tingkat pusat dan provinsi yang kemudian berhasil melatih 187 petugas UPT Pemasyarakatan.
4. Pelatihan tentang konseling dan treatment adiksi, diikuti oleh 46 orang dari 36 Lapas/Rutan.
5. ToT tentang manajemen kasus (MK) diikuti oleh 10 orang petugas yang kemudian berhasil melatih 20 orang petugas lainnya berasal dari 20 Lapas/Rutan.
6. ToT tentang *integrated management for adult and adolescence illness (*IMAI) diikuti oleh 10 orang dokter dan 7 orang perawat, kemudian berhasil melatih 79 dokter dan perawat berasal dari 74 Lapas/Rutan.
   - 6.1. Pelatihan tentang pengobatan ARV dan profilaksis pasca pajanan bagi ODHA, diikuti oleh 36 orang dari 27 Lapas/Rutan.
   - 6.2. Pelatihan tentang Program Pencegahan dan Pengobatan TBC, diikuti oleh 130 orang Petugas Kesehatan dari 65 Lapas/Rutan di 14 Provinsi.
   - 6.3. Pelatihan tentang terapi dan rehabilitasi ketergantungan Napza, diikuti oleh 98 orang dari 67 Lapas/Rutan.
   - 6.4. Pelatihan tentang PTRM, diikuti oleh 21 orang tenaga medis, dan 21 orang paramedis.

IV. Kegiatan layanan program bagi WBP dan tahanan:

1. Membangun dan/atau memfungsikan 16 Lapas sebagai Lapas Khusus Narkotika di 12 provinsi (DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, Bali, Lampung, Sumut, Sumsel, Kalsel, Sulsel, dan Papua) 9 diantaranya adalah Lapas Khusus Narkotika yang berhasil dibangun (Cipinang-Jakarta, Gintung Cirebon, Yogyakarta, Nusakambangan, Wayhui-Bandar Lampung, Sungguminasa-Sulsel, Muara Beliti-Sumsel, Tanjung-Kalsel, Jayapura-Papua). Hal ini dimaksudkan agar narapidana Narkotika dapat dipusatkan dan memiliki akses layanan pembinaan hukum, terapi dan rehabilitasi, dan layanan sosial pemasyarakatan.
2. Penetapan 95 UPT Pemasyarakatan di 14 provinsi sebagai prioritas nasional program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan.

3. Hingga akhir tahun 2008, membuka satelit layanan terapi rumatan metadon bagi WBP dan tahanan di **4 Lapas/Rutan**[6] di Indonesia.
4. Pasokan alat dan bahan berupa peralatan laboratorium sederhana bagi 50 UPT Pemasyarakatan atas dukungan GF-ATM melalui Kemkes R.I.
5. Jumlah Lapas/Rutan yang sudah menjalankan program, dikelompokkan sebagai berikut:

   5.1. Lima puluh tiga (53) Lapas/Rutan melaksanakan layanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang HIV-AIDS, penegakan dan pembinaan hukum, terapi dan rehabilitasi, pelayanan sosial pemasyarakatan.

      a. 2,482 orang WBP dan tahanan telah mendapatkan layanan terapi melalui Program Criminon.

      b. Sedikitnya 18 ribu WBP dan tahanan telah mengikuti penyuluhan tentang HIV-AIDS.

   5.2. Empat belas (14) dari 50 Lapas/Rutan (sebagaimana butir 5.1. di atas) mememberikan layanan KIE, VCT, dan pengobatan ARV.

   5.3. Empat (4) dari 14 Lapas/Rutan memberikan layanan komprehensif (KIE, PTRM, VCT, TBC-HIV, CST termasuk ARV dan pengobatan infeksi oportunistik, serta menjalankan sistim perencanaan, pelaporan serta evaluasi).

      a. Sebanyak 84 WBP dan tahanan tercatat sebagai peserta aktif PTRM di 4 Lapas/Rutan.

      b. Sekitar 15% hingga 30% dari ODHA WBP dan tahanan mengikuti kegiatan skrining TBC, dan 30 WBP dan tahanan pasien TBC mengikuti test HIV melalui mekanisme VCT.

C. Kelemahan dan Hambatan:

I. UPT Pemasyarakatan memiliki keterbatasan sumberdaya di dalam pengelolaan pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Stranas 2005-2009.

II. Pelaksanaan Stranas belum dikelola dengan memerankan secara aktif semua unit kerja di dalam Lapas/Rutan.

---

[6] *Lapas Kerobokan Bali, Lapas Banceuy Bandung, Rutan Pondok Bambu Jakarta, Lapas Narkotika Jakarta*

III. Balai Pemasyarakatan (Bapas) belum memiliki peran dalam pelaksanaan Stranas 2005-2009.

IV. Pelaksanaan program didalam Stranas belum diinduksikan ke dalam sistim pemasyarakatan. Sebagian besar Lapas/Rutan menjalankannya atas dasar dukungan langsung dari sektor teknis pemerintah dan LSM.

V. Sebagian besar Lapas/Rutan belum memiliki akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan material KIE, dan material pencegahan penularan HIV serta infeksi oportunistik.

VI. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari usaha memberikan perlindungan bagi petugas Lapas/Rutan dari infeksi HIV dan penyakit oportunistik belum dapat dijalankan secara penuh. Belum tersedia akses yang memadai terhadap alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan anti tusuk dan senjata tajam.

VII. Sebagian besar Lapas/Rutan belum memiliki kerjasama yang terstruktur untuk meningkatkan sistim layanan program bagi WBP dan tahanan secara berjejaring serta berkelanjutan.

VIII. Pemindahan WBP dan tahanan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan lanjutan layanan kesehatan terkait HIV-AIDS, terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

IX. Layanan program penanggulangan HIV-AIDS di Lapas-Rutan belum mendapat dukungan secara optimal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi teknis terkait.

BAB 3

ISU STRATEGIS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memberikan penekanan pada pemenuhan hak atas pembinaan hukum, pelayanan kesehatan dan sosial kemasyarakatan bagi WBP dan tahanan.

Hingga akhir September 2009, pemenuhan hak kesehatan bagi WBP dan tahanan dinilai masih belum cukup optimal. Memperhatikan data hasil monitoring dan evaluasi serta hasil fokus group diskusi bersama Kanwil Kemkumham dan Kepala UPT Pemasyarakatan pada bulan Maret 2009, dapat dijabarkan beberapa isu strategis, sebagai berikut:

A. Program komunikasi, informasi, dan edukasi tentang HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang telah mulai dilaksanakan di beberapa UPT Pemasyarakatan belum berorientasi pada penerapan perilaku hidup sehat yang rendah risiko terhadap penularan HIV dan IO, serta penyalahgunaan narkotika.

B. Sebagian besar WBP dan tahanan belum dapat mengakses layanan program pencegahan penularan HIV, TBC, dan bahaya penyalahgunaan narkotika termasuk di dalamnya pemeriksaan dan pengobatan IMS, VCT, skrining TBC bagi ODHA, skrining HIV bagi 100% pasien TBC, PTRM, dan konseling, perawatan, serta pengobatan terhadap ketergantungan obat.

C. Tingkat kematian WBP dan tahanan akibat HIV-AIDS dan infeksi oportunistik mengalami peningkatan pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sangat dimungkinkan masih belum optimumnya penanganan kasus AIDS termasuk pemeriksaan diagnostik, layanan manajemen kasus, profilaksis pasca pajanan, ARV/IO (termasuk TBC/HIV), kelompok dukungan sebaya, dan perawatan paliatif.

D. Besarnya temuan WBP dan tahanan HIV positif pada Klinik Layanan VCT di 14 Lapas/Rutan selama 11 bulan sejak Agustus 2008 sampai dengan Juni 2009 sebanyak 496 orang HIV+ atau 25,92% dari jumlah peserta test 1,913 orang.

E. Kondom dan alat suntik sekali pakai yang merupakan alternatif terbaik untuk mencegah penularan HIV, hingga kini masih menjadi pembahasan yang pro-kontra pihak-pihak terkait di tingkat nasional, lintas Kementerian dan lintas program.

F. Sumber daya (tenaga, dana, alat dan bahan serta pasokan obat) di UPT Pemasyarakatan belum cukup selaras dengan besaran dan bobot masalah terkait HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika di UPT Pemasyarakatan yang harus ditangani.

BAB 4

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI

A. VISI

Terwujudnya sistem pembinaan dan layanan pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak kesehatan dan sosial kemasyarakatan bagi WBP dan tahanan.

B. MISI

Merujuk pada misi Ditjenpas yang dimuat pada Rencana Strategis Program Pemasyarakatan periode 2010-2014, misi program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dinyatakan sebagai berikut:

I. Memutus mata rantai penularan HIV di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

II. Memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

III. Menegakkan perlindungan hukum dan HAM dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

IV. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan WBP dan tahanan.

C. NILAI-NILAI:

I. Pemenuhan sasaran pembinaan pemasyarakatan dalam bidang kesehatan dan pola hidup sehat terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada tahun 2020.

II. Program penanggulangan HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika menjadi tanggung jawab semua unit dalam jajaran Ditjenpas dan UPT Pemasyarakatan dan di dalam kerangka sistem pemasyarakatan.

III. Pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait di semua tingkat: pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan LSM.

IV. Pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui harmonisasi kebijakan dan teknis pelaksanaan antara berbagai pihak terkait yakni Kemkumham, Kemkes, Kemsos, Kemdiknas, BNN, KPAN, Perguruan Tinggi, dan instansi terkait lainnya.

V. Program penanggulangan HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dilaksanakan bertujuan menciptakan iklim yang kondusif melalui pemberdayaan dan kesejajaran WBP dan tahanan laki-laki dan wanita untuk berperan aktif, pemutusan mata rantai penularan HIV, pemutusan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penegakan dan pembimbingan hukum, terapi dan rehabilitasi serta pelayanan sosial yang berkesinambungan.

VI. Pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika diintegrasikan ke dalam TUPOKSI semua unit di semua tingkat pada Jajaran Pemasyarakatan.

VII. Program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika merupakan upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan penyakit, penegakan dan bimbingan hukum serta layanan sosial kemasyarakatan, terapi dan rehabilitasi, serta dukungan, perawatan dan pengobatan bagi ODHA dan berpedoman pada Juklak/Juknis yang sudah ada.

VIII. Pelaksanaan kegiatan program pengendalian IMS, HIV dan AIDS menggunakan standar, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Setiap pemeriksaan untuk pendiagnosaan HIV didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (informed consent), serta menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.

BAB 5

TUJUAN, STRATEGI, DAN SASARAN

A. Tujuan Umum:

Meningkatnya kualitas hidup WBP dan tahanan dengan indikasi menurunnya tingkat kematian dan kesakitan akibat AIDS dan infeksi oportunistik, serta penyalahgunaan narkotika melalui penerapan pola hidup sehat yang rendah risiko dari penularan HIV dan infeksi oportunistik, serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

B. Tujuan Khusus:

I. Meningkatnya pengelolaan program pada jajaran Pemasyarakatan pada tingkat pusat sampai tingkat daerah, melalui penyediaan anggaran pemerintah dan sarana serta prasarana pendukung, kuantitas dan kualitas petugas.

II. Meningkatnya kualitas penegakan dan bimbingan hukum, rehabilitasi dan pelayanan sosial, kegiatan pencegahan penularan HIV, perawatan dukungan dan pengobatan bagi WBP dan tahanan.

III. Pengembangan dan penguatan jejaring kerja dengan semua pemangku kepentingan dalam usaha memutus mata rantai penularan HIV dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan.

IV. Terciptanya iklim kondusif dalam pelaksanaan program di lingkungan UPT Pemasyarakatan sebagai bagian strategis untuk meningkatkan partisipasi WBP dan tahanan dalam usaha pencegahan penularan HIV, penanganan pasien HIV-AIDS dan infeksi oportunistik, penegakan dan bimbingan hukum, terapi dan rehabilitasi serta pelayanan sosial.

V. Menurunnya tingkat kesakitan dan kematian WBP dan tahanan.

VI. Meningkatnya perilaku WBP dan tahanan untuk mengakses layanan program penanggulangan HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang disediakan oleh UPT Pemasyarakatan.

C. Strategi:

I. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama:

1. Antar direktorat di Ditjenpas, antar divisi di Kanwil Kemkumham, antar UPT Pemasyarakatan, dan antar bagian dalam UPT Pemasyarakatan.
2. Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Unit Utama di Kementerian Hukum dan HAM
3. Antara jajaran Pemasyarakatan di semua tingkat dengan berbagai pihak terkait lainnya termasuk media.

II. Manajemen Program dan Sumberdaya:

1. Peningkatan fungsi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat dan Daerah dalam mendukung pelayanan program penanggulangan HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan Narkotika secara bermutu.
2. Memperkuat sistem perencanaan program, manajemen sumberdaya, monitoring serta evaluasi program.
3. Meningkatkan partisipasi WBP dan tahanan dalam pelaksanaan program.
4. Memperkuat kuantitas dan kualitas petugas kesehatan, sarana dan prasarana, serta anggaran pemerintah.

III. Menyediakan layanan program yang bermutu:

1. Meningkatkan bimbingan hukum, penanganan, dan penindakan bagi penyalahguna pengedar gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kegiatan terapi dan rehabilitasi, serta pelayanan sosial yang berkesinambungan.
3. Menciptakan iklim kondusif di lingkungan UPT Pemasyarakatan.
4. Melindungi hak WBP dan tahanan atas pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan dan tanpa diskriminatif.
5. Mengembangkan sistim informasi berbasis webs sebagai sarana untuk saling tukar pengalaman dalam pelaksanaan program.

IV. Partisipasi Masyarakat dan Media:

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan media massa guna memperkuat dan memperluas layanan program yang disediakan oleh UPT Pemasyarakatan.

D. SASARAN GEOGRAFIS:

Rencana Aksi Nasional periode 2010-2014 diarahkan pada usaha memperkuat kualitas dan memperluas layanan program penanggulangan HIV-AIDS dan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan agar tingkat penularan HIV dan infeksi oportunistik, kesakitan dan kematian akibat penyalahgunaan narkotika dan HIV-AIDS pada WBP dan tahanan dapat dikendalikan.

Sembilan puluh lima Lapas/Rutan yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional pada masa Stranas 2005-2009, direvisi menggunakan kriteria sebagai berikut:

I. Sasaran Lapas/Rutan dan Bapas.

1. Seluruh Lapas/Rutan yang berpenghuni sedikitnya 200 orang dimana di dalamnya terdapat WBP dan tahanan dengan kasus Narkotika minimal 10%.
2. Mengutamakan Lapas/Rutan yang berada di 10 Provinsi yang memiliki kasus AIDS terbesar di Indonesia.
3. Balai Pemasyarakatan yang mencakup Lapas/Rutan dengan kriteria tersebut pada butir 1.1. dan 1.2. diatas.
4. Lapas/Rutan dan Bapas yang menjadi prioritas dukungan program GF-ATM

Ditjenpas menetapkan 101 hingga 139 Lapas/Rutan, dan 20- 25 Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berada di 20 - 25 Provinsi sebagai prioritas untuk pelaksanaan RAN penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika tahun 2010-2014. Pada lampiran#1 RAN ini terdapat daftar 101 Lapas/Rutan dan 20 Bapas prioritas. Lampiran#1 tersebut akan diperbaharui sebagaimana kebutuhan.

Dengan penetapan Lapas/Rutan prioritas tersebut maka 95 Lapas/Rutan prioritas yang ditetapkan pada tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal penetapan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan tahun 2010-2014 ini.

II. Sasaran Program:

1. UPT Pemasyarakatan (Lapas, Rutan dan Bapas) prioritas telah membentuk Tim AIDS dan menjalankan fungsi perencanaan, manajemen sumberdaya, mengelola pelaksanaan, menggerakkan partisipasi WBP dan tahanan, dan monitoring serta evaluasi.

2. UPT Pemasyarakatan prioritas telah memiliki kecukupan tenaga terlatih, tersedia sarana dan prasarana kesehatan (standar minimum) untuk layanan program di dalam UPT Pemasyarakatan.
3. UPT Pemasyarakatan prioritas telah menjalankan layanan bimbingan hukum, rehabilitasi dan pelayanan sosial, kegiatan pencegahan penularan HIV secara komprehensif, perawatan dukungan dan pengobatan bagi WBP dan Tahanan.
4. UPT Pemasyarakatan prioritas secara nyata mendapat dukungan politis dan teknis operasional dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota wilayah kerja masing-masing UPT Pemasyarakatan, termasuk di dalamnya melalui KPAP/K, BNP/K.
5. UPT Pemasyarakatan prioritas memiliki kemitraan tetap tentang jejaring layanan kesehatan bagi WBP dan tahanan terkait HIV-AIDS dan ketergantungan narkotika. Mitra tetap tersebut termasuk kerjasama dengan sektor kesehatan, RS pusat rujukan ARV, RS pengampu methadon, RSJ dan Ketergantungan Obat, Puskesmas dan klinik swasta penyedia layanan kesehatan terkait IMS dan HIV.
6. UPT Pemasyarakatan meningkatkan efektivitas layanan program pencegahan penularan HIV dan menurunkan risiko penularan TBC melalui penyediaan layanan program, sebagai berikut:
   6.1. Kegiatan Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang berorientasi pada penerapan pola hidup sehat WBP dan tahanan yang rendah risiko penularan HIV dan infeksi oportunistik serta penyalahgunaan narkotika.
   6.2. Material pencegahan penularan HIV, TBC, dan infeksi penyakit lainnya.
   6.3. Voluntary Conseling dan tes HIV (VCT) dan skrining TBC yang saling berkaitan sebagai langkah penanganan TBC-HIV.
   6.4. Program PMTCT khusus bagi WBP dan tahanan wanita.
   6.5. Program dukungan, perawatan, dan pengobatan ARV serta infeksi oportunistik bagi WBP dan tahanan ODHA, kelompok dukungan sebaya (sesama ODHA), dan perawatan paliatif AIDS serta IO berbasis Lapas/Rutan.
   6.6. Program penegakan/bimbingan hukum, terapi dan rehabilitasi, serta pelayanan sosial bagi WBP dan tahanan narkotika.
7. Mempercepat penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi Lapas Khusus Narkotika dan pembentukan struktur kelembagaan khusus untuk Lapas Khusus Narkotika.

E. STRUKTUR PENGELOLAAN PROGRAM:

Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan RAN 2010-2014 menetapkan tugas rinci pada jajaran Ditjenpas di semua tingkat, sebagai berikut:

I. Tingkat Pusat:

Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai penanggung jawab menetapkan Direktorat Bina Khusus Narkotika (Ditbinsustik) sebagai pusat koordinasi pengelolaan program di tingkat pusat. Tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengendalikan manajemen program tingkat nasional termasuk perencanaan program tahunan, pelatihan dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi.
2. Mengupayakan dan menggerakkan sumberdaya (dana, alat dan bahan, petugas) baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan dana kemitraan dalam dan luar negeri yang tidak mengikat.
3. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan sektor teknis pemerintah, swasta, dan LSM dalam serta luar negeri guna mengupayakan percepatan pencapaian target kualitas dan kuantitas.
4. Mengelola pelaksanaan penelitian dan pengembangan program.
5. Mengupayakan pasokan alat dan bahan kebutuhan program termasuk materi KIE, alat pelindung diri, bahan habis pakai yang tidak memungkinkan untuk diupayakan di tingkat UPT Pemasyarakatan.
6. Melaksanakan bimbingan teknis tentang manajemen dan teknis pelaksanaan program ke tingkat provinsi dan ke tingkat UPT Pemasyarakatan sesuai kebutuhan.
7. Menghimpun dan menerbitkan laporan kemajuan pelaksanaan program secara periodik.

II. Tingkat Provinsi/Wilayah:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di wilayah kerjanya. Menugaskan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemkumham setempat dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengupayakan dukungan politis dan operasional dari pemerintah provinsi dan sektor teknis terkait.
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program tahunan tingkat provinsi.
3. Melalui kerjasama dengan sektor teknis terkait, memberikan bimbingan teknis ke tingkat UPT Pemasyarakatan.
4. Memfasilitasi UPT Pemasyarakatan dalam usaha meningkatkan akses pada pasokan bahan habis pakai dan obat di wilayahnya, utamanya reagens, methadon, ARV, OAT dan IO lainnya.
5. Menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi secara teratur di wilayahnya.
6. Menghimpun dan menerbitkan laporan kemajuan program dan mendistribusikan sesuai kebutuhan.

III. Tingkat UPT Pemasyarakatan:

1. Lapas/Rutan:

   Kepala Lapas/Rutan meningkatkan koordinasi dengan Kepala Bapas di wilayahnya dalam memimpin pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika dalam kerangka sistim perlakuan pemasyarakatan yang terintegratif. Setiap Kepala Lapas/Rutan menjamin bahwa program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika menjadi bagian dari tugas-tugas pemasyarakatan. Tugas, fungsi, dan kewenangan setiap Kepala Lapas/Rutan sebagai berikut:

   1.1. Membentuk dan memfungsikan Tim AIDS dan P4GN tingkat Lapas/Rutan dengan melibatkan peran aktif Bapas.

   1.2. Membangun kerjasama dengan sektor teknis terkait guna meningkatkan jejaring layanan program bagi WBP dan tahanan.

   1.3. Melalui mekanisme yang sudah ada, menyusun program kerja tahunan berikut anggarannya.

   1.4. Mengelola pelaksanaan program dengan menggerakkan sumberdaya yang tersedia.

   1.5. Menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan program.

   1.6. Meningkatkan peran aktif WBP dan tahanan untuk membantu pelaksanaan program misalnya pemuka, tamping, dan pendamping/pendidik/pendukung sebaya.

1.7. Menjalankan sistim pencatatan hasil pelaksanaan program dan menyampaikan laporan bulanan ke Kanwil Kemkumham dan Ditjenpas.

1.8. Menjalankan kegiatan evaluasi pelaksanaan program secara berkala.

2. Balai Pemasyarakatan:

Kepala Balai Pemasyarakatan meningkatkan koordinasi dengan Kepala Lapas/Rutan dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan, dalam kerangka sistim perlakuan pemasyarakatan yang terintegratif. Tugas, fungsi, dan kewenangan setiap Kepala Bapas sebagai berikut:

2.1. Membentuk dan memfungsikan Satuan Tugas sebagai pelaksana program penanggulangan HIV-AIDS dan

BAB 6

PROGRAM DAN LINGKUP KEGIATANNYA

A. PROGRAM

Ditjenpas merumuskan tiga program pokok di dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika periode 2010-2014 sebagai respon penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, situasi HIV-AIDS yang memerlukan penanganan, perawatan, dan pengobatan. Tiga program pokok tersebut sebagai berikut:

I. Bimbingan dan penegakan hukum, pelayanan sosial, serta terapi dan rehabilitasi berkesinambungan;

II. Pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV-AIDS;

III. Penelitian dan Pengembangan.

B. LINGKUP KEGIATAN PROGRAM

I. Bimbingan dan Penegakan Hukum, Pelayanan Sosial, serta Terapi dan Rehabilitasi Berkesinambungan:

Program ini dilaksanakan di semua Lapas, Rutan, dan Bapas prioritas Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika tahun 2010-2014. Program ditujukan bagi semua WBP dan tahanan, dan diutamakan bagi mereka yang bermasalah hukum terkait narkotika, diuraikan dalam 3 lingkup sub kegiatan sebagai berikut:

1. Bimbingan dan Penegakan Hukum

Jajaran Ditjenpas di semua tingkat mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan penegakan hukum di UPT Pemasyarakatan dengan melibatkan peran aktif BNN/BNP/BNK, dan Kepolisian.

Ditjenpas di tingkat nasional bersama BNN menjalankan kegiatan penggeledahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan UPT Pemasyarakatan. Hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk advokasi ke pemangku kebijakan di semua tingkat untuk perbaikan kinerja UPT Pemasyarakatan.

1.1. Tujuan:

Menurunnya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta bentuk gangguan keamanan lainnya sebagai usaha untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan sosial di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

1.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. Kegiatan bimbingan dan penegakan hukum di lingkungan Ditjenpas dikoordinasikan oleh Ditbinsustik dan Ditbinkamtib; di tingkat wilayah dikoordinasikan oleh Kadivpas; sedangkan di tingkat UPT dikoordinasikan oleh Ka. UPT masing-masing. Kegiatan-kegiatan ini dapat juga dilaksanakan dengan melibatkan BNN, BNP, dan BNK.

b. Setiap UPT Pemasyarakatan menjalankan kegiatan bimbingan dan penegakan hukum sedikitnya satu kali setiap bulan dan menargetkan semua WBP dan tahanan mendapat layanan penyuluhan dan bimbingan hukum.

c. Pelaksanaan bimbingan dan penegakan hukum di UPT Pemasyarakatan berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

1.3. Sasaran

a. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan.

b. Meningkatnya partisipasi aktif WBP dan tahanan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

c. Meningkatnya kesadaran WBP dan tahanan dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di UPT Pemasyarakatan;

d. Seluruh WBP dan tahanan mendapat layanan bimbingan dan penegakan hukum di UPT Pemasyarakatan pada setiap tahunnya.

1.4. Kegiatan Pokok

a. Revisi dan implementasi pedoman teknis tentang pelaksanaan Satgas P4GN UPT Pemasyarakatan yang telah diterbitkan tahun 2009;

b. Pembentukan Satgas P4GN di tiap UPT Pemasyarakatan untuk kemudian mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan penegakan hukum di wilayah kerja masing-masing;

c. Inspeksi mendadak (sidak) untuk penggeledahan, bimbingan dan penegakan hukum, dilaksanakan oleh setiap tingkatan di lingkungan Ditjenpas:

- Ditjenpas bersama mitra kerja nasional melaksanakan sidak dan penggeledahan serta advokasi ke sedikitnya 12 Lapas/Rutan di Indonesia pada setiap tahun;
- Kanwil Kemkumham dan Lapas/Rutan bersama mitra kerja wilayah melakukan penggeledahan barang-barang ilegal milik WBP dan tahanan, dilaksanakan setiap bulan di setiap Lapas/Rutan di masing-masing wilayah.

d. UPT Pemasyarakatan melaksanakan bimbingan hukum bagi seluruh WBP dan tahanan melalui layanan konsultasi kelompok dan perorangan, dilaksanakan secara terjadual satu kali tiap bulan;

e. UPT Pemasyarakatan melakukan penindakan hukum bagi WBP dan tahanan yang didapati menyalahgunakan hak-haknya dan melanggar norma pemasyarakatan;

f. UPT Pemasyarakatan mencatat partisipasi aktif WBP dalam mendorong tegaknya hukum yang dapat digunakan sebagai penilaian untuk pemberian Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Cuti Bersyarat.

1.5. Keluaran

a. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan hingga 60% pada akhir tahun 2014;

b. Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan di (sedikitnya) 60% dari Lapas/Rutan prioritas pada akhir tahun 2014;

2. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan proses pemulihan masalah sosial dan sebagai bagian dari usaha pemenuhan hak-hak WBP dan tahanan. UPT Pemasyarakatan menyediakan beberapa pilihan pelayanan sosial, yaitu pembinaan norma sosial dan kekeluargaan, pendidikan sosial lintas budaya (*cross-cultural*), pembinaan sosial kemasyarakatan melalui konseling kelompok dan perorangan dimulai dari masa pengenalan lingkungan (mapenaling), dan pembinaan keterampilan usaha. Dalam menjalankan pelayanan sosial, UPT

Pemasyarakatan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Dinas Sosial, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lain sesuai kebutuhan.

Layanan KIE untuk penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika diintegrasikan ke dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan Program Pelayanan Sosial tersebut di atas.

2.1. Tujuan

Terpenuhinya kebutuhan layanan pemulihan dan kemandirian sosial WBP dan tahanan.

2.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. Kegiatan pelayanan sosial ditujukan bagi seluruh WBP dan tahanan;

b. Kegiatan pelayanan sosial di UPT Pemasyarakatan dikoordinasikan oleh Seksi Binadik dan Giatja di Lapas, Yantah di Rutan, serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas;

c. UPT Pemasyarakatan mengupayakan dukungan politis dan teknis operasional dari sektor terkait di wilayah kerja masing-masing;

d. Pelaksanaan kegiatan layanan sosial berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

e. Diperlukan adanya pedoman pelayanan sosial bagi WBP dan tahanan kasus Narkotika.

2.3. Sasaran

a. Terpenuhinya pembinaan kehidupan sosial di kalangan WBP dan tahanan yang berbasis pada agama, budaya, dan norma-norma pemasyarakatan;

b. Meningkatnya kepedulian sosial serta terpeliharanya penerapan pola hidup sehat di kalangan WBP dan tahanan;

c. Terpenuhinya pembinaan keterampilan usaha bagi WBP dan tahanan sesuai minat dan bakatnya masing-masing;

d. Seluruh WBP dan tahanan mengikuti kegiatan layanan sosial pemasyarakatan pada setiap tahunnya.

2.4. Kegiatan Pokok

a. Penerbitan dan implementasi pedoman teknis pelayanan sosial di UPT Pemasyarakatan pada tahun 2010;

b. Melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan yang berbasis pada norma-norma pemasyarakatan;

c. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi WBP dan tahanan baru serta melanjutkan pada layanan VCT atau skrining TBC sesuai kebutuhan.

d. Bekerjasama dengan sektor terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan kepribadian yang terdiri dari kerohanian, olah raga, kesenian, dan pendikan;
- Pembinaan kemandirian yang terdiri dari latihan kerja dan ketrampilan;
- Pembinaan lanjutan melalui bimbingan kerja, penyuluhan, dan konseling baik individual maupun kelompok;

e. Memberikan layanan konseling perorangan bagi WBP dan tahanan yang berada pada masa menjelang bebas;

f. Memberikan pendampingan bagi klien pemasyarakatan untuk:

- Layanan lanjutan kesehatan sesuai kebutuhan.
- Adaptasi norma dan sosial di masyarakat umum.

2.5. Keluaran

a. 100% WBP dan tahanan mendapatkan akses layanan sosial pada akhir tahun 2014;

b. 100% WBP dan tahanan mendapatkan layanan pembinaan kehidupan sosial yang berbasis pada agama, budaya, dan norma-norma pemasyarakatan pada akhir tahun 2014;

c. 80% WBP dan tahanan mendapatkan layanan kesehatan dasar pada akhir tahun 2014.

d. 60% WBP dan tahanan mendapatkan akses pembinaan keterampilan usaha pada akhir tahun 2014;

e. Layanan KIE tentang penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika telah diintegrasikan ke dalam setiap tahapan kegiatan layanan sosial.

f. 100% klien pemasyarakatan mendapatkan pendampingan mengakses layanan sosial dan kesehatan di luar Lapas/ Rutan.

3. Terapi dan Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika

Terapi ketergantungan Narkotika dilakukan dengan menyediakan berbagai jenis pilihan agar mendukung proses pemulihan melalui berbagai ketrampilan yang diperlukan dan mencegah kekambuhan (*relapse*). UPT Pemasyarakatan akan memberikan layanan terapi dan rehabilitasi sosial antara lain terapi psiko-sosial, adiksi/ ketergantungan narkotika. Terapi dan rehabilitasi medik akan dikerjasamakan dengan pusat layanan kesehatan setempat melalui sistim rujukan.

Terapi ketergantungan narkotika akan berbasis pada hasil identifikasi tentang siapa, apa, dan bagaimana menggunakan narkotika, bagaimana kondisi sosial dan alternatif apa saja yang dapat ditawarkan secara realistis pada kondisi sosial tersebut.

3.1. Terapi psiko-sosial, adiksi/ketergantungan narkotika di Lapas/Rutan dikembangkan sebagai berikut:

a. Detoksifikasi dan Terapi Putus Zat (*Withdrawal*)

Detoksifikasi (detoks) merupakan bentuk terapi awal untuk mengatasi gejala-gejala putus zat, yang terjadi sebagai akibat penghentian penggunaan Narkotika. Detoks merupakan langkah pertama menuju program terapi jangka panjang melalui rehabilitasi dan PTRM. Layanan detoks akan dilakukan dengan sistim rujukan sesuai kebutuhan.

b. Terapi terhadap Kondisi Darurat (*Emergency*)

Pertolongan profesional (medis) secara darurat untuk pasien over dosis akan diberikan dengan sistim rujukan.

c. Terapi Gangguan Diagnosis Ganda

Terapi yang terintegrasi dengan terapi ketergantungan Narkotika guna membantu pasien yang secara bersamaan menderita gangguan jiwa. UPT Pemasyarakatan akan merujuk pasien ke RSJ dan Ketergantungan Obat terdekat.

d. Terapi Residensial / Terapi Rawat Huni

Model yang digunakan dalam terapi residensial di UPT Pemasyarakatan adalah *Therapeutic Community* bagi

mereka yang berulang-ulang gagal dalam terapi awal (detoks) dan terapi rawat jalan.

e. Terapi Rawat Jalan, Terapi Pencegahan Relaps, dan Terapi Pasca Perawatan

Merupakan layanan pendidikan kesehatan, konseling, psikoterapi, evaluasi psikologi dan evaluasi sosial, dan program kelompok dukungan sebaya akan dilakukan di lingkungan oleh petugas UPT Pemasyarakatan. Layanan medik akan diberikan melalui sistim rujukan ke RSJ dan Ketergantungan Obat atau RSUD setempat, sesuai kebutuhan.

f. Program Terapi Rumatan Metadon

Metadon adalah sintetik heroin yang digunakan sebagai substitusi konsumsi opiat ilegal. Berbentuk cairan sehingga dikonsumsi secara oral, dengan dosis dan ketersediaan yang diawasi secara medis serta harga yang sangat terjangkau. Terapi ini digunakan memutus penularan virus melalui penggunaan alat suntik, tingkat kejahatan terkait peredaran opiat, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Hingga akhir tahun 2014, 17 Lapas/Rutan akan diusulkan sebagai klinik satelite untuk menjalankan layanan terapi rumatan methadon.

3.2. Tujuan

Terapi dan Rehabilitasi (T&R) bertujuan untuk membantu WBP dan tahanan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika, dan sebagai bagian dari:

a. Menciptakan suasana aman dari kerawanan tindak kriminalitas dan kekerasan antar WBP dan tahanan;

b. Mengendalikan penularan HIV dan penyakit menular lainnya terkait penyalahgunaan narkotika.

3.3. Kebijakan Pelaksanaan

a. Setiap UPT Pemasyarakatan mengupayakan pelaksanaan tahapan-tahapan T&R sebagaimana ketersediaan sumber daya internal jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemerintah setempat, serta mitra kerja dalam dan luar negeri;

b. Membangun kerjasama dengan sektor terkait (RS, RSJ, dan RS Ketergantungan Obat) untuk pelaksanaan T&R di UPT Pemasyarakatan;

c. Diperlukan adanya pedoman khusus pelaksanaan berbagai T&R ketergantungan narkotika di UPT Pemasyarakatan;

d. Pelaksanaan layanan T&R di UPT Pemasyarakatan berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3.4. Sasaran

a. UPT Pemasyarakatan dimana terdapat WBP dan tahanan dengan kasus narkotika dan memiliki akses ke RS,RSJ, dan RS Ketergantungan Obat;

b. UPT Pemasyarakatan yang menjalankan layanan T&R didukung oleh tenaga medis dan perawat terlatih;

c. Sedikitnya 50% dari Lapas, Rutan, dan Bapas prioritas memberikan akses layanan terapi dan rehabilitasi sosial bagi seluruh WBP dan tahanan narkotika pada akhir tahun 2014.

d. Setidaknya seluruh Lapas Khusus Narkotika prioritas memberikan akses layanan rujukan terapi dan rehabilitasi medik bagi WBP dan tahanan sesuai kebutuhan.

3.5. Kegiatan Pokok

a. Advokasi dan membangun kerjasama guna memperkuat kualitas dan kuantitas layanan T&R di semua tingkat;

b. Memperkuat kapasitas teknis petugas UPT Pemasyarakatan untuk pelaksanaan layanan T&R psiko-sosial dan ketergantungan/adiksi Narkotika;

c. Memperkuat sarana dan prasarana pendukung layanan T&R;

d. Setiap UPT Pemasyarakatan prioritas memiliki jejaring layanan T&R dengan RSJ/KO atau RS masing-masing wilayah.

e. Pengumpulan data dasar WBP dan tahanan kasus narkotika oleh masing-masing UPT Pemasyarakatan untuk dasar penyusunan program kerja;

f. Pengelolaan program di masing-masing UPT Pemasyarakatan, yang meliputi:

- Penyusunan program kerja tahunan;
- Mengorganisasikan pelaksanaan layanan T&R di lingkungan UPT Pemasyarakatan termasuk rujukan;
- Meningkatkan partisipasi aktif WBP dan tahanan dalam pelaksanaan layanan T&R;
- Pencatatan hasil pelaksanaan dan pelaporan;
- Supervisi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi.

3.6. Keluaran

a. 60% dari Lapas/Rutan prioritas menyediakan layanan T&R sosial pada akhir tahun 2014;

b. 60% dari Lapas/Rutan prioritas memiliki kerjasama dengan sektor terkait dalam layanan T&R pada akhir tahun 2014;

c. Sedikitnya 20% WBP dan tahanan Narkotika telah mendapatkan layanan T&R sosial dan rujukan layanan T&R medik sesuai kebutuhan pada akhir tahun 2014;

d. 17 UPT Pemasyarakatan membuka layanan PTRM dan 5% WBP dan tahanan narkotika suntik menjadi peserta aktif PTRM pada akhir 2014;

II. Pencegahan, Pengobatan, dan Perawatan HIV-AIDS

Pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV-AIDS terdiri atas beberapa sub kegiatan, yakni:

1. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV-AIDS dan infeksi oportunistik;
2. Layanan klinis pengendalian penularan melalui kegiatan konseling dan tes HIV (VCT/PICT), skrining tuberculosis (TBC), dan IMS;
3. Membuka akses bagi WBP, tahanan, dan petugas pemasyarakatan terhadap materi pencegahan penularan HIV dan infeksi oportunistik dengan menyediakan alat pelindung diri dan layanan profilaksis paska pajanan;
4. Dukungan, perawatan, dan pengobatan HIV-AIDS serta infeksi oportunistik;

Kegiatan pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV-AIDS serta infeksi oportunistik ditujukan bagi WBP, tahanan, dan petugas pemasyarakatan di UPT prioritas RAN 2010-2014 sebagai berikut:

1. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Pencegahan, Pengobatan, dan Perawatan HIV-AIDS dan Infeksi Oportunistik:

KIE adalah media dan pendekatan pelaksanaan layanan pendidikan dan informasi bagi WBP dan tahanan terkait dengan usaha pencegahan penularan HIV dan infeksi oportunistik, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam UPT Pemasyarakatan. KIE harus diintegrasikan ke dalam Pola Pembinaan Pemasyarakatan agar dapat memenuhi hak-hak yang dimaksud dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1.1. Tujuan:

Terjadinya penerapan pola hidup sehat di kalangan WBP dan tahanan agar memiliki risiko yang rendah terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penularan HIV dan infeksi TBC dan infeksi oportunistik lainnya.

1.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas mengintegrasikan kegiatan KIE ke dalam sistem pembinaan dan pendidikan pemasyarakatan;

b. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas memberikan tanggung jawab setara kepada semua seksi dalam menjalan kegiatan KIE;

c. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas memastikan bahwa kegiatan KIE dimasukkan dalam sistem perencanaan, penggerakan sumberdaya, pembimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi;

d. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE mereferensikan pada pedoman teknis pelaksanaan KIE yang ditetapkan oleh Ditjenpas;

e. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas bermitra dengan instansi teknis terkait (termasuk LSM) dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan KIE;

f. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas memastikan tentang kecukupan ketersediaan material KIE yang diperlukan untuk alat bantu/peraga pelaksanaan KIE;

g. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas mengembangkan pembinaan bagi pendidik sebaya dari WBP dan tahanan untuk membantu penyampaian pesan dan nasihat kepada sesama;

h. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas menciptakan suasana kondusif dalam menjalankan layanan;

i. Pelaksanaan layanan KIE berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

1.3. Sasaran

a. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas telah menjalankan kegiatan KIE yang terintegrasi di dalam sistem pembinaan dan pendidikan pemasyarakatan;

b. Terjangkaunya seluruh WBP dan tahanan di semua UPT Pemasyarakatan prioritas dengan paket lengkap KIE[7].

c. Meningkatnya jumlah dan keahlian pendidik sebaya dari kalangan WBP dan tahanan dalam menyampaikan pesan dan nasihat.

d. Semua UPT Pemasyarakatan prioritas menyediakan akses alat bantu KIE seperti brosur, leaflet, selebaran, poster, dll.

1.4. Kegiatan Pokok

a. Tatalaksana KIE HIV, IO, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika diintegrasikan ke dalam sistem dan pola pembinaan pemasyarakatan;

b. Penguatan kapasitas teknis petugas UPT Pemasyarakatan;

c. Pengorganisasian dan mobilisasi sumberdaya untuk pelaksanaan KIE di masing-masing UPT Pemasyarakatan;

d. Peningkatan partisipasi WBP dan tahanan melalui pendekatan pendidik sebaya atau model yang sudah berjalan dan dinilai efektif;

e. Pasokan alat dan bahan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan KIE;

f. Bimbingan teknis bagi UPT Pemasyarakatan oleh Kanwil Kemkumham dan Ditjenpas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dengan sektor terkait baik pemerintah maupun LSM, serta media massa di masing-masing wilayah UPT Pemasyarakatan.

---

[7] *Paket lengkap KIE terdiri atas informasi dasar HIV, perilaku aman pencegahan penularan HIV dan infeksi oportunistik, respon individu tentang mencegah penularan HIV dan infeksi oportunistik serta pemakaian narkoba, perilaku aktif pemeriksaan (dan pengobatan) kesehatan, perilaku dan tanggung jawab individu dalam menciptakan suasana kondusif di UPT Pemasyarakatan*

1.5. Keluaran

a. 100% WBP dan tahanan mendapatkan layanan KIE;

b. Tersedianya jumlah alat bantu KIE yang didistribusikan dan dibahas dengan WBP dan tahanan di seluruh UPT Pemasyarakatan prioritas;

c. Meningkatnya pola hidup sehat untuk mencegah HIV, IO, dan bahaya penyalahgunaan narkotika di sedikitnya 80% dari seluruh WBP dan tahanan yang mendapat layanan KIE.

2. Layanan klinis pengendalian penularan melalui kegiatan konseling dan tes HIV (VCT/PICT), skrining TBC, dan pemeriksaan serta pengobatan IMS.

Kegiatan ini merupakan bagian dari usaha mengendalikan penularan HIV, IMS, dan TBC pada kalangan WBP/tahanan dan membantu setiap individu yang memerlukan bantuan untuk mengetahui status kesehatannya terkait infeksi HIV, TBC, dan IMS agar sesegera mungkin mendapatkan perawatan, dukungan, dan pengobatan.

2.1. Tujuan

Memperkuat usaha memutus mata rantai penularan HIV, TBC, dan IMS di UPT Pemasyarakatan, serta menurunkan tingkat kesakitan dan kematian WBP dan tahanan.

2.2. Kebijakan Pelaksanaan

a Setiap UPT Pemasyarakatan prioritas membuka layanan konseling dan tes HIV, TBC, dan IMS melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, RS, laboratorium, dan Puskesmas;

b Layanan konseling pra dan paska tes dilaksanakan oleh petugas UPT Pemasyarakatan terlatih yang bekerja sama dengan petugas lain untuk bimbingan layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan yang dibutuhkan;

c Layanan konseling dan tes HIV, TBC, dan IMS diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan yang ada di UPT Pemasyarakatan;

d Pelaksanaan layanan mengacu pada pedoman yang berlaku dan berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran

a. Meningkatnya akses layanan konseling dan tes HIV, TBC, dan IMS bagi WBP dan tahanan di UPT Pemasyarakatan prioritas;

b. Meningkatnya kualitas layanan konseling dan tes HIV, TBC, dan IMS di UPT Pemasyarakatan prioritas;

c. Terintegrasinya layanan konseling dan tes HIV, TBC, dan IMS ke dalam layanan kesehatan yang ada di UPT Pemasyarakatan.

2.4. Kegiatan Pokok

a. Membangun dan memperkuat kerjasama dengan Dinas Kesehatan, RS, dan Puskesmas setempat untuk ketersediaan layanan konseling dan tes HIV, TBC, dan IMS;

b. Setiap UPT Pemasyarakatan memastikan tentang ketersediaan petugas terlatih untuk melaksanakan layanan minimum:

- Satu orang tenaga terlatih konseling;
- Satu orang tenaga terlatih untuk dukungan, perawatan, dan pengobatan HIV-AIDS lanjutan.

c. Mempromosikan layanan kepada WBP dan tahanan;

d. Menjamin adanya kendali mutu layanan yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama mitrakerja terkait.

2.5. Keluaran

a. Sedikitnya 35% UPT Pemasyarakatan prioritas telah memberikan layanan konseling dan tes HIV, TBC, dan IMS di akhir tahun 2014;

b. 50% WBP dan tahanan yang beresiko di seluruh UPT Pemasyarakatan prioritas yang mengakses layanan tes HIV;

c. 80% WBP dan tahanan suspek TBC di seluruh UPT Pemasyarakatan prioritas yang mengakses layanan tes TBC;

d. 20% WBP dan tahanan yang beresiko di seluruh UPT Pemasyarakatan prioritas yang mengakses layanan tes IMS;

3. Akses bagi WBP, Tahanan, dan Petugas Pemasyarakatan pada Material Pencegahan Penularan HIV dan Infeksi Oportunistik:

Upaya-upaya pencegahan penularan HIV, IMS, TBC dan infeksi oportunistik lainnya di UPT Pemasyarakatan merupakan kebutuhan layanan yang mendesak. Mengingat besarnya masalah dan perilaku berisiko WBP dan tahanan terhadap penularan HIV, IMS, TBC dan infeksi oportunistik lainnya serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Material pencegahan penularan HIV disesuaikan dengan cara dan resiko penularan masing-masing infeksinya.

Contoh-contoh material pencegahan penularan HIV adalah penyediaan kondom, peralatan suntik steril, cairan disinfektan, sarung tangan, layanan profilaksis paska pajanan bagi orang yang berisiko tertular HIV termasuk petugas pemasyarakatan terkait.

Material pencegahan penularan IO terutama tuberkulosis diperlukan dengan peningkatan penyehatan lingkungan UPT Pemasyarakatan seperti pencahayaan alami, menyediakan ruang untuk menempatkan sementara pasien TBC dengan BTA positif, penyediaan masker, air bersih, dan sanitasi. Menjaga tingkat hunian sebagaimana kapasitasnya serta menerapkan pola hidup sehat di UPT Pemasyarakatan merupakan prinsip dasar yang harus dikembangkan.

3.1. Tujuan

Tersedianya material pencegahan penularan HIV dan IO di lingkungan UPT Pemasyarakatan prioritas yang dapat diakses oleh WBP dan tahanan.

3.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. Jajaran Pemasyarakatan di semua tingkat membangun kerjasama dengan sektor terkait guna memaksimalkan sarana pencegahan HIVdan IO serta penyehatan lingkungan;

a. Diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan tentang pengelolaan material pencegahan penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan;

b. Pelaksanaan penyediaan material pencegahan penularan HIV dan infeksi oportunistik berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3.3. Sasaran

a. Setiap UPT Pemasyarakatan prioritas menggunakan mekanisme penyediaan akses material pencegahan

penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan yang diberlakukan Ditjenpas;

b. Setiap UPT Pemasyarakatan prioritas menyampaikan informasi kepada WBP dan tahanan tentang ketersediaan material pencegahan penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan;

c. Kepala UPT Pemasyarakatan prioritas bertanggung jawab atas kelangsungan penyediaan material pencegahan penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan.

3.4. Kegiatan Pokok

a. Menginventarisir kebutuhan dan mekanisme yang tepat dalam penyediaan material pencegahan penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan bagi WBP dan tahanan;

b. Menyusun pedoman teknis penyediaan material pencegahan penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan;

c. Sosialisasi di lingkungan UPT Pemasyarakatan tentang ketersediaan material pencegahan penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan;

d. Advokasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat dan sektor/lembaga terkait lainnya;

e. Supervisi, pembimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan material pencegahan infeksi dan penyehatan lingkungan.

3.5. Keluaran:

a. 40% dari UPT Pemasyarakatan prioritas menyediakan akses material pencegahan penularan HIV dan IO serta penyehatan lingkungan di akhir tahun 2014;

b. Terpenuhinya material pencegahan infeksi dan penyehatan lingkungan sebesar di 40% UPT Pemasyarakatan prioritas di akhir tahun 2014;

c. Adanya penurunan penularan HIV dan IO secara bertahap di UPT Pemasyarakatan.

4. Dukungan, Perawatan, dan Pengobatan HIV-AIDS serta Infeksi Oportunistik

Dukungan, perawatan, dan pengobatan merupakan rangkaian kegiatan yang saling mendukung, secara umum bertujuan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Perawatan adalah upaya meningkatkan/mempertahankan kesehatan ODHA agar memperkecil risiko penularan penyakit tertentu, dapat dilakukan sendiri oleh ODHA dan/atau atas bantuan keluarga/kelompok dukungan sebaya/petugas kesehatan. Dukungan merupakan usaha untuk membantu ODHA memperkuat/mempertahankan kepercayaan diri, nilai dan tanggung jawab sosial, biasanya dilakukan atas bantuan konselor/keluarga/kelompok dukungan sebaya/petugas kesehatan. Pengobatan dilaksanakan oleh petugas medis/kesehatan sebagaimana hasil tes diagnostik agar membantu ODHA memulihkan/mempertahankan kesehatannya.

HIV-AIDS bukanlah penyakit yang secara langsung menyebabkan kematian. Ketika kekebalan tubuh mulai menurun, sebelum pengobatan ARV atau kegagalan pengobatan ARV, timbul episode akut berupa infeksi oportunistik. Dalam fase kronis atau akut, dapat timbul gejala-gejala dan keluhan fisik penyakit oportunistik. Keterlambatan pertolongan/pengobatan ARV atau kegagalan pengobatan ARV (lebih karena kepatuhan atau karena resistensi obat) akan menyebabkan ODHA meninggal.

Jenis perawatan dan pengobatan yang perlu disediakan bagi ODHA adalah perawatan kronis[8], perawatan akut[9], dan perawatan paliatif[10].

4.1. Tujuan

Meningkatnya kualitas hidup WBP dan tahanan ODHA di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

4.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. UPT Pemasyarakatan prioritas menyediakan layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV-AIDS dan IO bagi WBP dan tahanan ODHA, termasuk perawatan kronis dan akut melalui layanan rujukan.

---

[8] *Perawatan kronis: pengobatan dengan ARV, dukungan adherence (kepatuhan minum) ARV, pencegahan beberapa penyakit infeksi, manajemen klinis masalah kronis (diare, vegetasi jamur, demam yang konsisten, penurunan berat badan), dan pencegahan penularan HIV.*

[9] *Perawatan akut: diagnosis, pengobatan dan pencegahan berbagai macam penyakit infeksi oportunistik dan berbagai penyakit terkait HIV (radang paru, TBC, infeksi saluran pencernaan, infeksi otak, kemunduran fungsi otak, dan infeksi menular seksual (IMS)).*

[10] *Perawatan paliatif: perawatan dan pengobatan gejala serta keluhan yang timbul pada fase akut, kronis, dan menjelang ajal. Perawatan dan pengobatan berupa mengatasi nyeri, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, gangguan buang air, gangguan psikologis, gangguan tidur, masalah kulit, luka akibat terlalu lama berbaring, demam, batuk dan lain-lain.*

b. UPT Pemasyarakatan nasional membangun jejaring layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan HIV-AIDS dan IO dengan Dinas Kesehatan, RS, puskesmas, dan LSM, serta membentuk dan memfungsikan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS);

c. Pelaksanaan layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan bagi ODHA berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4.3. Sasaran

a. 100% UPT Pemasyarakatan prioritas menyediakan layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan bagi WBP dan tahanan terinfeksi HIV di akhir 2014;

b. 100% dari jumlah WBP dan tahanan terinfeksi HIV dapat mengakses layanan dukungan, perawatan, dan pengobatan HIV-AIDS dan IO;

c. Meningkatnya UPT Pemasyarakatan prioritas yang memiliki KDS;

4.4. Kegiatan pokok

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV-AIDS dan IO yang berkesinambungan di UPT Pemasyarakatan;

b. Meningkatkan kapasitas teknis dan pengelolaan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS dan IO yang berkesinambungan bagi petugas UPT Pemasyarakatan;

c. Membangun kerjasama dengan Dinas Kesehatan, RS Pusat Rujukan ARV, dan puskesmas di masing-masing wilayah UPT Pemasyarakatan;

d. Membuat pedoman perawatan paliatif berbasis Lapas/ Rutan;

e. Membentuk kelompok dukungan sebaya, memberikan pelatihan dan pendampingan teknis pelaksanaan perawatan dan pendampingan bagi sesama ODHA;

f. Menjamin adanya kendali mutu layanan yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama mitra terkait melalui kegiatan supervisi, bimbingan teknis, dan monitoring serta evaluasi.

4.5. Keluaran

a. 40% WBP dan tahanan yang terinfeksi HIV mendapat layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV-AIDS dan IO di akhir tahun 2014;

b. Menurunnya angka kematian WBP dan tahanan yang terinfeksi HIV dan IO di UPT Pemasyarakatan.

III. Penelitian, Pengamatan, dan Pengembangan:

Selama masa RAN 2010-2014 Ditjenpas akan melaksanakan penelitian/ pengamatan, dan pengembangan guna memperkuat data dan informasi spesifik tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, HIV-AIDS, dan penyakit oportunistik. Data dan informasi spesifik akan digunakan sebagai referensi utama dalam menyusun perencanaan dan memperkuat kualitas pelaksanaan TUPOKSI pemasyarakatan, program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan.

1. Penelitian

Ditjenpas bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan termasuk Kementerian Kesehatan RI dan BNN untuk melakukan penelitian terkait dengan situasi epidemi HIV dan IO, dan risiko dan kecenderungan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan.

1.1. Tujuan

Tersedianya data hasil penelitian terkait dengan situasi epidemi HIV dan IO, risiko dan kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan.

1.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. Penelitian diarahkan untuk menyokong usaha mengembangkan layanan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika di UPT Pemasyarakatan secara komprehensif dan berkesinambungan;

b. Pelaksanaan penelitian di UPT Pemasyarakatan di bawah pengawasan dan pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dukungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI;

c. Penelitian di lingkungan UPT Pemasyarakatan dapat dilaksanakan atas kerjasama dengan instansi terkait pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian;

d. Hak kepemilikan hasil setiap penelitian berada pada Ditjenpas dan institusi peneliti. Publikasi hasil penelitian diperbolehkan atas ijin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

1.3. Sasaran

a. Penelitian yang akan dilaksanakan selama masa RAN disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya, di dalamnya termasuk untuk penelitian tentang (i) program pencegahan penularan HIV dan IO, serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bagi WBP dan tahanan, (ii) perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi ODHA di UPT Pemasyarakatan, (iii) terapi dan rehabilitasi klinis dan non-klinis bagi para penyalahguna narkotika, (iv) pelayanan sosial komprehensif bagi WBP dan tahanan.

b. Penelitian selama masa RAN 2010-2014 akan dilaksanakan di lingkup UPT Pemasyarakatan prioritas sebagaimana metodologi sampling yang akan ditetapkan.

1.4. Kegiatan Pokok

a. Menyusun kebijakan penelitian di lingkup UPT Pemasyarakatan;

b. Menggali kebutuhan penelitian untuk mendukung usaha meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan berkesinambungan;

c. Sosialisasi program dan pemanfaatan hasil penelitian di lingkungan UPT Pemasyarakatan kepada berbagai pihak terkait sebagai usaha untuk membangun kerjasama dan sokongan sumberdaya;

d. Setiap pelaksanaan penelitian melibatkan sumberdaya internal Ditjenpas;

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

1.5. Keluaran

a. Adanya kebijakan penelitian;

b. Adanya jenis kebutuhan penelitian;

c. Terlaksananya kegiatan penelitian yang didukung sumber daya internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

d. Publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.

2. Pengamatan:

Ditjenpas akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk melaksanakan pengamatan situasi epidemi HIV dan infeksi oportunistik di UPT Pemasyarakatan melalui kegiatan survailans HIV secara reguler dan survei survailans perilaku (SSP). Bilamana sumber daya tersedia SSP akan dipadu dengan tes biolojik selanjutnya disebut survei terpadu biolojik dan perilaku (STBP). Survailans HIV maupun SSP/STBP akan menjadikan WBP dan tahanan sebagai bagian dari populasi inti yang akan diamati secara periodik.

2.1. Tujuan:

Tersedianya data dan informasi tentang prevalensi HIV; pengetahuan, sikap, dan perilaku WBP dan tahanan terhadap penularan HIV dan infeksi oportunistik, serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan yang dapat digunakan dalam memformulasikan kebijakan pelaksanaan program.

2.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. Pengamatan diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika;

b. Pengamatan prevalensi HIV (kecenderungan penularan) dan infeksi oportunistik serta penyalahgunaan narkotika dilaksanakan menggunakan pendekatan dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI;

c. Pengendalian penggunaan data dan informasi hasil pengamatan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan atas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

2.3. Sasaran

a. Pengamatan yang akan dilaksanakan selama masa RAN disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya internal Ditjenpas dan atas dukungan instansi teknis pemerintah dan swasta, di dalamnya termasuk untuk pengamatan tentang survailans HIV, SSP/STBP terhadap pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS serta infeksi oportunistik, dan penyalahgunaan narkotika;

b. Pengamatan dilaksanakan dalam lingkup UPT Pemasyarakatan prioritas.

2.4. Kegiatan Pokok:

a. Penyusunan rencana kerja tahunan;

b. Berkoordinasi secara reguler dengan Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;

c. Melaksanakan survailans HIV pada UPT Pemasyarakatan yang terpilih sebagai sentinel secara reguler;

d. Pelaksanaan SSP lebih dari 2 kali selama masa RAN;

e. Sosialisasi pemanfaatan data prevalensi HIV, SSP/STBP secara internal serta sektor terkait;

f. Supervisi, monitoring, serta evaluasi.

2.5. Keluaran

a. Tersedianya rencana pelaksanaan survailans HIV, dan SSP/STBP untuk masa RAN 2010-2014;

b. Terlaksananya survailans HIV di lingkup UPT Pemasyarakatan secara reguler;

c. Terlaksananya SSP/STBP sedikitnya satu kali selama masa RAN 2010-2014;

d. Tersedianya data hasil survailans HIV dan SSP/STBP.

3. Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud adalah terkait dengan data dan informasi hasil dari penelitian dan pengamatan tersebut di atas. Pengembangan merupakan usaha meningkatkan kualitas dan memperluas daya jangkau program termasuk di dalamnya menggunakan desain pelaksanaan layanan program yang diperbaharui.

Ditjenpas akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan pembaharuan desain dan rencana uji coba pelaksanaannya.

3.1. Tujuan

Meningkatnya kualitas dan daya jangkau program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan UPT Pemasyarakatan didukung dengan hasil uji coba pelaksanaan desain layanan program yang diperbaharui.

3.2. Kebijakan Pelaksanaan

a. Pengembangan (pembaharuan) desain layanan program diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan, dan perluasan cakupan layanan program di lingkup UPT Pemasyarakatan;

b. Desain program yang diperbaharui akan melalui tahapan uji coba untuk kemudian akan ditetapkan sebagai Juknis oleh Ditjenpas;

c. Pengembangan (pembaharuan) desain layanan program dan uji coba hanya akan dapat terlaksana melalui kerjasama antara Ditjenpas dengan sektor terkait;

d. Pengembangan (pembaharuan) desain layanan program merupakan ranah tingkat pusat dan dibawah kendali Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3.3. Sasaran

a. Pengembangan (pembaharuan) desain layanan program yang akan dilaksanakan selama masa RAN 2010-2014 disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya internal Ditjenpas dan atas dukungan instansi terkait, termasuk di dalamnya model pendekatan yang tepat di UPT Pemasyarakatan tentang:

- Terapi dan rehabilitasi psiko-sosial, adiksi dan ketergantungan narkotika bagi WBP dan tahanan termasuk PTRM dan Narcotics Anonymous;
- Perawatan, dukungan, dan pengobatan HIV-AIDS serta infeksi oportunistik berbasis Lapas/Rutan termasuk kelompok dukungan sebaya;
- Perawatan paliatif AIDS dan infeksi oportunistik berbasis Lapas/Rutan;
- Penyediaan material pencegahan penularan HIV, IMS, dan infeksi oportunistik di UPT Pemasyarakatan.

b. Uji coba desain (pembaharuan) layanan program akan dilaksanakan pada UPT Pemasyarakatan prioritas dalam jumlah terbatas yang akan ditetapkan pada masa pelaksanaan RAN.

3.4. Kegiatan Pokok

a. Identifikasi kelaikan site study layanan program tertentu di UPT Pemasyarakatan namun perlu penyelarasan

dengan Undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya tentang UPT Pemasyarakatan. Site study tersebut termasuk:

- Program layanan terapi dan rehabilitasi psiko-sosial, adiksi dan ketergantungan narkotika bagi WBP dan tahanan termasuk PTRM dan Narcotics Anonymous.
- Perawatan paliatif AIDS dan infeksi oportunistik berbasis Lapas/Rutan.
- Pemutusan mata rantai penularan HIV dan IO melalui akselerasi akses alat suntik steril sekali pakai bagi WBP dan tahanan Narkotika suntik.
- Pemutusan mata rantai penularan HIV dan IO melalui penyediaan akses pemeriksaan dan pengobatan IMS di UPT Pemasyarakatan termasuk akses kondom.

b. Pembahasan hasil identifikasi dengan sektor terkait dan merancang rencana tindak lanjut program pembaharuan;

c. Kerjasama dengan sektor terkait untuk pelaksanaan uji coba, dan rancangan perluasan pelaksanaan desain yang diperbaharui;

d. Supervisi, bimbingan teknis, dan monitoring serta evaluasi.

3.5. Keluaran

a. Tersedianya desain layanan program yang akan dikembangkan (diperbaharui) dan siap untuk diujicobakan;

b. Tersedia hasil evaluasi pelaksanaan uji coba dan rencana perluasannya.

BAB 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Ditjenpas akan menjalankan kegiatan pemantauan reguler sebagaimana RAN Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan. Pemantauan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses dan cakupan/hasil layanan program. Hasil pemantauan dapat digunakan untuk memperluas cakupan layanan program dengan tetap memperhatikan mutu layanan.

Evaluasi pelaksanaan RAN Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan secara periodik setiap tahun, di tengah masa RAN, dan di akhir masa RAN.

Evaluasi tahunan bertujuan untuk menilai apakah cakupan program sesuai sebagaimana yang direncanakan di dalam RAN. Hasil evaluasi tahunan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penyusunan/penguatan rencana kerja tahunan.

Evaluasi tengah masa RAN dilaksanakan pada pertengahan tahun ke-tiga. Evaluasi tengah masa bertujuan untuk menilai mutu pelaksanaan layanan program sebagaimana dimaksud pada RAN dan Juklak serta Juknis terkait. Hasil evaluasi tengah masa dapat digunakan oleh jajaran Ditjenpas sebagai acuan pelaksanaan program pada tahun IV dan V RAN.

Evaluasi akhir RAN dilaksanakan pada menjelang akhir tahun 2014. Evaluasi akhir bertujuan untuk menilai cakupan dan mutu layanan program. Hasil evaluasi akhir akan digunakan oleh Ditjenpas untuk menyusun laporan akhir program dan penyusunan RAN periode berikutnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Indikator Kunci

Indikator kunci yang terdaftar di bawah akan dijabarkan ke dalam format target pencapaian indikator per tahun. Penjabaran akan dilakukan kemudian pada awal pelaksanaan RAN 2010-2014 dengan melibatkan semua Kepala UPT Pemasyarakatan dan Kanwil Kemkumham.

No	Indikator Kunci	Definisi Operasional
1	Jumlah Penghuni	Jumlah Narapidana atau tahanan termasuk tahanan titipan yang ada pada akhir bulan pelaporan
2	Jumlah Penghuni yang Pemakai	Jumlah Narapidana atau Tahanan yang masuk dengan catatan sebagai Pengguna Narkotika Psikotripika dan Zat Adiktif (NAPZA)
3	Jumlah Penghuni yang Penasun	Jumlah Narapidana/Tahanan yang pernah menggunakan Napza suntik 1 tahun terakhir pada bulan pelaporan
4	Jumlah Penghuni dengan HIV Positif	Jumlah Narapidana/Tahanan yang status HIV nya positif baik dari hasil pemeriksaan Konseling dan Testing HIV Sukarela di Lapas/Rutan yang melaporkan maupun dari dokumen rujukan dari Lapas/Rutan atau lembaga lain
5	Jumlah Penghuni yang baru mengikuti Pre-Release program	Jumlah Narapidana/Tahanan yang akan bebas dan baru pertama kali menerima informasi tentang berbagai program pengendalian HIV/AIDS di luar Lapas/Rutan atau dirujuk ke lembaga yang menyediakan layanan/program tersebut pada bulan pelaporan
6	Jumlah Penghuni yang baru mengikuti Penyuluhan HIV	Jumlah Narapidana/Tahanan yang baru pertama kali mengikuti penyuluhan tentang pencegahan penularan HIV dan IMS, dukungan, perawatan dan pengobatan AIDS serta infeksi oportunistik
7	Jumlah Penghuni yang baru mengikuti program Peer Educator	Jumlah Narapidana/Tahanan yang baru pertama kali mengikuti penyuluhan tentang pencegahan penularan HIV dan IMS, dukungan, perawatan dan pengobatan AIDS serta infeksi oportunistik dari teman sebaya
8	Jumlah Penghuni yang baru mengikuti program Pre-Release atau Penyuluhan HIV atau PE	Jumlah Narapidana/Tahanan yang baru pertama kali mengikuti pre-release program atau penyuluhan atau pendidikan dari teman sebaya pada bulan pelaporan
9	Jumlah Penghuni yang mengikuti Pre-tes Konseling	Jumlah Narapidana/Tahanan yang menerima konseling baik secara individu maupun kelompok untuk testing HIV pada bulan pelaporan
10	Jumlah Penghuni yang Testing HIV	Jumlah Narapidana/Tahanan yang melakukan testing HIV pada bulan pelaporan

11	Jumlah Penghuni yang diberi pasca-tes konseling dan menerima hasil	Jumlah Narapidana/Tahanan yang konseling setelah testing HIV dan menerima hasil testing-nya pada bulan pelaporan
12	Jumlah Penghuni yang Testing HIV dan hasilnya positif	Jumlah Narapidana/Tahanan yang hasil testing HIV nya dilayanan KTS Rutan/Lapas pelapor memberikan hasil reaktif dengan tiga reagensia berbeda pada bulan pelaporan
13	Jumlah kasus IMS yang diobati	Jumlah kasus penyakit IMS yang mendapat pengobatan tepat (sesuai dengan pedoman tatalaksana IMS, Depkes RI). Baik dengan menggunakan pendekatan Sindrom/Klinis atau Laboratorium. Jumlah kasus IMS yang diobati bisa lebih banyak dari jumlah pasien IMS yang diobati karena 1 pasien bisa terinfeksi lebih dari 1 IMS
14	Jumlah Penghuni dengan kasus IMS	Jumlah Narapidana/Tahanan dengan IMS yang mendapat pengobatan tepat (sesuai dengan pedoman tatalaksana IMS, RI). Baik dengan menggunakan pendekatan Sindrom/Klinis atau Laboratorium.
15	Jumlah Penghuni yang diberi kondom	Jumlah Narapidana/Tahanan yang menerima kondom pada bulan pelaporan
16	Jumlah kondom yang didistribusikan	Jumlah kondom yang didistribusikan pada bulan pelaporan
17	Jumlah pemutih/bleach yang didistribusikan	Jumlah pemutih/bleach yang didistribusikan pada bulan pelaporan
18	Jumlah Penghuni yang baru mendapat terapi rumatan Metadon	Jumlah Narapidana/Tahanan yang baru mendapatkan layanan substitusi Medaton pada bulan pelaporan
19	Jumlah Penghuni yang sedang mendapat terapi rumatan Metadon	Jumlah Narapidana/Tahanan yang sedang mendapatkan layanan substitusi Metadon pada bulan pelaporan
20	Jumlah Penghuni yang memenuhi syarat untuk ART	Jumlah Narapidana/Tahanan dengan HIV positif yang pernah masuk perawatan HIV dan dinyatakan oleh dokter memenuhi syarat untuk mendapatkan ART selama bulan ini. Informasi ini terdapat pada register pra-ART, dengan memeriksa ‘tanggal memenuhi syarat secara medis untuk ART’. Hitung jumlah pasien yang tanggal memenuhi syarat secara medisnya adalah selama bulan pelaporan. Contoh: untuk laporan Januari 2010, adalah semua pasien yang tanggal memenuhi syaratnya antara tanggal 1 dan 31 Januari 2010.

21	Jumlah Penghuni yang baru memulai ART	Jumlah Narapidana/Tahanan dengan HIV positif yang pernah masuk perawatan HIV dan dinyatakan oleh dokter memenuhi syarat untuk mendapatkan ART dan pernah mendapatkan ART selama bulan pelaporan. Informasi ini terdapat pada register ART, dengan memeriksa 'tanggal mulai ART'. Hitung jumlah pasien yang tanggal mulai ARTnya adalah selama bulan pelaporan. Contoh: untuk laporan Januari 2010, adalah semua pasien yang tanggal ARTnya antara 1 dan 31 Januari 2010. Pada register ART, karena pasien dicatat secara kronologis, kita hanya akan mendapatkan halamam terakhir untuk memeriksa. Periksa kembali informasi ini dengan register Pra-ART, kolom tanggal mulai ART, untuk memeriksa bahwa kedua register telah diperbaharui.
22	Jumlah Penghuni yang sedang menerima ART	Jumlah Narapidana/Tahanan yang sedang menerima pengobatan ART pada bulan pelaporan
23	Jumlah ODHA yang meninggal dunia	Jumlah Narapidana/Tahanan yang HIV positif dan meninggal dunia pada bulan pelaoran
24	Jumlah kasus baru ko-infeksi TBC-HIV	Jumlah kasus TBC baru yang ditemukan pada Narapidana/Tahanan dengan HIV positif yang datang ke klinik pada bulan pelaporan. Untuk mendapatkan data ini perlu dilihat di register Pra ART dan Register ART kolom infeksi oportunistik.
25	Jumlah kasus ko-infeksi TBC-HIV	Jumlah kasus TBC pada Narapidana/Tahanan dengan HIV positif yang datang ke klinik pada bulan pelaporan.
26	Jumlah Penghuni yang baru mendapat Profilaksis Kotrimoksazol	Jumlah Narapidana/Tahanan dengan HIV positif yang baru pertama kali mendapatkan profilaksis Kotrimoksazol
27	Jumlah Penghuni yang sedang mendapat Profilaksis Kotrimoksazol	Jumlah Narapidana/Tahanan dengan HIV positif yang sedang menerima profilaksis Kotrimoksazol
28	Jumlah penghuni yang baru aktif dalam KDS	Jumlah Narapidana/Tahanan yang baru mengikuti kegiatan Kelompok Dukungan Sebaya pada bulan pelaporan

Manajemen Program

a. Jml UPT Pemasyarakatan membentuk Tim AIDS
b. Jml Tim AIDS UPT Pemasyarakatan yang memiliki rencana kerja tahunan
c. Jml Tim AIDS UPT Pemasyarakatan yang mendokementasikan kegiatan rapat bulanan
d. Jml UPT Pemasyarakatan mengikuti pelatihan monitoring dan evaluasi
e. Jml UPT Pemasyarakatan yang mengirimkan laporan hasil kegiatan secara reguler

Khusus untuk LP/Rutan Wanita, ditambahkan dengan indikator sebagai berikut:
a. Jumlah WBP dan tahanan yang memiliki akses pada layanan PMTCT.

BAB 8

ANGGARAN, SUMBER PENDANAAN, DAN KEMITRAAN

Memperhatikan posisi strategis dalam penegakan HAM dan pemenuhan hak bagi WBP dan tahanan serta klien pemasyarakatan, Ditjenpas dan jajarannya akan mengusulkan anggaran pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika ke APBN. Kepala UPT Pemasyarakatan juga akan mengusulkan dukungan anggaran dari APBD di Kabupaten/Kota masing-masing wilayah.

Mengingat terbatasnya anggaran yang memungkinkan disediakan oleh APBN dan APBD, Ditjenpas dan jajarannya akan mengupayakan anggaran dari sumberdana lain misalnya dana kemitraan dengan instansi/lembaga/badan dalam dan luar negeri. Pengalaman masa lalu dan hingga masa awal pelaksanaan RAN 2010-2014, Ditjenpas mengelola dana kemitraan dari GF-ATM, dan dari HCPI/AusAID. Pada masa lalu Ditjenpas juga pernah mendapatkan dukungan program dari Family Health International (FHI) melalui Program Aksi Stop AIDS (ASA) baik yang dilakukan bersama jajaran Ditjenpas maupun melalui LSM mitra kerja FHI/ASA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kebutuhan anggaran selama masa RAN 2010-2014 sebesar Rp. 1.202 triliun. Jumlah anggaran tersebut dinilai layak bila dilihat dari jumlah WBP dan tahanan yang akan mendapat akses layanan program dan besarnya masalah sosialnya. Anggaran untuk setiap WBP dan tahanan per bulan sebesar Rp. 244.200.-

Rincian anggaran per tahun sebagai berikut:

A. Anggaran tahun 2010, sebesar Rp. 225.7 milyar.

B. Tahun 2011, Rp. 232.6 milyar.

C. Tahun 2012, Rp. 238.5 milyar.

D. Tahun 2013, Rp. 248.7 milyar.

E. Tahun 2014, Rp. 256.2 milyar.

Rencana anggaran detil per program dapat dilihat pada lampiran#6.

Rencana anggaran detil per UPT Pemasyarakatan akan disusun setiap tahun melalui rapat tahunan Ditjenpas tentang program penanggulangan HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkotika.

BAB 9

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana kerja tahunan pelaksanaan RAN 2010-2014 secara umum menguraikan tentang program RAN dan kerangka waktu serta jumlah (target) Lapas/Rutan dan Bapas pada setiap tahun. Rencana kerja tahunan tersebut dapat dilihat pada lampiran#1.

Rencana Kerja Tahunan tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam rencana kerja per UPT Pemasyarakatan dan rencana kerja Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunannya akan dilakukan melalui lokakarya tahunan yang akan dikoordinasikan oleh Ditjenpas.

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	:	Acquired Immuno Deficiency Syndrome
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	:	Alat Pelindung Diri
ART	:	Anti Retroviral Therapy (Terapi obat ARV)
ARV	:	Anti Retroviral
Bapas	:	Balai Pemasyarakatan
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
Binadik	:	Pembinaan dan pendidikan
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNP/K	:	Badan Narkotika Provinsi/Kabupaten/Kota
BTA	:	Basil Tahan Asam
CMB	:	Cuti Menjelang Bebas
CST	:	Care, Support and Treatment (Perawatan, dukungan dan pengobatan untuk ODHA)
Depag	:	Departemen Agama
Depdiknas	:	Departemen Pendidikan Nasional
Deperindag	:	Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Depkes	:	Departemen Kesehatan
Depkumham	:	Departemen Hukum dan HAM
Depnakertrans	:	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Depsos	:	Departemen Sosial
Ditbinsustik	:	Direktorat Bina Khusus Narkotika
Ditbinkamtib	:	Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban
Ditjenpas	:	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Ditjen PP & PL	:	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
DOTS	:	Directly-Observed Treatment, Short-course
FHI	:	Family Health Internasional
GF-ATM	:	Glogal Fund for AIDS, Tuberculosis, and Malaria
GF R8	:	Global Fund Round 8
Giatja	:	Kegiatan Kerja
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HCPI	:	HIV-AIDS Cooperation Program for Indonesia

HIV	:	Human Immunodeficeincy Virus
HR	:	Harm Reduction (pengurangan dampak buruk)
IDU	:	Intravenous Drug User
IMAI	:	*integrated management for adult and adolescence illness*
IMS	:	Infeksi Menular Seksual
IO	:	Infeksi Oportunistik
Kanwil Depkumham	:	Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
Kadivpas	:	Kepala Divisi Pemasyarakatan
Ka. UPT	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis
KDS	:	Kelompok Dukungan Sebaya
Keppres	:	Keputusan Presiden
Kesling	:	Kesehatan lingkungan
KIE	:	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KNCV	:	Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging
KPAN	:	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
KPAP/K	:	Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi / Kabupaten / Kota
KPP	:	Komunikasi Perubahan Perilaku
K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
LASS	:	Layanan Alat Suntik Steril
LSL	:	Lelaki yang berhubungan Seks dengan Lelaki
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mapenaling	:	Masa pengenalan lingkungan
Menkokesra	:	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
M&E	:	Monitoring dan Evaluasi
MK	:	Manajemen Kasus
MSM	:	Male sex with male (laki-laki suka hubungan seks sesama jenis)
NAPZA	:	Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif
Narkoba	:	Narkotika, obat, dan bahan adiktif
ODHA	:	Orang dengan HIV-AIDS
PB	:	Pembebasan Bersyarat
Penasun	:	Pengguna Napza Suntik
PEP	:	Post exposure profilaxis *(profilaksis paska pajanan)*
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
PICT	:	Provider initiative for counseling and test
PMO	:	Pengawas minum obat
PMTCT	:	Prevention of mother to child transmission *(Pencegahan penularan dari ibu ke anak)*
Pokja	:	Kelompok Kerja
PSK	:	Pekerja Seks Komersil
PTRM	:	Program Terapi Rumatan Metadon

Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
P4GN	:	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
Rutan	:	Rumah Tahanan Negara
RS	:	Rumah Sakit
RSJ/KO	:	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
RSKO	:	Rumah Sakit Ketergantungan Obat
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTL	:	Rencana tindak lanjut
Satgas	:	Satuan Tugas
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sidak	:	Inspeksi Mendadak
SK	:	Surat Keputusan
SKB	:	Surat Keputusan Bersama
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SSP	:	Survei Survailans Perilaku
STBP	:	Survei Terpadu Biolojik dan Perilaku
Stranas	:	Strategi Nasional
Subdit AIDS	:	Sub Direktorat AIDS
TBC	:	Tuberculosis
TC	:	Therapeutic Community
T & R	:	Terapi dan rehabilitasi
ToT	:	Training of Trainer
TPP	:	Tim Pengamat Pemasyarakatan
TUPOKSI	:	Tugas Pokok dan Fungsi
UNAIDS	:	*Joint United Nations Programme on HIV and AIDS*
UNODC	:	United Nations of Drug Control
u.p	:	Untuk pelaksanaan
UP	:	Universal Precaution
UU	:	Undang-undang
VCT	:	Voluntary Counseling and Test
WBP	:	Warga binaan pemasyarakatan
WHO	:	World Health Organization
Yansos	:	Pelayanan Sosial
Yantah	:	Pelayanan Tahanan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Rencana kerja tahunan Tahun 2010 hingga 2014
2. Lampiran 2 : Daftar UPT Pemasyarakatan prioritas nasional dan Populasi sasaran.
3. Lampiran 3a : Kegiatan Program Terapi-Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba.
4. Lampiran 3b : Kegiatan Program Terapi-Rehabilitasi Medik Pengguna Narkoba
5. Lampiran 4a : Kegiatan Program KIE HIV-AIDS dan Bahaya Narkoba
6. Lampiran 4b : Material dan Fasilitas Pencegahan Penularan HIV dan IO
7. Lampiran 4c : Kegiatan Program VCT/PICT dan CST
8. Lampiran 4d : Kegiatan Program IMS, PEP dan Perawatan Paliatif AIDS-IO
9. Lampiran 5 : Kebutuhan anggaran tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Strategi Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2005-2009. Kemkumham RI, Ditjenpas, Tahun 2005.
2. Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia Tahun 2007-2010. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Tahun 2007
3. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia Tahun 2007-2010. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Tahun 2007
4. Pedoman Praktis Penanggulangan Napza di Puskesmas. Kemkes RI, Tahun 2003.
5. Strategi Penanggulangan Tuberkulosis Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia. Kemkumham RI, Ditjenpas, Tahun 2007.
6. Panduan Teknis Penanggulangan Tuberkulosis di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2008.
7. Buku saku tentang HIV, IMS, IO, dan Penyalahgunaan Narkotika bagi Petugas Lapas/Rutan. Kemkumham RI, Ditjenpas, April 2007.
8. Master plan penguatan sistim dan penyediaan layanan klinis HIV-AIDS di Lapas/Rutan Tahun 2007-2010. Kemkumham RI, Ditjenpas, Tahun 2007.
9. Pedoman teknis pelaksanaan KIE HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas/Rutan di Indonesia. Kemkumham RI, Ditjenpas, Tahun 2009.
10. Pedoman pelaksanaan PTRM di Lapas/Rutan. Kemkumham RI, Ditjenpas, Tahun 2007.
11. Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Phikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Kemkes RI, Ditjen PP & PL, Tahun 2006.

Lampiran 1 : Program Kerja Tahun 2010 hingga Tahun 2014

Program	Komponen		Sasaran	Prioritas Lapas/Rutan dalam Kerangka Waktu				
				Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1. Program Penegakan dan bimbingan hukum, terapi dan rehabilitasi serta Pelayanan Sosial yang berkesinambungan	1.1.	Penegakan & Bimbingan Hukum	1. Menurunkan tingkat peredaran gelap Narkotika di Lapas/Rutan 2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan Narkotika di Lapas/Rutan	Seluruh Lapas/Rutan				
	1.2.	Pelayanan sosial	Meningkatkan layanan pembinaan pemulihan dan pengembangan nilai-nilai sosial bagi WBP dan Klien Pemasyarakatan	Seluruh Lapas/Rutan				
	1.3.	Terapi dan rehabilitasi	Meningkatkan akses layanan T&R guna membantu Napi/Tahanan dari ketergantungan Narkotika	45 Lapas/Rutan Prioritas	72 Lapas/Rutan Prioritas		101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	
2. Program pencegahan penularan HIV dan penatalaksanaan AIDS dan infeksi oportunistik.	2.1.	KIE tentang pencegahan penularan HIV dan infeksi oportunistik	1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku WBP ttg penanggulangan HIV-AIDS dan IO 2. Menurunkan risiko penularan HIV dan IO pada kalangan WBP dan tahanan	101 - 139 Lapas Rutan dan 20 - 25 Bapas Prioritas			Seluruh Lapas dan Rutan serta Bapas di Indonesia	
	2.2.	VCT/PICT bagi WBP dan tahanan	Mengendalikan penularan HIV dan membantu WBP dan tahanan mengetahui status kesehatannya terkait infeksi HIV agar sesegera mungkin mendapatkan perawatan, dukungan, dan pengobatan	35 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	65 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas		101 - 139 Lapas Rutan Prioritas	
	2.3.	Akses material pencegahan penularan HIV dan penyakit oportunistik	Memutus mata rantai penularan HIV dan IO di Lapas/Rutan melalui penyediaan akses terhadap material pencegahan	7 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	12 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas		35 dari 101 - 139 Lapas Rutan Prioritas	
	2.4.	K3 bagi petugas Lapas/Rutan dan Bapas serta WBP	Memberikan perlindungan bagi Petugas dan WBP dan tahanan terhadap terjadinya risiko kecelakaan kerja dan kegiatan rutin dan risiko turunannya yakni penularan HIV dan IO	7 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	12 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas		35 dari 101 - 139 Lapas Rutan Prioritas	
	2.5.	Profilaksis paska pajanan bagi petugas Lapas, Rutan, Bapas, dan WBP/tahanan	Mencegah sedini mungkin terjadinya penularan HIV pada petugas dan WBP/tahanan sebagai akibat dari kecelakaan kerja maupun aktivitas rutin	7 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	7 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	13 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	25 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	33 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas

Lampiran 1 : Program Kerja Tahun 2010 hingga Tahun 2014 (Lanjutan)

Program	Komponen		Sasaran	Prioritas Lapas/Rutan dalam Kerangka Waktu				
				Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
3. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi WBP dan tahanan ODHA	3.1.	Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan ARV dan IO bagi WBP/tahanan ODHA	Meningkatkan kepercayaan diri dan penerapan gaya hidup sehat bagi ODHA	**35 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**	**65 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**		**101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**	
			Meningkatkan akses layanan pengobatan ARV dan IO (20% dari jumlah ODHA di Lapas/Rutan)	**35 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**	**65 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**		**101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**	
	3.2.	Perawatan, dukungan dan pengobatan bagi pasien TB	Menurunkan beban TB pada ODHA dan menurunkan tingkat kematian akibat TB	**20 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**	**60 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**		**90 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**	
	3.3.	Perawatan paliatif AIDS dan IO bagi WBP dan tahanan	Meningkatkan dukungan psiko-sosial dan spiritual bagi ODHA stadium akhir.	**10 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**				
4. Penelitian/ pengamatan & pengembangan	4.1.	Survei survaialns perilaku WBP dan tahanan	Lapas dan Rutan pilihan sampling	**Sentinel site**				**Sentinel site**
	4.2.	Penjajagan Situasi Cepat WBP/tahanan Narkotika	Lapas dan Rutan pilihan sampling	**Sentinel site**				**Sentinel site**
	4.3	Site study dan replikasi layanan jarum suntik steril	Jumlah Lapas/Rutan terpilih sebagai site study	Semua Lapas/Rutan yang terpilih sebagai site study				
	4.4.	Site study dan replikasi layanan palliatif HIV dan AIDS berbasis Lapas/Rutan						
	4.5.	Site study dan replikasi pelaksanaan narcotic anonimous	Meningkatkan partisipasi WBP dan tahanan tentang mempertahankan pola hidup sehat dari ketergantungan Narkotika	Semua Lapas/Rutan yang terpilih sebagai site study				
5. Pelaksanaan program komprehensif dan berkesinambungan di Lapas/Rutan Rujukan	5.1.	Penjajagan kebutuhan dan penyusunan program kerja per Lapas/Rutan	Tersedianya program kerja per Lapas/ Rutan yang telah disetujui Ka Lapas/ Rutan masing-masing.	**7 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas**			10 dari 101 - 139 Lapas/Rutan Prioritas	
	5.2.	Pendampingan manajeman dan teknis	Setiap Lapas/Rutan Rujukan mendapatkan pelatihan, dan pendampingan manajemen program serta teknis layanan program.					
	5.3.	Evaluasi perkembangan pelaksanaan program komprehensif dan kesinambungan	Terlaksananya evaluasi perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan di masing-masing Lapas/Rutan Rujukan, oleh Tim Kerja Ditjenpas.					
	5.4.	Rencana perluasan program komprehensif dan kesinambungan ke provinsi lain di luar 20 Provinsi.	Tersedianya rencana kerja Ditjenpas tentang perluasan program komprehensif dan kesinambungan.					

Lampiran 2 : Daftar UPT PAS Prioritas Nasional dan Populasi Sasaran

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan Prioritas	Populasi Napi/Tahanan			Nama Bapas Prioritas
			Jml WBP per Maret 09	WBP Narkoba	%	
1	**Jawa Barat (1)**	LP Klas IIA Banceuy Bandung	1,027	985	95.91	1. Bapas Klas I Bandung
2		LP Klas IIA Tasikmalaya	511	71	13.89	2. Bapas Klas II Cirebon
3		LP Klas IIB Sukabumi	641	110	17.16	
4		LP Klas IIA Narkotika Gintung	1,191	1,191	100.00	
5		LP Klas IIA Bogor	2,039	714	35.00	
6		Rutan Klas I Bandung	2,107	1,054	50.00	
7		LP Klas IIA Bekasi	1,795	808	45.00	
8		LP Klas IIA Karawang	800	144	18.00	
9		LP Klas IIA Kuningan	499	95	19.00	
10		LP Klas IIB Cianjur	726	138	19.00	
11		LP Klas IIA Subang	678	129	19.00	
12		Rutan Klas I Cirebon	585	146	25.00	
13		LP Klas I Sukamiskin	458	5	1.00	
14		LP Klas I Cirebon	548	27	5.00	
			13,605	**5,616**	**41.28**	2
15	**DKI Jkt (2)**	LP Klas I Cipinang	3,207	1,122	35.00	1. Bapas Klas I Jakpus
16		Rutan Klas I Cipinang	1,300	780	60.00	2. Bapas Klas I Jakarta Timur Utara
17		LP Klas II A Narkotik Cipinang	2,473	2,424	98.00	
18		Rutan Kls 1 Jak Pus (Salemba)	3,605	2,163	60.00	
19		LP Klas IIA Jakpus (Salemba)	850	255	30.00	
20		Rutan Kls IIA Jak Timur (Pondok Bambu)	1,569	941	60.00	
			13,004	**7,685**	**59.10**	2
21	**Banten (3)**	LP klas I Tanggerang	1,739	696	40.00	1. Bapas Klas II Serang
22		LP Klas IIA Pemuda Tanggerang	3,310	1,986	60.00	
23		LP Klas IIA Wanita Tanggerang	425	170	40.00	
24		LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang	253	63	25.00	
25		LP Klas IIA Serang	854	85	10.00	
26		Rutan Klas IIA Serang	448	90	20.00	
			7,029	**3,090**	**43.96**	1
27	**Jawa Timur (4)**	LP Klas I Madiun	926	741	80.00	1. Bapas Klas I Surabaya
28		LP Klas IIA Narkotika Pamekasan	730	584	80.00	2. Bapas Klas II Madiun
29		LP Klas I Malang	1,379	552	40.00	
30		LP Klas IIA Kediri	704	176	25.00	
31		Rutan Klas I Surabaya	1,780	1,246	70.00	
32		LP Klas IIA Sidoarjo	641	256	40.00	
33		LP Tulungagung	391	78	20.00	
34		LP Mojokerto	411	82	20.00	
35		LP Klas IIA Wanita Malang	289	87	30.00	
36		LP Klas I Surabaya (Porong)	1,800	810	45.00	
37		Lapas Klas IIA Jember	804	161	20.00	
38		Rutan Klas II Bangil	437	66	15.00	
39		Lapas Klas IIB Blitar	467	70	15.00	
40		Lapas Klas IIB Banyuwangi	906	272	30.00	
			11,665	**5,180**	**44.41**	2
41	**Sumatera Utara (5)**	LP Klas I Medan	1,753	701	40.00	1. Bapas Klas I Medan
42		Rutan Klas I Medan	2,487	1,492	60.00	
43		LP Klas IIA Anak Medan	768	307	40.00	
44		LP Klas IIA Wanita Medan	397	159	40.00	
45		LP Klas IIA Pematang Siantar	787	512	65.00	
46		Rutan Klas IIA Labuhan Deli	575	345	60.00	
47		LP Klas IIB Lubuk Pakam	935	187	20.00	
48		LP Klas IIA Binjai	897	404	45.00	
49		LP Klas IIA Rantau Prapat	718	144	20.00	
			9,317	**4,250**	**45.62**	1
50	**Jawa Tengah (6)**	LP Klas IIA Besi Nusakambangan	320	144	45.00	1. Bapas Klas I Semarang
51		LP Klas I Semarang	781	195	25.00	
52		LP Khusus Narkotika Klas IIA NK	140	140	100.00	
53		Rutan Klas I Surakarta	533	213	40.00	
54		LP Klas IIA Pekalongan	748	337	45.00	
55		Rutan Klas IIA Pekalongan	302	91	30.00	
56		LP Klas IIA Magelang	422	63	15.00	
57		Lapas Klas I Batu NK	178	18	10.00	
58		Lapas Klas IIA Purwokerto	353	141	40.00	
59		Lapas Klas IIA Pasirputih NK	268	180	67.16	
60		Lapas Klas IIB Cilacap	449	157	35.00	
61		Lapas Klas IIB Tegal	235	82	35.00	
62		Lapas Klas IIA Wanita Semarang	129	45	35.00	
			4,858	**1,807**	**37.19**	1
63	**Kepri (7)**	LP Klas IIA Batam	1,294	647	50.00	1. Bapas Klas II Tanjungpinang
64		Rutan klas II Batam	727	160	22.01	
65		LP Klas IIA Tanjung Pinang	537	188	35.00	
66		Rutan Klas IIA Tanjungbalai Karimun	409	143	35.00	
			2,967	**1,138**	**38.36**	1

Lampiran 2 : Daftar UPT PAS Prioritas Nasional dan Populasi Sasaran (Lanjutan)

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan Prioritas	Populasi Napi/Tahanan			Nama Bapas Prioritas
			Jml WBP per Maret 09	WBP Narkoba	%	
67	**DIY (8)**	LP Kelas II A Yogyakarta	350	-	0.00	1. Bapas Klas I Yogyakarta
68		LP Kelas II B Sleman	309	62	20.00	
69		Rutan Klas II Yogyakarta	137	15	10.95	
70		LP Klas IIA Narkotika Yogyakarta	173	173	100.00	
			969	**250**	**25.78**	1
71	**Bali (9)**	LP Klas IIA Denpasar	821	493	60.00	1. Bapas Klas I Denpasar
72		Rutan Klas IIB Bangli	92	18	20.00	
			913	**511**	**55.97**	1
73	**Sumbar (10)**	LP Klas IIA Padang	615	246	40.00	1. Bapas Klas II Padang
			615	**246**	**40.00**	1
74	**Riau (11)**	LP Klas IIA Pekan Baru	1,418	567	40.00	1. Bapas Klas II Pekanbaru
75		Rutan Klas IIB Dumai	566	198	35.00	
76		LP Klas IIA Tembilahan	378	95	25.00	
77		LP Klas IIB Bengkalis	481	144	30.00	
78		Lapas Klas IIB Bangkinang	473	142	30.00	
			3,316	**1,146**	**34.56**	1
79	**Babel (12)**	LP Klas IIA Pangkalpinang	365	147	40.27	
80		Lapas Klas IIB Sungai Liat	290	49	0.17	
			655	**196**	**29.97**	0
81	**Jambi (13)**	LP Klas IIA Jambi	934	217	23.23	
82		LP Klas IIA Kuala Tungkal	323	47	14.55	
			1,257	**264**	**21.00**	0
83	**Lampung (14)**	LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung	354	336	95.00	1. Bapas Klas II Bandar Lampung
84		Lapas Klas I Bandar Lampung	799	160	20.00	
85		Rutan Klas I Bandar Lampung	573	201	35.00	
			1,726	**697**		1
86	**Sumsel (15)**	LP Klas I Palembang	1,065	426	40.00	1. Bapas Klas II Palembang
87		Rutan Klas I Palembang	988	395	40.00	
88		LP Klas IIA Narkotika Lubuk Linggau	128	128	100.00	
			2,181	**949**	**43.52**	1
89	**Kalbar (16)**	LP Klas IIA Pontianak	445	134	30.00	1. Bapas Klas II Pontianak
90		Rutan Klas IIA Pontianak	597	179	30.00	
			1,042	**313**	**30.00**	1
91	**Kaltim (17)**	Rutan Klas IIA Samarinda	809	324	40.00	1. Bapas Klas II Samarinda
92		LP Klas IIA Samarinda	563	507	90.00	
93		Rutan Klas IIA Balikpapan	504	202	40.00	
94		Lapas Klas IIB Tenggarong	778	156	20.00	
95		LP Klas IIA Tarakan	635	159	25.00	
			3,289	**1,346**	**40.93**	1
96	**Kalsel (18)**	LP Klas IIA Banjarmasin	1,066	533	50.00	1. Bapas Klas I Banjarmasin
97		LP Klas IIA Anak Martapura	544	163	30.00	
			1,610	**696**	**43.24**	1
98	**Sulsel (19)**	Rutan Klas I Makassar	823	329	40.00	1. Bapas Klas I Makassar
99		LP Klas I Makassar	499	-	0.00	
100		LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa	247	235	95.00	
			1,569	**564**	**35.94**	1
101	**NTB (20)**	LP Klas IIA Mataram	436	174	40.00	
			436	**174**	**40.00**	**-**
		Total target Napi/tahanan di Lapas/Rutan prioritas	**82,023**	**36,118**		**14,447**
		Total populasi Napi/tahanan di Indonesia	**131,115**	**38,427**		21.42857143
		Prosentase	**63**	**94**		

10 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus AIDS dalam jumlah besar

1	Jawa Barat	**3,162**
2	DKI Jakarta	**2,807**
3	Jawa Timur	**2,652**
4	Papua	**2,499**
5	Bali	**1,263**
6	Kalimantan Barat	**730**
7	Sumatera Utara	**485**
8	Jawa Tengah	**573**
9	Riau	**368**
10	Kepulauan Riau	**325**
		14,864
		16,964
		87.62

Lampiran 3a : Kegiatan Program: Terapi-Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba

No	Provinsi	UPT	Populasi Napi/Tahanan		Pelayanan Admisi dan Orientasi	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Terapi dan Rehabilitasi											
						Gakkum/Bimkum	Terapi dan rehabilitasi psiko-sosial, adiksi dan ketergantungan Narkotika										
						Sidak/ p'geledahan rutin per tahun	Terapi Kondisi Darurat (Target setiap tahun)	Terapi Rawat Jalan/Terapi P'cegahan Relaps/ Terapi Pasca Perawatan (Target Kumulatif)					Teurapic Community/Creminon (Target Kumulatif)				
			Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika													
					100%		1%	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	**Jawa Barat (1)**	LP Klas IIA Banceuy Bandung	1,027	985	1,027	Setiap Lapas/Rutan melakukan sidak/ penggeledahan sedikitnya sekali sebulan dirangkai dengan KIE terkait penegakan dan pembimbingan hukum	10	49	69	89	99	118	158	173	189	221	252
2		LP Klas IIA Tasikmalaya	511	71	511		1	4	5	6	7	9	11	12	14	16	18
3		LP Klas IIB Sukabumi	641	110	641		1	6	8	10	11	13	18	19	21	25	28
4		LP Klas IIA Narkotika Gintung	1,191	1,191	1,191		12	60	83	107	119	143	191	210	229	267	305
5		LP Klas IIA Bogor	2,039	714	2,039		7	36	50	64	71	86	114	126	137	160	183
6		Rutan Klas I Bandung	2,107	1,054	2,107		11	53	74	95	105	126	169	185	202	236	270
7		LP Klas IIA Bekasi	1,795	808	1,795		8	40	57	73	81	97	129	142	155	181	207
8		LP Klas IIA Karawang	800	144	800		1	7	10	13	14	17	23	25	28	32	37
9		LP Klas IIA Kuningan	499	95	499		1	5	7	9	9	11	15	17	18	21	24
10		LP Klas IIB Cianjur	726	138	726		1	7	10	12	14	17	22	24	26	31	35
11		LP Klas IIA Subang	678	129	678		1	6	9	12	13	15	21	23	25	29	33
12		Rutan Klas I Cirebon	585	146	585		1	7	10	13	15	18	23	26	28	33	37
13		LP Klas I Sukamiskin	458	5	458		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
14		LP Klas I Cirebon	548	27	548		0	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7
			13,605	**5,616**	**13,605**		**56**	**281**	**393**	**505**	**562**	**674**	**899**	**988**	**1078**	**1258**	**1438**
15	**DKI Jkt (2)**	LP Klas I Cipinang	3,207	1,122	3207		11	56	79	101	112	135	180	198	216	251	287
16		Rutan Klas I Cipinang	1,300	780	1300		8	39	55	70	78	94	125	137	150	175	200
17		LP Klas II A Narkotik Cipinang	2,473	2,424	2473		24	121	170	218	242	291	388	427	465	543	620
18		Rutan Kls 1 Jak Pus (Salemba)	3,605	2,163	3605		22	108	151	195	216	260	346	381	415	485	554
19		LP Klas IIA Jakpus (Salemba)	850	255	850		3	13	18	23	26	31	41	45	49	57	65
20		Rutan Kls IIA Jak Timur (Pondok Bambu)	1,569	941	1569		9	47	66	85	94	113	151	166	181	211	241
			13,004	**7,685**	**13,004**		**77**	**384**	**538**	**692**	**769**	**922**	**1,230**	**1353**	**1476**	**1722**	**1967**
21	**Banten (3)**	LP klas I Tanggerang	1,739	696	1739		7	35	49	63	70	83	111	122	134	156	178
22		LP Klas IIA Pemuda Tanggerang	3,310	1,986	3310		20	99	139	179	199	238	318	350	381	445	508
23		LP Klas IIA Wanita Tanggerang	425	170	425		2	9	12	15	17	20	27	30	33	38	44
24		LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang	253	63	253		1	3	4	6	6	8	10	11	12	14	16
25		LP Klas IIA Serang	854	85	854		1	4	6	8	9	10	14	15	16	19	22
26		Rutan Klas IIA Serang	448	90	448		1	4	6	8	9	11	14	16	17	20	23
			7,029	**3,090**	**7029**		**32**	**154**	**216**	**278**	**309**	**371**	**494**	**544**	**593**	**692**	**791**
27	**Jawa Timur (4)**	LP Klas I Madiun	926	741	926		7	37	52	67	74	89	119	130	142	166	190
28		LP Klas IIA Narkotika Pamekasan	730	584	730		6	29	41	53	58	70	93	103	112	131	150
29		LP Klas I Malang	1,379	552	1,379		6	28	39	50	55	66	88	97	106	124	141
30		LP Klas IIA Kediri	704	176	704		2	9	12	16	18	21	28	31	34	39	45
31		Rutan Klas I Surabaya	1,780	1,246	1,780		12	62	87	112	125	150	199	219	239	279	319
32		LP Klas IIA Sidoarjo	641	256	641		3	13	18	23	26	31	41	45	49	57	66
33		LP Tulungagung	391	78	391		1	4	5	7	8	9	13	14	15	18	20
34		LP Mojokerto	411	82	411		1	4	6	7	8	10	13	14	16	18	21
35		LP Klas IIA Wanita Malang	289	87	289		1	4	6	8	9	10	14	15	17	19	22
36		LP Klas I Surabaya (Porong)	1,800	810	1,800		8	41	57	73	81	97	130	143	156	181	207
37		Lapas Klas IIA Jember	804	161	804		2	8	11	14	16	19	26	28	31	36	41
38		Rutan Klas II Bangil	437	66	437		1	3	5	6	7	8	10	12	13	15	17
39		Lapas Klas IIB Blitar	467	70	467		1	4	5	6	7	8	11	12	13	16	18
40		Lapas Klas IIB Banyuwangi	906	272	906		3	14	19	24	27	33	43	48	52	61	70
			11,665	**5,180**	**11,665**		**52**	**259**	**363**	**466**	**518**	**622**	**829**	**912**	**995**	**1160**	**1326**

Lampiran 3a : Kegiatan Program: Terapi-Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba (Lanjutan)

No	Provinsi	UPT	Populasi Napi/Tahanan		Pelayanan Admisi dan Orientasi	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Terapi dan Rehabilitasi											
						Gakkum/Bimkum	Terapi dan rehabilitasi psiko-sosial, adiksi dan ketergantungan Narkotika										
			Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika		Sidak/ p'geledahan rutin per tahun	Terapi Kondisi Darurat (Target setiap tahun)	Terapi Rawat Jalan/Terapi P'cegahan Relaps/ Terapi Pasca Perawatan (Target Kumulatif)					Teurapic Community/Creminon (Target Kumulatif)				
					100%		1%	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
41	**Sumatera Utara (5)**	LP Klas I Medan	1,753	701	1,753		7	35	49	63	70	84	112	123	135	157	180
42		Rutan Klas I Medan	2,487	1,492	2,487		15	75	104	134	149	179	239	263	287	334	382
43		LP Klas IIA Anak Medan	768	307	768		3	15	22	28	31	37	49	54	59	69	79
44		LP Klas IIA Wanita Medan	397	159	397		2	8	11	14	16	19	25	28	30	36	41
45		LP Klas IIA Pematang Siantar	787	512	787		5	26	36	46	51	61	82	90	98	115	131
46		Rutan Klas IIA Labuhan Deli	575	345	575		3	17	24	31	35	41	55	61	66	77	88
47		LP Klas IIB Lubuk Pakam	935	187	935		2	9	13	17	19	22	30	33	36	42	48
48		LP Klas IIA Binjai	897	404	897		4	20	28	36	40	48	65	71	78	90	103
49		LP Klas IIA Rantau Prapat	718	144	718		1	7	10	13	14	17	23	25	28	32	37
			9,317	**4,250**	**9,317**		**43**	**213**	**298**	**383**	**425**	**510**	**680**	**748**	**816**	**952**	**1088**
50	**Jawa Tengah (6)**	LP Klas IIA Besi Nusakambangan	320	144	320		1	7	10	13	14	17	23	25	28	32	37
51		LP Klas I Semarang	781	195	781		2	10	14	18	20	23	31	34	37	44	50
52		LP Khusus Narkotika Klas IIA NK	140	140	140		1	7	10	13	14	17	22	25	27	31	36
53		Rutan Klas I Surakarta	533	213	533		2	11	15	19	21	26	34	38	41	48	55
54		LP Klas IIA Pekalongan	748	337	748		3	17	24	30	34	40	54	59	65	75	86
55		Rutan Klas IIA Pekalongan	302	91	302		1	5	6	8	9	11	14	16	17	20	23
56		LP Klas IIA Magelang	422	63	422		1	3	4	6	6	8	10	11	12	14	16
57		Lapas Klas I Batu NK	178	18	178		0	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5
58		Lapas Klas IIA Purwokerto	353	141	353	Setiap Lapas/Rutan	1	7	10	13	14	17	23	25	27	32	36
59		Lapas Klas IIA Pasirputih NK	268	180	268	melakukan sidak/	2	9	13	16	18	22	29	32	35	40	46
60		Lapas Klas IIB Cilacap	449	157	449	penggeledahan	2	8	11	14	16	19	25	28	30	35	40
61		Lapas Klas IIB Tegal	235	82	235	sedikitnya sekali	1	4	6	7	8	10	13	14	16	18	21
62		Lapas Klas IIA Wanita Semarang	129	45	129	sebulan dirangkai	0	2	3	4	5	5	7	8	9	10	12
			4,858	**1,807**	**4,858**	dengan KIE terkait	**18**	**90**	**126**	**163**	**181**	**217**	**289**	**318**	**347**	**405**	**462**
63	**Kepri (7)**	LP Klas IIA Batam	1,294	647	1,294	penegakan dan	6	32	45	58	65	78	104	114	124	145	166
64		Rutan klas II Batam	727	160	727	pembimbingan	2	8	11	14	16	19	26	28	31	36	41
65		LP Klas IIA Tanjung Pinang	537	188	537	hukum	2	9	13	17	19	23	30	33	36	42	48
66		Rutan Klas IIA Tanjungbalai Karimun	409	143	409		1	7	10	13	14	17	23	25	27	32	37
			2,967	**1,138**	**2,967**		**11**	**57**	**80**	**102**	**114**	**137**	**182**	**200**	**219**	**255**	**291**
67	**DIY (8)**	LP Kelas II A Yogyakarta	350	-	350		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
68		LP Kelas II B Sleman	309	62	309		1	3	4	6	6	7	10	11	12	14	16
69		Rutan Klas II Yogyakarta	137	15	137		0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4
70		LP Klas IIA Narkotika Yogyakarta	173	173	173		2	9	12	16	17	21	28	30	33	39	44
			969	**250**	**969**		**2**	**13**	**17**	**22**	**25**	**30**	**40**	**44**	**48**	**56**	**64**
71	**Bali (9)**	LP Klas IIA Denpasar	821	493	821		5	25	34	44	49	59	79	87	95	110	126
72		Rutan Klas IIB Bangli	92	18	92		0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5
			913	**511**	**913**		**5**	**26**	**36**	**46**	**51**	**61**	**82**	**90**	**98**	**114**	**131**
73	**Sumbar (10)**	LP Klas IIA Padang	615	246	615		2	12	17	22	25	30	39	43	47	55	63
			615	**246**	**615**		**2**	**12**	**17**	**22**	**25**	**30**	**39**	**43**	**47**	**55**	**63**
74	**Riau (11)**	LP Klas IIA Pekan Baru	1,418	567	1,418		6	28	40	51	57	68	91	100	109	127	145
75		Rutan Klas IIB Dumai	566	198	566		2	10	14	18	20	24	32	35	38	44	51
76		LP Klas IIA Tembilahan	378	95	378		1	5	7	9	9	11	15	17	18	21	24
77		LP Klas IIB Bengkalis	481	144	481		1	7	10	13	14	17	23	25	28	32	37
78		Lapas Klas IIB Bangkinang	473	142	473		1	7	10	13	14	17	23	25	27	32	36
			3,316	**1,146**	**3,316**		**11**	**57**	**80**	**103**	**115**	**138**	**183**	**202**	**220**	**257**	**293**

Lampiran 3a : Kegiatan Program: Terapi-Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba (Lanjutan)

No	Provinsi	UPT	Populasi Napi/Tahanan		Pelayanan Admisi dan Orientasi	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Terapi dan Rehabilitasi											
						Gakkum/Bimkum	Terapi dan rehabilitasi psiko-sosial, adiksi dan ketergantungan Narkotika										
			Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika		Sidak/ p'geledahan rutin per tahun	Terapi Kondisi Darurat (Target setiap tahun)	Terapi Rawat Jalan/Terapi P'cegahan Relaps/ Terapi Pasca Perawatan (Target Kumulatif)					Teurapic Community/Creminon (Target Kumulatif)				
					100%		1%	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
79	**Babel (12)**	LP Klas IIA Pangkalpinang	365	147	365	Setiap Lapas/Rutan melakukan sidak/ penggeledahan sedikitnya sekali sebulan dirangkai dengan KIE terkait penegakan dan pembimbingan hukum	1	7	10	13	15	18	24	26	28	33	38
80		Lapas Klas IIB Sungai Liat	290	49	290		1	2	3	4	5	6	8	9	9	11	13
			655	**196**	**655**		**2**	**9**	**14**	**18**	**20**	**24**	**31**	**35**	**38**	**44**	**50**
81	**Jambi (13)**	LP Klas IIA Jambi	934	217	934		2	11	15	20	22	26	35	38	42	49	56
82		LP Klas IIA Kuala Tungkal	323	47	323		1	2	3	4	5	6	8	8	9	11	12
			1,257	**264**	**1,257**		**3**	**13**	**18**	**24**	**26**	**32**	**42**	**46**	**51**	**59**	**68**
83	**Lampung (14)**	LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung	354	336	354		3	17	24	30	34	40	54	59	65	75	86
84		Lapas Klas I Bandar Lampung	799	160	799		2	8	11	14	16	19	26	28	31	36	41
85		Rutan Klas I Bandar Lampung	573	201	573		2	10	14	18	20	24	32	35	39	45	51
			1,726	**697**	**1,726**		**7**	**35**	**49**	**63**	**70**	**84**	**111**	**123**	**134**	**156**	**178**
86	**Sumsel (15)**	LP Klas I Palembang	1,065	426	1,065		4	21	30	38	43	51	68	75	82	95	109
87		Rutan Klas I Palembang	988	395	988		4	20	28	36	40	47	63	70	76	89	101
88		LP Klas IIA Narkotika Lubuk Linggau	128	128	128		1	6	9	12	13	15	20	23	25	29	33
			2,181	**949**	**2,181**		**9**	**47**	**66**	**85**	**95**	**114**	**152**	**167**	**182**	**213**	**243**
89	**Kalbar (16)**	LP Klas IIA Pontianak	445	134	445		1	7	9	12	13	16	21	23	26	30	34
90		Rutan Klas IIA Pontianak	597	179	597		2	9	13	16	18	21	29	32	34	40	46
			1,042	**313**	**1,042**		**3**	**16**	**22**	**28**	**31**	**38**	**50**	**55**	**60**	**70**	**80**
91	**Kaltim (17)**	Rutan Klas IIA Samarinda	809	324	809		3	16	23	29	32	39	52	57	62	72	83
92		LP Klas IIA Samarinda	563	507	563		5	25	35	46	51	61	81	89	97	114	130
93		Rutan Klas IIA Balikpapan	504	202	504		2	10	14	18	20	24	32	35	39	45	52
94		Lapas Klas IIB Tenggarong	778	156	778		2	8	11	14	16	19	25	27	30	35	40
95		LP Klas IIA Tarakan	635	159	635		2	8	11	14	16	19	25	28	30	36	41
			3,289	**1,346**	**3,289**		**13**	**67**	**94**	**121**	**135**	**162**	**215**	**237**	**258**	**302**	**345**
96	**Kalsel (18)**	LP Klas IIA Banjarmasin	1,066	533	1,066		5	27	37	48	53	64	85	94	102	119	136
97		LP Klas IIA Anak Martapura	544	163	544		2	8	11	15	16	20	26	29	31	37	42
			1,610	**696**	**1,610**		**7**	**35**	**49**	**63**	**70**	**84**	**111**	**123**	**134**	**156**	**178**
98	**Sulsel (19)**	Rutan Klas I Makassar	823	329	823		3	16	23	30	33	40	53	58	63	74	84
99		LP Klas I Makassar	499	-	499		1	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
100		LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa	247	235	247		2	12	16	21	23	28	38	41	45	53	60
			1,569	**564**	**1,569**		**6**	**28**	**39**	**51**	**56**	**68**	**90**	**99**	**108**	**126**	**144**
101	**NTB (20)**	LP Klas IIA Mataram	436	174	436		2	9	12	16	17	21	28	31	33	39	45
			436	**174**	**436**		**2**	**9**	**12**	**16**	**17**	**21**	**28**	**31**	**33**	**39**	**45**
	Total target Napi/tahanan di Lapas/Rutan prioritas		**82,023**	**36,118**	**82,023**	**-**	**364**	**1,806**	**2,528**	**3,251**	**3,612**	**4,334**	**5,779**	**6,357**	**6,935**	**8,090**	**9,246**
	Total populasi Napi/tahanan di Indonesia		**131,115**	**38,427**													
	Prosentase		**63**	**94**													

Lampiran 3b : Kegiatan Program: Terapi-Rehabilitasi Medik Penyalahgunaan Narkoba

No	Provinsi	UPT	Populasi Napi/Tahanan		Terapi Medik Penyalahguna Narkotika									
					Detoksifikasi					PTRM				
			Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	**Jawa Barat (1)**	LP Klas IIA Banceuy Bandung	1,027	985	24	26	28	30	33	30	32	35	37	39
2		LP Klas IIA Tasikmalaya	511	71	2	2	2	2	2					
3		LP Klas IIB Sukabumi	641	110	3	3	3	3	4					
4		LP Klas IIA Narkotika Gintung	1,191	1,191	29	31	33	36	40	36	38	43	45	48
5		LP Klas IIA Bogor	2,039	714	17	19	20	21	24					
6		Rutan Klas I Bandung	2,107	1,054	25	27	29	32	36			32	36	40
7		LP Klas IIA Bekasi	1,795	808	19	21	23	24	27					
8		LP Klas IIA Karawang	800	144	3	4	4	4	5					
9		LP Klas IIA Kuningan	499	95	2	2	3	3	3					
10		LP Klas IIB Cianjur	726	138	3	4	4	4	5					
11		LP Klas IIA Subang	678	129	3	3	4	4	4					
12		Rutan Klas I Cirebon	585	146	4	4	4	4	5					
13		LP Klas I Sukamiskin	458	5	0	0	0	0	0					
14		LP Klas I Cirebon	548	27	1	1	1	1	1					
			13,605	**5,616**	**135**	**146**	**157**	**168**	**191**					
15	**DKI Jkt (2)**	LP Klas I Cipinang	3,207	1,122	27	29	31	34	38	34	36	40	43	45
16		Rutan Klas I Cipinang	1,300	780	19	20	22	23	27					
17		LP Klas II A Narkotik Cipinang	2,473	2,424	58	63	68	73	82	73	78	87	92	97
18		Rutan Kls 1 Jak Pus (Salemba)	3,605	2,163	52	56	61	65	74	65	69	78	82	87
19		LP Klas IIA Jakpus (Salemba)	850	255	6	7	7	8	9					
20		Rutan Kls IIA Jak Timur (Pondok Bambu)	1,569	941	23	24	26	28	32	28	30	34	36	38
			13,004	**7,685**	**184**	**200**	**215**	**231**	**261**					
21	**Banten (3)**	LP klas I Tanggerang	1,739	696	17	18	19	21	24					
22		LP Klas IIA Pemuda Tanggerang	3,310	1,986	48	52	56	60	68		60	64	71	75
23		LP Klas IIA Wanita Tanggerang	425	170	4	4	5	5	6			5	6	6
24		LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang	253	63	2	2	2	2	2					
25		LP Klas IIA Serang	854	85	2	2	2	3	3					
26		Rutan Klas IIA Serang	448	90	2	2	3	3	3					
			7,029	**3,090**	**74**	**80**	**87**	**93**	**105**					
27	**Jawa Timur (4)**	LP Klas I Madiun	926	741	18	19	21	22	25		22	24	27	30
28		LP Klas IIA Narkotika Pamekasan	730	584	14	15	16	18	20					
29		LP Klas I Malang	1,379	552	13	14	15	17	19	17	18	20	21	22
30		LP Klas IIA Kediri	704	176	4	5	5	5	6					
31		Rutan Klas I Surabaya	1,780	1,246	30	32	35	37	42	37	40	45	47	50
32		LP Klas IIA Sidoarjo	641	256	6	7	7	8	9					
33		LP Tulungagung	391	78	2	2	2	2	3					
34		LP Mojokerto	411	82	2	2	2	2	3					
35		LP Klas IIA Wanita Malang	289	87	2	2	2	3	3					
36		LP Klas I Surabaya (Porong)	1,800	810	19	21	23	24	28					
37		Lapas Klas IIA Jember	804	161	4	4	5	5	5					
38		Rutan Klas II Bangil	437	66	2	2	2	2	2					
39		Lapas Klas IIB Blitar	467	70	2	2	2	2	2					
40		Lapas Klas IIB Banyuwangi	906	272	7	7	8	8	9					
			11,665	**5,180**	**124**	**135**	**145**	**155**	**176**					
41	**Sumatera Utara (5)**	LP Klas I Medan	1,753	701	17	18	20	21	24					
42		Rutan Klas I Medan	2,487	1,492	36	39	42	45	51	45	48	54	57	60
43		LP Klas IIA Anak Medan	768	307	7	8	9	9	10					
44		LP Klas IIA Wanita Medan	397	159	4	4	4	5	5					
45		LP Klas IIA Pematang Siantar	787	512	12	13	14	15	17					
46		Rutan Klas IIA Labuhan Deli	575	345	8	9	10	10	12					
47		LP Klas IIB Lubuk Pakam	935	187	4	5	5	6	6					
48		LP Klas IIA Binjai	897	404	10	10	11	12	14					
49		LP Klas IIA Rantau Prapat	718	144	3	4	4	4	5					
			9,317	**4,250**	**102**	**111**	**119**	**128**	**145**					
50	**Jawa Tengah (6)**	LP Klas IIA Besi Nusakambangan	320	144	3	4	4	4	5					
51		LP Klas I Semarang	781	195	5	5	5	6	7		6	7	7	8
52		LP Khusus Narkotika Klas IIA NK	140	140	3	4	4	4	5					
53		Rutan Klas I Surakarta	533	213	5	6	6	6	7					
54		LP Klas IIA Pekalongan	748	337	8	9	9	10	11					
55		Rutan Klas IIA Pekalongan	302	91	2	2	3	3	3					
56		LP Klas IIA Magelang	422	63	2	2	2	2	2					
57		Lapas Klas I Batu NK	178	18	0	0	0	1	1					
58		Lapas Klas IIA Purwokerto	353	141	3	4	4	4	5					
59		Lapas Klas IIA Pasirputih NK	268	180	4	5	5	5	6					
60		Lapas Klas IIB Cilacap	449	157	4	4	4	5	5					
61		Lapas Klas IIB Tegal	235	82	2	2	2	2	3					
62		Lapas Klas IIA Wanita Semarang	129	45	1	1	1	1	2					
			4,858	**1,807**	**43**	**47**	**51**	**54**	**61**					
63	**Kepri (7)**	LP Klas IIA Batam	1,294	647	16	17	18	19	22					
64		Rutan klas II Batam	727	160	4	4	4	5	5					
65		LP Klas IIA Tanjung Pinang	537	188	5	5	5	6	6					
66		Rutan Klas IIA Tanjungbalai Karimun	409	143	3	4	4	4	5					
			2,967	**1,138**	**27**	**30**	**32**	**34**	**39**					
67	**DIY (8)**	LP Kelas II A Yogyakarta	350	-	0	0	0	0	0					
68		LP Kelas II B Sleman	309	62	1	2	2	2	2					
69		Rutan Klas II Yogyakarta	137	15	0	0	0	0	1					
70		LP Klas IIA Narkotika Yogyakarta	173	173	4	4	5	5	6		6	6	7	7
			969	**250**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**					
71	**Bali (9)**	LP Klas IIA Denpasar	821	493	12	13	14	15	17	15	16	18	19	20
72		Rutan Klas IIB Bangli	92	18	0	0	1	1	1					
			913	**511**	**12**	**13**	**14**	**15**	**17**					
73	**Sumbar (10)**	LP Klas IIA Padang	615	246	6	6	7	7	8					
			615	**246**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**					
74	**Riau (11)**	LP Klas IIA Pekan Baru	1,418	567	14	15	16	17	19					
75		Rutan Klas IIB Dumai	566	198	5	5	6	6	7					
76		LP Klas IIA Tembilahan	378	95	2	2	3	3	3					
77		LP Klas IIB Bengkalis	481	144	3	4	4	4	5					
78		Lapas Klas IIB Bangkinang	473	142	3	4	4	4	5					
			3,316	**1,146**	**28**	**30**	**32**	**34**	**39**					

Lampiran 3b : Kegiatan Program: Terapi-Rehabilitasi Medik Penyalahgunaan Narkoba (Lanjutan)

No	Provinsi	UPT	Populasi Napi/Tahanan		Terapi Medik Penyalahguna Narkotika									
					Detoksifikasi					PTRM				
			Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
79	**Babel (12)**	LP Klas IIA Pangkalpinang	365	147	4	4	4	4	5					
80		Lapas Klas IIB Sungai Liat	290	49	1	1	1	1	2					
			655	**196**	**5**	**5**	**5**	**6**	**7**					
81	**Jambi (13)**	LP Klas IIA Jambi	934	217	5	6	6	7	7					
82		LP Klas IIA Kuala Tungkal	323	47	1	1	1	1	2					
			1,257	**264**	**6**	**7**	**7**	**8**	**9**					
83	**Lampung (14)**	LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung	354	336	8	9	9	10	11					
84		Lapas Klas I Bandar Lampung	799	160	4	4	4	5	5					
85		Rutan Klas I Bandar Lampung	573	201	5	5	6	6	7					
			1,726	**697**	**17**	**18**	**20**	**21**	**24**					
86	**Sumsel (15)**	LP Klas I Palembang	1,065	426	10	11	12	13	14					
87		Rutan Klas I Palembang	988	395	9	10	11	12	13					
88		LP Klas IIA Narkotika Lubuk Linggau	128	128	3	3	4	4	4					
			2,181	**949**	**23**	**25**	**27**	**28**	**32**					
89	**Kalbar (16)**	LP Klas IIA Pontianak	445	134	3	3	4	4	5					
90		Rutan Klas IIA Pontianak	597	179	4	5	5	5	6					
			1,042	**313**	**8**	**8**	**9**	**9**	**11**					
91	**Kaltim (17)**	Rutan Klas IIA Samarinda	809	324	8	8	9	10	11					
92		LP Klas IIA Samarinda	563	507	12	13	14	15	17					
93		Rutan Klas IIA Balikpapan	504	202	5	5	6	6	7					
94		Lapas Klas IIB Tenggarong	778	156	4	4	4	5	5					
95		LP Klas IIA Tarakan	635	159	4	4	4	5	5					
			3,289	**1,346**	**32**	**35**	**38**	**40**	**46**					
96	**Kalsel (18)**	LP Klas IIA Banjarmasin	1,066	533	13	14	15	16	18					
97		LP Klas IIA Anak Martapura	544	163	4	4	5	5	6					
			1,610	**696**	**17**	**18**	**19**	**21**	**24**					
98	**Sulsel (19)**	Rutan Klas I Makassar	823	329	8	9	9	10	11					
99		LP Klas I Makassar	499	-	0	0	0	0	0					
100		LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa	247	235	6	6	7	7	8			8	9	9
			1,569	**564**	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**					
101	**NTB (20)**	LP Klas IIA Mataram	436	174	4	5	5	5	6					
			436	**174**	**4**	**5**	**5**	**5**	**6**					
	Total target Napi/tahanan di Lapas/Rutan prioritas		**82,023**	**36,118**	**867**	**939**	**1,011**	**1,084**	**1,228**	**410**	**497**	**600**	**642**	**680**
	Total populasi Napi/tahanan di Indonesia		**131,115**	**38,427**										
		Prosentase	**63**	**94**										

Lampiran 4a : Kegiatan Program KIE HIV-AIDS dan Bahaya Narkoba

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	KIE tentang HIV-AIDS, IO, dan Bahaya Narkotika (Target Kumulatif)				
					2010	2011	2012	2013	2014
1	**Jawa Barat (1)**	LP Klas IIA Banceuy Bandung	1,027	985	462	616	770	822	924
2		LP Klas IIA Tasikmalaya	511	71	230	307	383	409	460
3		LP Klas IIB Sukabumi	641	110	288	385	481	513	577
4		LP Klas IIA Narkotika Gintung	1,191	1,191	536	715	893	953	1,072
5		LP Klas IIA Bogor	2,039	714	918	1,223	1,529	1,631	1,835
6		Rutan Klas I Bandung	2,107	1,054	948	1,264	1,580	1,686	1,896
7		LP Klas IIA Bekasi	1,795	808	808	1,077	1,346	1,436	1,616
8		LP Klas IIA Karawang	800	144	360	480	600	640	720
9		LP Klas IIA Kuningan	499	95	225	299	374	399	449
10		LP Klas IIB Cianjur	726	138	327	436	545	581	653
11		LP Klas IIA Subang	678	129	305	407	509	542	610
12		Rutan Klas I Cirebon	585	146	263	351	439	468	527
13		LP Klas I Sukamiskin	458	5	206	275	344	366	412
14		LP Klas I Cirebon	548	27	247	329	411	438	493
			13,605	**5,616**	**6,122**	**8,163**	**10,204**	**10,884**	**12,245**
15	**DKI Jkt (2)**	LP Klas I Cipinang	3,207	1,122	1,443	1,924	2,405	2,566	2,886
16		Rutan Klas I Cipinang	1,300	780	585	780	975	1,040	1,170
17		LP Klas II A Narkotik Cipinang	2,473	2,424	1,113	1,484	1,855	1,978	2,226
18		Rutan Kls 1 Jak Pus (Salemba)	3,605	2,163	1,622	2,163	2,704	2,884	3,245
19		LP Klas IIA Jakpus (Salemba)	850	255	383	510	638	680	765
20		Rutan Kls IIA Jak Timur (Pondok Bambu)	1,569	941	706	941	1,177	1,255	1,412
			13,004	**7,685**	**5,852**	**7,802**	**9,753**	**10,403**	**11,704**
21	**Banten (3)**	LP klas I Tanggerang	1,739	696	783	1,043	1,304	1,391	1,565
22		LP Klas IIA Pemuda Tanggerang	3,310	1,986	1,490	1,986	2,483	2,648	2,979
23		LP Klas IIA Wanita Tanggerang	425	170	191	255	319	340	383
24		LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang	253	63	114	152	190	202	228
25		LP Klas IIA Serang	854	85	384	512	641	683	769
26		Rutan Klas IIA Serang	448	90	202	269	336	358	403
			7,029	**3,090**	**3,163**	**4,217**	**5,272**	**5,623**	**6,326**
27	**Jawa Timur (4)**	LP Klas I Madiun	926	741	417	556	695	741	833
28		LP Klas IIA Narkotika Pamekasan	730	584	329	438	548	584	657
29		LP Klas I Malang	1,379	552	621	827	1,034	1,103	1,241
30		LP Klas IIA Kediri	704	176	317	422	528	563	634
31		Rutan Klas I Surabaya	1,780	1,246	801	1,068	1,335	1,424	1,602
32		LP Klas IIA Sidoarjo	641	256	288	385	481	513	577
33		LP Tulungagung	391	78	176	235	293	313	352
34		LP Mojokerto	411	82	185	247	308	329	370
35		LP Klas IIA Wanita Malang	289	87	130	173	217	231	260
36		LP Klas I Surabaya (Porong)	1,800	810	810	1,080	1,350	1,440	1,620
37		Lapas Klas IIA Jember	804	161	362	482	603	643	724
38		Rutan Klas II Bangil	437	66	197	262	328	350	393
39		Lapas Klas IIB Blitar	467	70	210	280	350	374	420
40		Lapas Klas IIB Banyuwangi	906	272	408	544	680	725	815
			11,665	**5,180**	**5,249**	**6,999**	**8,749**	**9,332**	**10,499**
41	**Sumatera Utara (5)**	LP Klas I Medan	1,753	701	789	1,052	1,315	1,402	1,578
42		Rutan Klas I Medan	2,487	1,492	1,119	1,492	1,865	1,990	2,238
43		LP Klas IIA Anak Medan	768	307	346	461	576	614	691
44		LP Klas IIA Wanita Medan	397	159	179	238	298	318	357
45		LP Klas IIA Pematang Siantar	787	512	354	472	590	630	708
46		Rutan Klas IIA Labuhan Deli	575	345	259	345	431	460	518
47		LP Klas IIB Lubuk Pakam	935	187	421	561	701	748	842
48		LP Klas IIA Binjai	897	404	404	538	673	718	807
49		LP Klas IIA Rantau Prapat	718	144	323	431	539	574	646
			9,317	**4,250**	**4,193**	**5,590**	**6,988**	**7,454**	**8,385**
50	**Jawa Tengah (6)**	LP Klas IIA Besi Nusakambangan	320	144	144	192	240	256	288
51		LP Klas I Semarang	781	195	351	469	586	625	703
52		LP Khusus Narkotika Klas IIA NK	140	140	63	84	105	112	126
53		Rutan Klas I Surakarta	533	213	240	320	400	426	480
54		LP Klas IIA Pekalongan	748	337	337	449	561	598	673
55		Rutan Klas IIA Pekalongan	302	91	136	181	227	242	272
56		LP Klas IIA Magelang	422	63	190	253	317	338	380
57		Lapas Klas I Batu NK	178	18	80	107	134	142	160
58		Lapas Klas IIA Purwokerto	353	141	159	212	265	282	318
59		Lapas Klas IIA Pasirputih NK	268	180	121	161	201	214	241
60		Lapas Klas IIB Cilacap	449	157	202	269	337	359	404
61		Lapas Klas IIB Tegal	235	82	106	141	176	188	212
62		Lapas Klas IIA Wanita Semarang	129	45	58	77	97	103	116
			4,858	**1,807**	**2,186**	**2,915**	**3,644**	**3,886**	**4,372**
63	**Kepri (7)**	LP Klas IIA Batam	1,294	647	582	776	971	1,035	1,165
64		Rutan klas II Batam	727	160	327	436	545	582	654
65		LP Klas IIA Tanjung Pinang	537	188	242	322	403	430	483
66		Rutan Klas IIA Tanjungbalai Karimun	409	143	184	245	307	327	368
			2,967	**1,138**	**1,335**	**1,780**	**2,225**	**2,374**	**2,670**
67	**DIY (8)**	LP Kelas II A Yogyakarta	350	-	158	210	263	280	315
68		LP Kelas II B Sleman	309	62	139	185	232	247	278
69		Rutan Klas II Yogyakarta	137	15	62	82	103	110	123
70		LP Klas IIA Narkotika Yogyakarta	173	173	78	104	130	138	156
			969	**250**	**436**	**581**	**727**	**775**	**872**
71	**Bali (9)**	LP Klas IIA Denpasar	821	493	369	493	616	657	739
72		Rutan Klas IIB Bangli	92	18	41	55	69	74	83
			913	**511**	**411**	**548**	**685**	**730**	**822**

Lampiran 4a : Kegiatan Program KIE HIV-AIDS dan Bahaya Narkoba (Lanjutan)

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	KIE tentang HIV-AIDS, IO, dan Bahaya Narkotika (Target Kumulatif)				
					2010	2011	2012	2013	2014
73	**Sumbar (10)**	LP Klas IIA Padang	615	246	277	369	461	492	554
			615	**246**	**277**	**369**	**246**	**492**	**554**
74	**Riau (11)**	LP Klas IIA Pekan Baru	1,418	567	638	851	1,064	1,134	1,276
75		Rutan Klas IIB Dumai	566	198	255	340	425	453	509
76		LP Klas IIA Tembilahan	378	95	170	227	284	302	340
77		LP Klas IIB Bengkalis	481	144	216	289	361	385	433
78		Lapas Klas IIB Bangkinang	473	142	213	284	355	378	426
			3,316	**1,146**	**1,492**	**1,990**	**2,487**	**2,653**	**2,984**
79	**Babel (12)**	LP Klas IIA Pangkalpinang	365	147	164	219	274	292	329
80		Lapas Klas IIB Sungai Liat	290	49	131	174	218	232	261
			655	**196**	**295**	**393**	**491**	**524**	**590**
81	**Jambi (13)**	LP Klas IIA Jambi	934	217	420	560	701	747	841
82		LP Klas IIA Kuala Tungkal	323	47	145	194	242	258	291
			1,257	**264**	**566**	**754**	**943**	**1,006**	**1,131**
83	**Lampung (14)**	LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung	354	336	159	212	266	283	319
84		Lapas Klas I Bandar Lampung	799	160	360	479	599	639	719
85		Rutan Klas I Bandar Lampung	573	201	258	344	430	458	516
			1,726	**697**	**777**	**1,036**	**1,295**	**1,381**	**1,553**
86	**Sumsel (15)**	LP Klas I Palembang	1,065	426	479	639	799	852	959
87		Rutan Klas I Palembang	988	395	445	593	741	790	889
88		LP Klas IIA Narkotika Lubuk Linggau	128	128	58	77	96	102	115
			2,181	**949**	**981**	**1,309**	**1,636**	**1,745**	**1,963**
89	**Kalbar (16)**	LP Klas IIA Pontianak	445	134	200	267	334	356	401
90		Rutan Klas IIA Pontianak	597	179	269	358	448	478	537
			1,042	**313**	**469**	**625**	**782**	**834**	**938**
91	**Kaltim (17)**	Rutan Klas IIA Samarinda	809	324	364	485	607	647	728
92		LP Klas IIA Samarinda	563	507	253	338	422	450	507
93		Rutan Klas IIA Balikpapan	504	202	227	302	378	403	454
94		Lapas Klas IIB Tenggarong	778	156	350	467	584	622	700
95		LP Klas IIA Tarakan	635	159	286	381	476	508	572
			3,289	**1,346**	**1,480**	**1,973**	**2,467**	**2,631**	**2,960**
96	**Kalsel (18)**	LP Klas IIA Banjarmasin	1,066	533	480	640	800	853	959
97		LP Klas IIA Anak Martapura	544	163	245	326	408	435	490
			1,610	**696**	**725**	**966**	**1,208**	**1,288**	**1,449**
98	**Sulsel (19)**	Rutan Klas I Makassar	823	329	370	494	617	658	741
99		LP Klas I Makassar	499	-	225	299	374	399	449
100		LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa	247	235	111	148	185	198	222
			1,569	**564**	**706**	**941**	**1,177**	**1,255**	**1,412**
101	**NTB (20)**	LP Klas IIA Mataram	436	174	196	262	327	349	392
		Sub total Nusa Tenggara Barat	**436**	**174**	**196**	**262**	**174**	**196**	**262**
		Total target Napi/tahanan di Lapas/Rutan prioritas	**82,023**	**36,118**	**34,641**	**46,189**	**61,533**	**61,533**	**61,533**
		Total populasi Napi/tahanan di Indonesia	**131,115**	**38,427**					
		Prosentase	**63**	**94**					

Lampiran 4b : Kegiatan Material dan Fasilitas Pencegahan Penularan HIV dan IO

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	Material/Fasilitas Pencegahan Penularan HIV dan IO							
					Kondom					Bleach	Kesling	K3
					2010	2011	2012	2013	2014	30% Lapas hingga akhir tahun 2014	50% Lapas hingga akhir tahun 2014	50% Lapas hingga akhir tahun 2014
1	**Jawa Barat (1)**	LP Klas IIA Banceuy Bandung	1,027	985	103	154	185	205	257	30	V	V
2		LP Klas IIA Tasikmalaya	511	71								
3		LP Klas IIB Sukabumi	641	110								
4		LP Klas IIA Narkotika Gintung	1,191	1,191	119	179	214	238	298	36	V	V
5		LP Klas IIA Bogor	2,039	714		204	306	367	408	21	V	V
6		Rutan Klas I Bandung	2,107	1,054			211	316	379	32	V	V
7		LP Klas IIA Bekasi	1,795	808			180	269	323	24	V	V
8		LP Klas IIA Karawang	800	144			80	120	144		V	V
9		LP Klas IIA Kuningan	499	95								
10		LP Klas IIB Cianjur	726	138								
11		LP Klas IIA Subang	678	129			68	102	122			
12		Rutan Klas I Cirebon	585	146								
13		LP Klas I Sukamiskin	458	5								
14		LP Klas I Cirebon	548	27			55	82	99			
			13,605	**5,616**	**222**	**537**	**1,298**	**1,700**	**2,029**	**143**		
15	**DKI Jkt (2)**	LP Klas I Cipinang	3,207	1,122			321	481	577	34	V	V
16		Rutan Klas I Cipinang	1,300	780		130	195	234	260	23		
17		LP Klas II A Narkotik Cipinang	2,473	2,424	247	371	445	495	618	73	V	V
18		Rutan Kls 1 Jak Pus (Salemba)	3,605	2,163		361	541	649	721	65	V	V
19		LP Klas IIA Jakpus (Salemba)	850	255			85	128	153			
20		Rutan Kls IIA Jak Timur (Pondok Bambu)	1,569	941						28	V	V
			13,004	**7,685**	**247**	**861**	**1,587**	**1,986**	**2,330**	**223**		
21	**Banten (3)**	LP klas I Tanggerang	1,739	696				174	261	20	V	V
22		LP Klas IIA Pemuda Tanggerang	3,310	1,986		331	497	596	662	60	V	V
23		LP Klas IIA Wanita Tanggerang	425	170							V	V
24		LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang	253	63								
25		LP Klas IIA Serang	854	85		85	128	154	171			
26		Rutan Klas IIA Serang	448	90								
			7,029	**3,090**	**-**	**416**	**625**	**923**	**1,094**	**80**		
27	**Jawa Timur (4)**	LP Klas I Madiun	926	741	93	139	167	185	232	22	V	V
28		LP Klas IIA Narkotika Pamekasan	730	584				73	110	18	V	V
29		LP Klas I Malang	1,379	552		138	207	248	276			
30		LP Klas IIA Kediri	704	176								
31		Rutan Klas I Surabaya	1,780	1,246		178	267	320	356	37		
32		LP Klas IIA Sidoarjo	641	256					64		V	V
33		LP Tulungagung	391	78								
34		LP Mojokerto	411	82								
35		LP Klas IIA Wanita Malang	289	87								
36		LP Klas I Surabaya (Porong)	1,800	810			180	270	324	24	V	V
37		Lapas Klas IIA Jember	804	161				80	121		V	V
38		Rutan Klas II Bangil	437	66								
39		Lapas Klas IIB Blitar	467	70								
40		Lapas Klas IIB Banyuwangi	906	272				91	136			
			11,665	**5,180**	**93**	**455**	**821**	**1,268**	**1,617**	**101**		
41	**Sumatera Utara (5)**	LP Klas I Medan	1,753	701		175	263	316	351	21	V	V
42		Rutan Klas I Medan	2,487	1,492	249	373	448	497	622	45	V	V
43		LP Klas IIA Anak Medan	768	307								
44		LP Klas IIA Wanita Medan	397	159							V	
45		LP Klas IIA Pematang Siantar	787	512			79	118	142	15	V	V
46		Rutan Klas IIA Labuhan Deli	575	345								V
47		LP Klas IIB Lubuk Pakam	935	187								
48		LP Klas IIA Binjai	897	404				90	135	12	V	V
49		LP Klas IIA Rantau Prapat	718	144								
			9,317	**4,250**	**249**	**548**	**789**	**1,021**	**1,249**	**93**		
50	**Jawa Tengah (6)**	LP Klas IIA Besi Nusakambangan	320	144								
51		LP Klas I Semarang	781	195	78	117	141	156	195	6	V	V
52		LP Khusus Narkotika Klas IIA NK	140	140		14	21	25	28	4	V	V
53		Rutan Klas I Surakarta	533	213								V
54		LP Klas IIA Pekalongan	748	337					75	10	V	V
55		Rutan Klas IIA Pekalongan	302	91								
56		LP Klas IIA Magelang	422	63								
57		Lapas Klas I Batu NK	178	18								
58		Lapas Klas IIA Purwokerto	353	141			35	53	64		V	V
59		Lapas Klas IIA Pasirputih NK	268	180			27	40	48		V	V
60		Lapas Klas IIB Cilacap	449	157								
61		Lapas Klas IIB Tegal	235	82								
62		Lapas Klas IIA Wanita Semarang	129	45								
			4,858	**1,807**	**78**	**131**	**224**	**275**	**410**	**20**		
63	**Kepri (7)**	LP Klas IIA Batam	1,294	647		129	194	233	259	19	V	V
64		Rutan klas II Batam	727	160			73	109	131		V	V
65		LP Klas IIA Tanjung Pinang	537	188				54	81			
66		Rutan Klas IIA Tanjungbalai Karimun	409	143					41			
			2,967	**1,138**	**-**	**129**	**267**	**396**	**511**	**19**		
67	**DIY (8)**	LP Kelas II A Yogyakarta	350	-				35	53			
68		LP Kelas II B Sleman	309	62								
69		Rutan Klas II Yogyakarta	137	15								
70		LP Klas IIA Narkotika Yogyakarta	173	173	17	26	31	35	43	5	V	V
			969	**250**	**17**	**26**	**31**	**70**	**96**	**5**		
71	**Bali (9)**	LP Klas IIA Denpasar	821	493	82	123	148	164	205	15	V	V
72		Rutan Klas IIB Bangli	92	18								
			913	**511**	**82**	**123**	**148**	**164**	**205**	**15**		
73	**Sumbar (10)**	LP Klas IIA Padang	615	246					62			
			615	**246**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62**	**-**		
74	**Riau (11)**	LP Klas IIA Pekan Baru	1,418	567	142	213	255	284	355	17	V	V
75		Rutan Klas IIB Dumai	566	198							V	V
76		LP Klas IIA Tembilahan	378	95								
77		LP Klas IIB Bengkalis	481	144								
78		Lapas Klas IIB Bangkinang	473	142								
			3,316	**1,146**	**142**	**213**	**255**	**284**	**355**	**17**		
79	**Babel (12)**	LP Klas IIA Pangkalpinang	365	147							V	V
80		Lapas Klas IIB Sungai Liat	290	49							V	
			655	**196**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Lampiran 4b : Kegiatan Material dan Fasilitas Pencegahan Penularan HIV dan IO (Lanjutan)

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	Material/Fasilitas Pencegahan Penularan HIV dan IO							
					Kondom					Bleach	Kesling	K3
					2010	2011	2012	2013	2014	30% Lapas hingga akhir tahun 2014	50% Lapas hingga akhir tahun 2014	50% Lapas hingga akhir tahun 2014
81	**Jambi (13)**	LP Klas IIA Jambi	934	217			93	140	168		V	V
82		LP Klas IIA Kuala Tungkal	323	47								
			1,257	**264**	-	-	**93**	**140**	**168**	-		
83	**Lampung (14)**	LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung	354	336		35	53	64	71	10	V	V
84		Lapas Klas I Bandar Lampung	799	160				80	120		V	V
85		Rutan Klas I Bandar Lampung	573	201			57	86	103		V	V
			1,726	**697**	-	**35**	**110**	**230**	**294**	**10**		
86	**Sumsel (15)**	LP Klas I Palembang	1,065	426			107	160	192	13	V	V
87		Rutan Klas I Palembang	988	395		99	148	178	198		V	V
88		LP Klas IIA Narkotika Lubuk Linggau	128	128						4	V	V
			2,181	**949**	-	**99**	**255**	**338**	**389**	**17**		
89	**Kalbar (16)**	LP Klas IIA Pontianak	445	134				45	67	4	V	V
90		Rutan Klas IIA Pontianak	597	179			60	90	107		V	V
			1,042	**313**	-	-	**60**	**134**	**174**	**4**		
91	**Kaltim (17)**	Rutan Klas IIA Samarinda	809	324		81	121	146	162		V	V
92		LP Klas IIA Samarinda	563	507				56	84	15	V	V
93		Rutan Klas IIA Balikpapan	504	202			50	76	91		V	V
94		Lapas Klas IIB Tenggarong	778	156							V	V
95		LP Klas IIA Tarakan	635	159								
			3,289	**1,346**	-	**81**	**172**	**278**	**337**	**15**		
96	**Kalsel (18)**	LP Klas IIA Banjarmasin	1,066	533			107	160	192	16	V	V
97		LP Klas IIA Anak Martapura	544	163							V	
			1,610	**696**	-	-	**107**	**160**	**192**	**16**		
98	**Sulsel (19)**	Rutan Klas I Makassar	823	329		82	123	148	165	10	V	V
99		LP Klas I Makassar	499	-								V
100		LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa	247	235			25	37	44	7	V	V
			1,569	**564**	-	**82**	**148**	**185**	**209**	**17**		
101	**NTB (20)**	LP Klas IIA Mataram	436	174							V	V
			436	**174**	-	-	-	-	-	-		
		Total target Napi/tahanan di Lapas/Rutan prioritas	**82,023**	**36,118**	**988**	**3,489**	**6,623**	**9,036**	**11,071**	**768**	**51 LP/RTN**	**51 LP/RTN**
		Total populasi Napi/tahanan di Indonesia	**131,115**	**38,427**								
		Prosentase	**63**	**94**								

Lampiran 4c : Kegiatan Program VCT/PICT dan CST

NO.	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	Layanan VCT/PICT, dan CST														
					VCT/ PICT					ARV/IO					Dukungan dan Perawatan ODHA (termasuk MK dan KDS)				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	**Jawa Barat (1)**	LP Klas IIA Banceuy Bandung	1,027	985	185	197	210	234	246	5	6	7	11	12	28	30	32	35	37
2		LP Klas IIA Tasikmalaya	511	71	92	98	104	117	123	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18
3		LP Klas IIB Sukabumi	641	110	115	123	131	146	154	3	4	5	7	8	17	19	20	22	23
4		LP Klas IIA Narkotika Gintung	1,191	1,191	214	229	243	272	286	5	7	9	12	14	32	35	38	40	43
5		LP Klas IIA Bogor	2,039	714	367	391	416	465	489	9	12	15	21	24	55	60	64	69	73
6		Rutan Klas I Bandung	2,107	1,054	379	405	430	480	506	9	12	15	22	25	57	62	66	71	76
7		LP Klas IIA Bekasi	1,795	808	323	345	366	409	431	8	10	13	18	22	48	53	57	61	65
8		LP Klas IIA Karawang	800	144	144	154	163	182	192	4	5	6	8	10	22	23	25	27	29
9		LP Klas IIA Kuningan	499	95	90	96	102	114	120	2	3	4	5	6	13	15	16	17	18
10		LP Klas IIB Cianjur	726	138	131	139	148	166	174	3	4	5	7	9	20	21	23	25	26
11		LP Klas IIA Subang	678	129	122	130	138	155	163	3	4	5	7	8	18	20	21	23	24
12		Rutan Klas I Cirebon	585	146	105	112	119	133	140	3	3	4	6	7	16	17	18	20	21
13		LP Klas I Sukamiskin	458	5	82	88	93	104	110	2	3	3	5	5	12	13	14	15	16
14		LP Klas I Cirebon	548	27	99	105	112	125	132	2	3	4	6	7	15	16	17	18	20
			13,605	**5,616**	**2,449**	**2,612**	**2,775**	**3,102**	**3,265**	**61**	**78**	**97**	**140**	**163**	**367**	**398**	**429**	**459**	**490**
15	**DKI Jkt (2)**	LP Klas I Cipinang	3,207	1,122	577	616	654	731	770	14	18	23	33	38	87	94	101	108	115
16		Rutan Klas I Cipinang	1,300	780	234	250	265	296	312	6	7	9	13	16	35	38	41	44	47
17		LP Klas II A Narkotik Cipinang	2,473	2,424	445	475	504	564	594	11	14	18	25	30	67	72	78	83	89
18		Rutan Kls 1 Jak Pus (Salemba)	3,605	2,163	649	692	735	822	865	16	21	26	37	43	97	105	114	122	130
19		LP Klas IIA Jakpus (Salemba)	850	255	153	163	173	194	204	4	5	6	9	10	23	25	27	29	31
20		Rutan Kls IIA Jak Timur (Pondok Bambu)	1,569	941	282	301	320	358	377	7	9	11	16	19	42	46	49	53	56
			13,004	**7,685**	**2,341**	**2,497**	**2,653**	**2,965**	**3,121**	**59**	**75**	**93**	**133**	**156**	**351**	**380**	**410**	**439**	**468**
21	**Banten (3)**	LP klas I Tanggerang	1,739	696	313	334	355	396	417	8	10	12	18	21	47	51	55	59	63
22		LP Klas IIA Pemuda Tanggerang	3,310	1,986	596	636	675	755	794	15	19	24	34	40	89	97	104	112	119
23		LP Klas IIA Wanita Tanggerang	425	170	77	82	87	97	102	2	2	3	4	5	11	12	13	14	15
24		LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang	253	63	46	49	52	58	61	1	1	2	3	3	7	7	8	9	9
25		LP Klas IIA Serang	854	85	154	164	174	195	205	4	5	6	9	10	23	25	27	29	31
26		Rutan Klas IIA Serang	448	90	81	86	91	102	108	2	3	3	5	5	12	13	14	15	16
			7,029	**3,090**	**1,265**	**1,350**	**1,434**	**1,603**	**1,687**	**32**	**40**	**50**	**72**	**84**	**190**	**206**	**221**	**237**	**253**
27	**Jawa Timur (4)**	LP Klas I Madiun	926	741	167	178	189	211	222	4	5	7	10	11	25	27	29	31	33
28		LP Klas IIA Narkotika Pamekasan	730	584	131	140	149	166	175	3	4	5	7	9	20	21	23	25	26
29		LP Klas I Malang	1,379	552	248	265	281	314	331	6	8	10	14	17	37	40	43	47	50
30		LP Klas IIA Kediri	704	176	127	135	144	161	169	3	4	5	7	8	19	21	22	24	25
31		Rutan Klas I Surabaya	1,780	1,246	320	342	363	406	427	8	10	13	18	21	48	52	56	60	64
32		LP Klas IIA Sidoarjo	641	256	115	123	131	146	154	3	4	5	7	8	17	19	20	22	23
33		LP Tulungagung	391	78	70	75	80	89	94	2	2	3	4	5	11	11	12	13	14
34		LP Mojokerto	411	82	74	79	84	94	99	2	2	3	4	5	11	12	13	14	15
35		LP Klas IIA Wanita Malang	289	87	52	55	59	66	69	1	2	2	3	3	8	8	9	10	10
36		LP Klas I Surabaya (Porong)	1,800	810	324	346	367	410	432	8	10	13	18	22	49	53	57	61	65
37		Lapas Klas IIA Jember	804	161	145	154	164	183	193	4	5	6	8	10	22	24	25	27	29
38		Rutan Klas II Bangil	437	66	79	84	89	100	105	2	3	3	4	5	12	13	14	15	16
39		Lapas Klas IIB Blitar	467	70	84	90	95	106	112	2	3	3	5	6	13	14	15	16	17
40		Lapas Klas IIB Banyuwangi	906	272	163	174	185	207	217	4	5	6	9	11	24	27	29	31	33
			11,665	**5,180**	**2,100**	**2,240**	**2,380**	**2,660**	**2,800**	**52**	**67**	**83**	**120**	**140**	**315**	**341**	**367**	**394**	**420**

Lampiran 4c : Kegiatan Program VCT/PICT dan CST (Lanjutan)

NO.	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	Layanan VCT/PICT, dan CST														
					VCT/ PICT					ARV/IO					Dukungan dan Perawatan ODHA (termasuk MK dan KDS)				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
41	**Sumatera Utara (5)**	LP Klas I Medan	1,753	701	316	337	358	400	421	8	10	13	18	21	47	51	55	59	63
42		Rutan Klas I Medan	2,487	1,492	448	478	507	567	597	11	14	18	26	30	67	73	78	84	90
43		LP Klas IIA Anak Medan	768	307	138	147	157	175	184	3	4	5	8	9	21	22	24	26	28
44		LP Klas IIA Wanita Medan	397	159	71	76	81	91	95	2	2	3	4	5	11	12	13	13	14
45		LP Klas IIA Pematang Siantar	787	512	142	151	161	179	189	4	5	6	8	9	21	23	25	27	28
46		Rutan Klas IIA Labuhan Deli	575	345	104	110	117	131	138	3	3	4	6	7	16	17	18	19	21
47		LP Klas IIB Lubuk Pakam	935	187	168	180	191	213	224	4	5	7	10	11	25	27	29	32	34
48		LP Klas IIA Binjai	897	404	161	172	183	205	215	4	5	6	9	11	24	26	28	30	32
49		LP Klas IIA Rantau Prapat	718	144	129	138	146	164	172	3	4	5	7	9	19	21	23	24	26
			9,317	**4,250**	**1,677**	**1,789**	**1,901**	**2,124**	**2,236**	**42**	**54**	**67**	**96**	**112**	**252**	**273**	**293**	**314**	**335**
50	**Jawa Tengah (6)**	LP Klas IIA Besi Nusakambangan	320	144	58	61	65	73	77	1	2	2	3	4	9	9	10	11	12
51		LP Klas I Semarang	781	195	141	150	159	178	187	4	4	6	8	9	21	23	25	26	28
52		LP Khusus Narkotika Klas IIA NK	140	140	25	27	29	32	34	1	1	1	1	2	4	4	4	5	5
53		Rutan Klas I Surakarta	533	213	96	102	109	122	128	2	3	4	5	6	14	16	17	18	19
54		LP Klas IIA Pekalongan	748	337	135	144	153	171	180	3	4	5	8	9	20	22	24	25	27
55		Rutan Klas IIA Pekalongan	302	91	54	58	62	69	72	1	2	2	3	4	8	9	10	10	11
56		LP Klas IIA Magelang	422	63	76	81	86	96	101	2	2	3	4	5	11	12	13	14	15
57		Lapas Klas I Batu NK	178	18	32	34	36	41	43	1	1	1	2	2	5	5	6	6	6
58		Lapas Klas IIA Purwokerto	353	141	64	68	72	80	85	2	2	3	4	4	10	10	11	12	13
59		Lapas Klas IIA Pasirputih NK	268	180	48	51	55	61	64	1	2	2	3	3	7	8	8	9	10
60		Lapas Klas IIB Cilacap	449	157	81	86	92	102	108	2	3	3	5	5	12	13	14	15	16
61		Lapas Klas IIB Tegal	235	82	42	45	48	54	56	1	1	2	2	3	6	7	7	8	8
62		Lapas Klas IIA Wanita Semarang	129	45	23	25	26	29	31	1	1	1	1	2	3	4	4	4	5
			4,858	**1,807**	**874**	**933**	**991**	**1,108**	**1,166**	**22**	**28**	**35**	**50**	**58**	**131**	**142**	**153**	**164**	**175**
63	**Kepri (7)**	LP Klas IIA Batam	1,294	647	233	248	264	295	311	6	7	9	13	16	35	38	41	44	47
64		Rutan klas II Batam	727	160	131	140	148	166	174	3	4	5	7	9	20	21	23	25	26
65		LP Klas IIA Tanjung Pinang	537	188	97	103	110	122	129	2	3	4	6	6	14	16	17	18	19
66		Rutan Klas IIA Tanjungbalai Karimun	409	143	74	79	83	93	98	2	2	3	4	5	11	12	13	14	15
			2,967	**1,138**	**534**	**570**	**605**	**676**	**712**	**13**	**17**	**21**	**30**	**36**	**80**	**87**	**93**	**100**	**107**
67	**DIY (8)**	LP Kelas II A Yogyakarta	350	-	63	67	71	80	84	2	2	2	4	4	9	10	11	12	13
68		LP Kelas II B Sleman	309	62	56	59	63	70	74	1	2	2	3	4	8	9	10	10	11
69		Rutan Klas II Yogyakarta	137	15	25	26	28	31	33	1	1	1	1	2	4	4	4	5	5
70		LP Klas IIA Narkotika Yogyakarta	173	173	31	33	35	39	42	1	1	1	2	2	5	5	5	6	6
			969	**250**	**174**	**186**	**198**	**221**	**233**	**4**	**6**	**7**	**10**	**12**	**26**	**28**	**31**	**33**	**35**
71	**Bali (9)**	LP Klas IIA Denpasar	821	493	148	158	167	187	197	4	5	6	8	10	22	24	26	28	30
72		Rutan Klas IIB Bangli	92	18	17	18	19	21	22	0	1	1	1	1	2	3	3	3	3
			913	**511**	**164**	**175**	**186**	**208**	**219**	**4**	**5**	**7**	**9**	**11**	**25**	**27**	**29**	**31**	**33**
73	**Sumbar (10)**	LP Klas IIA Padang	615	246	111	118	125	140	148	3	4	4	6	7	17	18	19	21	22
			615	**246**	**111**	**118**	**125**	**140**	**148**	**3**	**4**	**4**	**6**	**7**	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**
74	**Riau (11)**	LP Klas IIA Pekan Baru	1,418	567	255	272	289	323	340	6	8	10	15	17	38	41	45	48	51
75		Rutan Klas IIB Dumai	566	198	102	109	115	129	136	3	3	4	6	7	15	17	18	19	20
76		LP Klas IIA Tembilahan	378	95	68	73	77	86	91	2	2	3	4	5	10	11	12	13	14
77		LP Klas IIB Bengkalis	481	144	87	92	98	110	115	2	3	3	5	6	13	14	15	16	17
78		Lapas Klas IIB Bangkinang	473	142	85	91	96	108	114	2	3	3	5	6	13	14	15	16	17
			3,316	**1,146**	**597**	**637**	**676**	**756**	**796**	**15**	**19**	**24**	**34**	**40**	**90**	**97**	**104**	**112**	**119**

Lampiran 4c : Kegiatan Program VCT/PICT dan CST (Lanjutan)

NO.	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	Layanan VCT/PICT, dan CST														
					VCT/ PICT					ARV/IO					Dukungan dan Perawatan ODHA (termasuk MK dan KDS)				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
79	**Babel (12)**	LP Klas IIA Pangkalpinang	365	147	66	70	74	83	88	2	2	3	4	4	10	11	11	12	13
80		Lapas Klas IIB Sungai Liat	290	49	52	56	59	66	70	1	2	2	3	3	8	8	9	10	10
			655	**196**	**118**	**126**	**134**	**149**	**157**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**18**	**19**	**21**	**22**	**24**
81	**Jambi (13)**	LP Klas IIA Jambi	934	217	168	179	191	213	224	4	5	7	10	11	25	27	29	32	34
82		LP Klas IIA Kuala Tungkal	323	47	58	62	66	74	78	1	2	2	3	4	9	9	10	11	12
			1,257	**264**	**226**	**241**	**256**	**287**	**302**	**6**	**7**	**9**	**13**	**15**	**34**	**37**	**40**	**42**	**45**
83	**Lampung (14)**	LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung	354	336	64	68	72	81	85	2	2	3	4	4	10	10	11	12	13
84		Lapas Klas I Bandar Lampung	799	160	144	153	163	182	192	4	5	6	8	10	22	23	25	27	29
85		Rutan Klas I Bandar Lampung	573	201	103	110	117	131	138	3	3	4	6	7	15	17	18	19	21
			1,726	**697**	**311**	**331**	**352**	**394**	**414**	**8**	**10**	**12**	**18**	**21**	**47**	**50**	**54**	**58**	**62**
86	**Sumsel (15)**	LP Klas I Palembang	1,065	426	192	204	217	243	256	5	6	8	11	13	29	31	34	36	38
87		Rutan Klas I Palembang	988	395	178	190	202	225	237	4	6	7	10	12	27	29	31	33	36
88		LP Klas IIA Narkotika Lubuk Linggau	128	128	23	25	26	29	31	1	1	1	1	2	3	4	4	4	5
			2,181	**949**	**393**	**419**	**445**	**497**	**523**	**10**	**13**	**16**	**22**	**26**	**59**	**64**	**69**	**74**	**79**
89	**Kalbar (16)**	LP Klas IIA Pontianak	445	134	80	85	91	101	107	2	3	3	5	5	12	13	14	15	16
90		Rutan Klas IIA Pontianak	597	179	107	115	122	136	143	3	3	4	6	7	16	17	19	20	21
			1,042	**313**	**188**	**200**	**213**	**238**	**250**	**5**	**6**	**7**	**11**	**13**	**28**	**30**	**33**	**35**	**38**
91	**Kaltim (17)**	Rutan Klas IIA Samarinda	809	324	146	155	165	184	194	4	5	6	8	10	22	24	25	27	29
92		LP Klas IIA Samarinda	563	507	101	108	115	128	135	3	3	4	6	7	15	16	18	19	20
93		Rutan Klas IIA Balikpapan	504	202	91	97	103	115	121	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18
94		Lapas Klas IIB Tenggarong	778	156	140	149	159	177	187	4	4	6	8	9	21	23	25	26	28
95		LP Klas IIA Tarakan	635	159	114	122	130	145	152	3	4	5	7	8	17	19	20	21	23
			3,289	**1,346**	**592**	**631**	**671**	**750**	**789**	**15**	**19**	**23**	**34**	**39**	**89**	**96**	**104**	**111**	**118**
96	**Kalsel (18)**	LP Klas IIA Banjarmasin	1,066	533	192	205	217	243	256	5	6	8	11	13	29	31	34	36	38
97		LP Klas IIA Anak Martapura	544	163	98	104	111	124	131	2	3	4	6	7	15	16	17	18	20
			1,610	**696**	**290**	**309**	**328**	**367**	**386**	**7**	**9**	**11**	**17**	**19**	**43**	**47**	**51**	**54**	**58**
98	**Sulsel (19)**	Rutan Klas I Makassar	823	329	148	158	168	188	198	4	5	6	8	10	22	24	26	28	30
99		LP Klas I Makassar	499	-	90	96	102	114	120	2	3	4	5	6	13	15	16	17	18
100		LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa	247	235	44	47	50	56	59	1	1	2	3	3	7	7	8	8	9
			1,569	**564**	**282**	**301**	**320**	**358**	**377**	**7**	**9**	**11**	**16**	**19**	**42**	**46**	**49**	**53**	**56**
101	**NTB (20)**	LP Klas IIA Mataram	436	174	78	84	89	99	105	2	3	3	4	5	12	13	14	15	16
			436	**174**	**78**	**84**	**89**	**99**	**105**	**2**	**3**	**3**	**4**	**5**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
		Total target Napi/tahanan di Lapas/Rutan prioritas	**82,023**	**36,118**	**13,857**	**14,780**	**15,704**	**17,552**	**18,475**	**346**	**443**	**550**	**790**	**924**	**2,078**	**2,252**	**2,425**	**2,598**	**2,771**
		Total populasi Napi/tahanan di Indonesia	**131,115**	**38,427**															
		Prosentase	**63**	**94**															

Lampiran 4d : Bidang IMS, PEP, dan Perawatan Paliatif AIDS-IO

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	IMS					PEP					Perawatan Paliatif AIDS dan IO				
					10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1	**Jawa Barat (1)**	LP Klas IIA Banceuy Bandung	1,027	985	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2		LP Klas IIA Tasikmalaya	511	71															
3		LP Klas IIB Sukabumi	641	110															
4		LP Klas IIA Narkotika Gintung	1,191	1,191			V	V	V			V	V	V				V	V
5		LP Klas IIA Bogor	2,039	714			V	V	V				V	V					
6		Rutan Klas I Bandung	2,107	1,054															
7		LP Klas IIA Bekasi	1,795	808			V	V	V			V	V	V			V	V	V
8		LP Klas IIA Karawang	800	144															
9		LP Klas IIA Kuningan	499	95															
10		LP Klas IIB Cianjur	726	138															
11		LP Klas IIA Subang	678	129															
12		Rutan Klas I Cirebon	585	146															
13		LP Klas I Sukamiskin	458	5															
14		LP Klas I Cirebon	548	27															
			13,605	**5,616**	**1**	**1**	**4**	**4**	**4**	**1**	**1**	**3**	**4**	**4**	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**
15	**DKI Jkt (2)**	LP Klas I Cipinang	3,207	1,122			V	V	V			V	V	V			V	V	V
16		Rutan Klas I Cipinang	1,300	780				V	V				V	V					
17		LP Klas II A Narkotik Cipinang	2,473	2,424	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
18		Rutan Kls 1 Jak Pus (Salemba)	3,605	2,163										V					
19		LP Klas IIA Jakpus (Salemba)	850	255				V	V				V	V					V
20		Rutan Kls IIA Jak Timur (Pondok Bambu)	1,569	941									V	V					
			13,004	**7,685**	**1**	**1**	**2**	**4**	**4**	**1**	**1**	**2**	**5**	**6**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**
21	**Banten (3)**	LP klas I Tanggerang	1,739	696				V	V				V	V				V	V
22		LP Klas IIA Pemuda Tanggerang	3,310	1,986		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
23		LP Klas IIA Wanita Tanggerang	425	170										V					V
24		LP Klas IIA Anak Pria Tanggerang	253	63															
25		LP Klas IIA Serang	854	85															
26		Rutan Klas IIA Serang	448	90															
			7,029	**3,090**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**
27	**Jawa Timur (4)**	LP Klas I Madiun	926	741	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
28		LP Klas IIA Narkotika Pamekasan	730	584				V	V				V	V					
29		LP Klas I Malang	1,379	552			V	V	V			V	V	V				V	V
30		LP Klas IIA Kediri	704	176															
31		Rutan Klas I Surabaya	1,780	1,246				V	V										
32		LP Klas IIA Sidoarjo	641	256									V	V					
33		LP Tulungagung	391	78															
34		LP Mojokerto	411	82															
35		LP Klas IIA Wanita Malang	289	87										V					V
36		LP Klas I Surabaya (Porong)	1,800	810				V	V				V	V				V	V
37		Lapas Klas IIA Jember	804	161															
38		Rutan Klas II Bangil	437	66															
39		Lapas Klas IIB Blitar	467	70															
40		Lapas Klas IIB Banyuwangi	906	272				V	V										
			11,665	**5,180**	**1**	**1**	**2**	**6**	**6**	**1**	**1**	**2**	**5**	**6**	**1**	**1**	**1**	**3**	**4**
41	**Sumatera Utara (5)**	LP Klas I Medan	1,753	701				V	V					V				V	V
42		Rutan Klas I Medan	2,487	1,492		V	V	V	V			V	V	V			V	V	V
43		LP Klas IIA Anak Medan	768	307															
44		LP Klas IIA Wanita Medan	397	159															
45		LP Klas IIA Pematang Siantar	787	512					V					V					V
46		Rutan Klas IIA Labuhan Deli	575	345															
47		LP Klas IIB Lubuk Pakam	935	187															
48		LP Klas IIA Binjai	897	404															
49		LP Klas IIA Rantau Prapat	718	144															
			9,317	**4,250**		**1**	**1**	**2**	**3**			**1**	**1**	**3**			**1**	**2**	**3**
50	**Jawa Tengah (6)**	LP Klas IIA Besi Nusakambangan	320	144															
51		LP Klas I Semarang	781	195		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
52		LP Khusus Narkotika Klas IIA NK	140	140				V	V				V	V					V
53		Rutan Klas I Surakarta	533	213															
54		LP Klas IIA Pekalongan	748	337				V	V			V	V	V					
55		Rutan Klas IIA Pekalongan	302	91														V	V
56		LP Klas IIA Magelang	422	63															
57		Lapas Klas I Batu NK	178	18															
58		Lapas Klas IIA Purwokerto	353	141															
59		Lapas Klas IIA Pasirputih NK	268	180															
60		Lapas Klas IIB Cilacap	449	157															
61		Lapas Klas IIB Tegal	235	82															
62		Lapas Klas IIA Wanita Semarang	129	45										V					
			4,858	**1,807**		**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**
63	**Kepri (7)**	LP Klas IIA Batam	1,294	647			V	V	V				V	V				V	V
64		Rutan klas II Batam	727	160					V					V					
65		LP Klas IIA Tanjung Pinang	537	188															
66		Rutan Klas IIA Tanjungbalai Karimun	409	143															
			2,967	**1,138**			**1**	**1**	**2**				**1**	**2**				**1**	**1**
67	**DIY (8)**	LP Kelas II A Yogyakarta	350	-					V					V					
68		LP Kelas II B Sleman	309	62															
69		Rutan Klas II Yogyakarta	137	15															
70		LP Klas IIA Narkotika Yogyakarta	173	173	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
			969	**250**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
71	**Bali (9)**	LP Klas IIA Denpasar	821	493	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
72		Rutan Klas IIB Bangli	92	18															
			913	**511**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
73	**Sumbar (10)**	LP Klas IIA Padang	615	246															
			615	**246**															

Lampiran 4d : Bidang IMS, PEP, dan Perawatan Paliatif AIDS-IO (Lanjutan)

No	Provinsi	Nama Lapas dan Rutan	Jml WBP per Maret 09	WBP Narkotika	IMS					PEP					Perawatan Paliatif AIDS dan IO				
					10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
74	**Riau (11)**	LP Klas IIA Pekan Baru	1,418	567				V	V				V	V				V	V
75		Rutan Klas IIB Dumai	566	198															
76		LP Klas IIA Tembilahan	378	95															
77		LP Klas IIB Bengkalis	481	144															
78		Lapas Klas IIB Bangkinang	473	142															
			3,316	**1,146**				**1**	**1**				**1**	**1**				**1**	**1**
79	**Babel (12)**	LP Klas IIA Pangkalpinang	365	147															
80		Lapas Klas IIB Sungai Liat	290	49															
			655	**196**															
81	**Jambi (13)**	LP Klas IIA Jambi	934	217															
82		LP Klas IIA Kuala Tungkal	323	47															
			1,257	**264**															
83	**Lampung (14)**	LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung	354	336															
84		Lapas Klas I Bandar Lampung	799	160															
85		Rutan Klas I Bandar Lampung	573	201															
			1,726	**697**															
86	**Sumsel (15)**	LP Klas I Palembang	1,065	426			V	V	V										V
87		Rutan Klas I Palembang	988	395															
88		LP Klas IIA Narkotika Lubuk Linggau	128	128															
			2,181	**949**			**1**	**1**	**1**										**1**
89	**Kalbar (16)**	LP Klas IIA Pontianak	445	134				V	V										V
90		Rutan Klas IIA Pontianak	597	179															
			1,042	**313**				**1**	**1**										**1**
91	**Kaltim (17)**	Rutan Klas IIA Samarinda	809	324															V
92		LP Klas IIA Samarinda	563	507				V	V										
93		Rutan Klas IIA Balikpapan	504	202															
94		Lapas Klas IIB Tenggarong	778	156															
95		LP Klas IIA Tarakan	635	159															
			3,289	**1,346**				**1**	**1**										**1**
96	**Kalsel (18)**	LP Klas IIA Banjarmasin	1,066	533				V	V										
97		LP Klas IIA Anak Martapura	544	163															
			1,610	**696**				**1**	**1**										
98	**Sulsel (19)**	Rutan Klas I Makassar	823	329															
99		LP Klas I Makassar	499	-				V	V				V	V					
100		LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa	247	235															
			1,569	**564**				**1**	**1**				**1**	**1**					
101	**NTB (20)**	LP Klas IIA Mataram	436	174															
			436	**174**															
		Total target Napi/tahanan di Lapas/Rutan prioritas	**82,023**	**36,118**	**6**	**8**	**15**	**30**	**33**	**7**	**7**	**13**	**25**	**33**	**7**	**7**	**10**	**18**	**26**
		Total populasi Napi/tahanan di Indonesia	**131,115**	**38,427**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**	**LP**
		Prosentase	**63**	**94**															

Lampiran 6 : Kebutuhan Anggaran Tahunan Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/Rutan

Program		Komponen	Satuan	Biaya Satuan *)	Target Program (Jml Lapas/Rutan atau WBP/Tahanan)					Jumlah kebutuhan anggaran tahunan					Total
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Program Penegakan dan bimbingan hukum, terapi dan rehabilitasi serta Pelayanan Sosial yang berkesinambungan	1.1.	Penegakan & Bimbingan Hukum	Lapas/ Rutan	40,917,000	139	139	139	139	139	5,687,463,000	5,687,463,000	5,687,463,000	5,687,463,000	5,687,463,000	28,437,315,000
	1.2.	Pelayanan Sosial	Lapas/ Rutan	33,700,000	139	139	139	139	139	4,684,300,000	4,684,300,000	4,684,300,000	4,684,300,000	4,684,300,000	23,421,500,000
	1.3.	PTRM	orang	1,211,732	410	497	600	642	680	496,651,020	602,314,753	726,534,441	777,699,316	824,051,191	3,427,250,720
	1.4.	Terapi dan rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Lapas/ Rutan	1,448,600,000	139	139	139	139	139	201,355,400,000	201,355,400,000	201,355,400,000	201,355,400,000	201,355,400,000	1,006,777,000,000
2. Program pencegahan penularan HIV dan penatalaksanaan AIDS dan infeksi oportunistik.	2.1.	KIE tentang pencegahan penularan HIV dan infeksi oportunistik	Lapas/ Rutan	5,200,000	139	139	139	139	139	722,800,000	722,800,000	722,800,000	722,800,000	722,800,000	3,614,000,000
	2.2.	VCT/PICT bagi WBP dan tahanan	orang	799,204	13,857	14,780	15,704	17,552	18,475	11,074,234,162	11,812,516,440	12,550,798,717	14,027,363,272	14,765,645,550	64,230,558,141
	2.3.	Akses material pencegahan penularan HIV dan penyakit oportunistik	Lembar kondom per tahun	48,000	988	3,489	6,623	9,036	11,071	47,424,000	2,009,664,000	3,814,848,000	5,204,736,000	6,376,896,000	17,453,568,000
			Botol bleach per tahun	7,360	768	806	871	958	1,073	5,652,480	5,935,104	6,409,912	7,050,904	7,897,012	32,945,412
	2.4.	K3 bagi petugas Lapas/Rutan dan Bapas serta WBP	Lapas/ Rutan	1,750,000	20	25	35	45	51	35,000,000	43,750,000	61,250,000	78,750,000	89,250,000	308,000,000
	2.5.	Profilaksis pasca pajanan bagi petugas Lapas, Rutan, Bapas, dan WBP/tahanan	Lapas/ Rutan	9,200	7	7	13	25	33	64,400	64,400	119,600	230,000	303,600	782,000
3. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi WBP dan tahanan ODHA	3.1.	Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan ARV dan IO bagi WBP/tahanan ODHA	Lapas/ Rutan	4,906,667	6	8	15	30	33	29,440,002	39,253,336	73,600,005	147,200,010	161,920,011	451,413,364
	3.2.	Pengobatan ARV dan IO (TB)	Orang	1,277,778	346	443	550	790	924	442,640,827	566,580,259	702,323,445	1,009,221,086	1,180,375,539	3,901,141,155
	3.3.	Perawatan paliatif AIDS dan IO bagi WBP dan tahanan	Lapas/ Rutan	160,000,000	0	7	10	18	26		1,120,000,000	1,600,000,000	2,880,000,000	4,160,000,000	9,760,000,000
4. Penelitian/ pengamatan & pengembangan	4.1.	Survei survaialns perilaku WBP dan tahanan	Lapas/ Rutan	75,500,000	-	-	-	-	11					830,500,000	830,500,000
	4.2.	Penjajagan Situasi Cepat WBP/tahanan Narkoba	Lapas/ Rutan	55,000,000	11	-	-	-	-	605,000,000					605,000,000
	4.3.	Site study dan replikasi layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS	Lapas/ Rutan	160,000,000	0	8	15	30	33		1,280,000,000	2,400,000,000	4,800,000,000	5,280,000,000	13,760,000,000
	4.4.	Site study dan replikasi layanan jarum suntik steril	Lapas/ Rutan	160,000,000	0	4	6	10	12		640,000,000	960,000,000	1,600,000,000	1,920,000,000	5,120,000,000
	4.5.	Site study dan replikasi layanan palliatif HIV dan AIDS berbasis Lapas/Rutan	Lapas/ Rutan	160,000,000	0	7	10	18	26		1,120,000,000	1,600,000,000	2,880,000,000	4,160,000,000	9,760,000,000
	4.6.	Site study dan replikasi pelaksanaan Kelompok Bantu Diri Napza basis 12 langkah	Lapas/ Rutan	160,000,000	2	4	6	10	12	320,000,000	640,000,000	960,000,000	1,600,000,000	1,920,000,000	5,440,000,000
5. Pelaksanaan program komprehensif dan berkesinambungan di Lapas/Rutan Rujukan		Pelatihan, Pelaksanaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi	Lapas/ Rutan	15,000,000	10	20	40	80	139	150,000,000	300,000,000	600,000,000	1,200,000,000	2,085,000,000	4,335,000,000
										225,656,069,891	232,630,041,291	238,505,847,121	248,662,213,587	256,211,801,902	1,201,665,973,792

*) Unit cost pembiayaan program # 1 - 4 menggunakan standar KPAN, kecuali Bimkum dan Yansos

	cost per person/year	cost per person/month
Prisoners all	2,930,071	244,173
Drug users	6,654,111	554,509

KOMISI
PENANGGULANGAN
AIDS

BNN

Australian Government
AusAID